



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 17 TAHUN 2015**



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2015**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016;
- b. bahwa dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan percepatan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program program Pemerintah Pusat dan Daerah, maka perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasinal (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- (2) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2016;
- (3) Penjabaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 sebagaimana maksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (4) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2016;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2016;

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD;

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di tetapkan di Pangkajene

pada tanggal, 28 Mei 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal, 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 ini menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rancangan APBD yang menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahunan dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu, Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen RKPD ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dokumen RKPD ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2016.

Pangkajene Sidenreng, 28 Mei 2015

Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang,
Selaku Penanggungjawab



SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR ISTILAH..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... | I-5 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... | I-6 |
| 1.4 Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD..... | I-8 |
| 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal RKPD..... | I-9 |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN..... | II-1 |
| 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang..... | II-1 |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... | II-1 |
| 2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah..... | II-1 |
| A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi..... | II-1 |
| B. Kondisi Topografi..... | II-2 |
| C. Kondisi Geologi..... | II-4 |
| D. Kondisi Klimatologi..... | II-5 |
| E. Kondisi Hidrologi..... | II-5 |
| F. Penggunaan Lahan..... | II-7 |
| 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana..... | II-8 |
| 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT..... | II-15 |
| 2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI..... | II-15 |
| A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... | II-15 |
| B. Laju Inflasi..... | II-18 |
| C. PDRB Perkapita..... | II-19 |
| D. Tingkat Kemiskinan..... | II-20 |
| E. Indeks Pembangunan Manusia..... | II-21 |
| F. Angka Partisipasi Kasar..... | II-23 |
| G. Angka Partisipasi Murni..... | II-23 |

| | | |
|---------|---|-------|
| 2.1.2.2 | FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL..... | II-24 |
| A. | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | II-24 |
| B. | Persentase Balita Gizi Buruk | II-25 |
| C. | Rasio Penduduk Yang Bekerja | II-25 |
| 2.1.2.3 | FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA..... | II-26 |
| A. | Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya dan Jumlah Klub Olahraga | II-26 |
| B. | Pemuda Dan Olah Raga..... | II-26 |
| C. | Seni Budaya | II-27 |
| D. | Pariwisata..... | II-29 |
| 2.1.3 | ASPEK PELAYANAN UMUM | II-29 |
| 2.1.3.1 | Fokus Layanan Urusan Wajib | II-30 |
| A. | Pendidikan..... | II-30 |
| B. | Kesehatan | II-32 |
| C. | Pekerjaan Umum..... | II-34 |
| D. | Perumahan | II-36 |
| E. | Perencanaan Pembangunan | II-39 |
| F. | Perhubungan..... | II-39 |
| G. | Lingkungan Hidup..... | II-40 |
| H. | Kependudukan Dan Catatan Sipil..... | II-41 |
| I. | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | II-42 |
| J. | Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera..... | II-42 |
| K. | Sosial..... | II-44 |
| L. | Ketenagakerjaan | II-47 |
| M. | Ketransmigrasian..... | II-49 |
| N. | Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah | II-50 |
| O. | Penanaman Modal | II-51 |
| P. | Kebudayaan..... | II-51 |
| Q. | Pariwisata | II-52 |
| R. | Pemuda Dan Olah Raga..... | II-53 |
| S. | Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri | II-54 |
| T. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian | II-54 |
| U. | Ketahanan Pangan | II-58 |
| V. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | II-61 |
| W. | Perpustakaan Dan Arsip | II-63 |

| | | |
|----------|--|--------|
| X. | Komunikasi Dan Informatika..... | II-64 |
| 2.1.3.2 | Fokus Layanan Urusan Pilihan | II-64 |
| A. | Pertanian, Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura | II-64 |
| B. | Kehutanan | II-71 |
| C. | Peternakan | II-71 |
| D. | Perindustrian Dan Perdagangan | II-75 |
| E. | Ketransmigrasian..... | II-77 |
| 2.1.4 | ASPEK DAYA SAING DAERAH..... | II-77 |
| 2.1.4.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... | II-77 |
| 2.1.4.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-78 |
| 2.1.4.3 | Fokus Iklim Berinvestasi..... | II-79 |
| 2.1.4.4 | Fokus Sumber Daya Manusia | II-83 |
| 2.2 | Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD | II-86 |
| 2.3 | Permasalahan Pembangunan Daerah | II-87 |
| 2.3.1 | Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Perioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | II-87 |
| 2.3.2 | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | II-91 |
| BAB III | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... | III-1 |
| 3.1.1. | Kondisi Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang 2013 dan Perkiraan Tahun 2015..... | III-2 |
| 3.1.2. | Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan tahun 2017 | III-7 |
| 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-8 |
| 3.2.1 | Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... | III-9 |
| 3.2.2 | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-15 |
| 3.2.2.1 | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah | III-15 |
| 3.2.2.2 | Arah Kebijakan Belanja Daerah | III-16 |
| 3.2.2.3 | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah | III-20 |
| BAB IV | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH..... | IV-1 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV-1 |
| 4.2 | Perioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | IV-11 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... | V-1 |
| BAB VI | PENUTUP | VI-1 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2. 1 | Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha), Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2013 | II-2 |
| Tabel 2. 2 | Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 | II-3 |
| Tabel 2. 3 | Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai | II-6 |
| Tabel 2.4 | Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 | II-7 |
| Tabel 2. 5 | Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 – 2013 | II-9 |
| Tabel 2. 6 | Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 – 2013 | II-10 |
| Tabel 2. 7 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2009-2013 | II-10 |
| Tabel 2. 8 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2009-2013..... | II-11 |
| Tabel 2. 9 | Kepadatan Penduduk Per Km2 Tahun 2009 – 2013 | II-12 |
| Tabel 2. 10 | Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013. | II-13 |
| Tabel 2. 11 | Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013..... | II-14 |
| Tabel 2. 12 | Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan..... | II-14 |
| Tabel 2. 13 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang | II-15 |
| Tabel 2. 14 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang | II-16 |
| Tabel 2. 15 | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Sidenreng Rappang | II-16 |
| Tabel 2. 16 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Sektor Tahun 2009 - 2013 | II-17 |
| Tabel 2. 17 | Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2013 (Juta Rupiah)..... | II-18 |
| Tabel 2. 18 | Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Tahun 2008-2012..... | II-18 |
| Tabel 2. 19 | PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2009-2013 | II-19 |
| Tabel 2. 20 | Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013 | II-21 |
| Tabel 2. 21 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang | II-23 |
| Tabel 2. 22 | Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang | II-23 |
| Tabel 2. 23 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang | II-24 |
| Tabel 2. 24 | Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013.. | II-24 |
| Tabel 2. 25 | Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang..... | II-25 |
| Tabel 2. 26 | Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-25 |
| Tabel 2. 27 | Rasio Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013..... | II-25 |

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2. 28 | Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-26 |
| Tabel 2. 29 | Instrumen Kepemudaan Tahun 2013..... | II-27 |
| Tabel 2. 30 | Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2013 | II-27 |
| Tabel 2. 31 | Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013..... | II-28 |
| Tabel 2. 32 | Benda, Situs Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan..... | II-28 |
| Tabel 2. 33 | Jenis Obyek Wisata Tahun 2013..... | II-29 |
| Tabel 2. 34 | Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013..... | II-31 |
| Tabel 2. 35 | Kinerja Kesehatan Tahun 2009 – 2013 Kab Sidenreng Rappang..... | II-34 |
| Tabel 2. 36 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-35 |
| Tabel 2. 37 | Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013 | II-35 |
| Tabel 2. 38 | Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013 | II-36 |
| Tabel 2. 39 | Jumlah Infrastruktur Permukiman yang Terlayani | II-36 |
| Tabel 2. 40 | Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam penanganan Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 | II-36 |
| Tabel 2. 41 | Dokumen perencanaan permukiman yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-38 |
| Tabel 2. 42 | Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-38 |
| Tabel 2. 43 | Data Perhubungan Tahun 2009 – 2013 Kab Sidenreng Rappang | II-39 |
| Tabel 2. 44 | Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup..... | II-40 |
| Tabel 2. 45 | Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-41 |
| Tabel 2. 46 | Kinerja Urusan kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013 | II-41 |
| Tabel 2. 47 | Angkatan Kerja di Bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-42 |
| Tabel 2. 48 | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang..... | II-43 |
| Tabel 2. 49 | Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-43 |
| Tabel 2. 50 | Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 - 2013 | II-43 |
| Tabel 2. 51 | Capaian Kinerja Sarana Sosial LKS | II-44 |
| Tabel 2. 52 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 | II-44 |
| Tabel 2. 53 | PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-46 |
| Tabel 2. 54 | Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-46 |
| Tabel 2. 55 | Jenis dan Jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-47 |

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2. 56 | Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Seminggu yang lalu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013..... | II-47 |
| Tabel 2. 57 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012..... | II-48 |
| Tabel 2. 58 | Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-48 |
| Tabel 2. 59 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang | II-49 |
| Tabel 2. 60 | Data Ketrasmigrasian Kab Sidenreng Rappang Tahun 2012 | II-49 |
| Tabel 2. 61 | Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-50 |
| Tabel 2. 62 | Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-50 |
| Tabel 2. 63 | Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-50 |
| Tabel 2. 64 | Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013..... | II-51 |
| Tabel 2. 65 | Situs Budaya Kab Sidenreng Rappang Tahun 2008 - 2012..... | II-52 |
| Tabel 2. 66 | Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-53 |
| Tabel 2. 67 | Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013..... | II-53 |
| Tabel 2. 68 | Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | II-54 |
| Tabel 2. 69 | Jumlah Jabatan Struktural Pemerintah..... | II-54 |
| Tabel 2. 70 | Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang..... | II-54 |
| Tabel 2. 71 | Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | II-55 |
| Tabel 2. 72 | Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang..... | II-55 |
| Tabel 2. 73 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2012..... | II-56 |
| Tabel 2. 74 | Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-56 |
| Tabel 2. 75 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2013 | II-57 |
| Tabel 2. 76 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-58 |
| Tabel 2. 77 | Data Penyuluh Sektor Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013..... | II-59 |
| Tabel 2. 78 | Data Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-59 |
| Tabel 2. 79 | Data Kelembagaan Kelompok Wanita Tani Tahun 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-60 |
| Tabel 2. 80 | Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-61 |
| Tabel 2. 81 | Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-61 |
| Tabel 2. 82 | Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2009 – 2013..... | II-61 |
| Tabel 2. 83 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-62 |

| | | |
|--------------|---|-------|
| Tabel 2. 84 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-62 |
| Tabel 2. 85 | PKK Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-63 |
| Tabel 2. 86 | Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-63 |
| Tabel 2. 87 | Perkembangan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013 | II-64 |
| Tabel 2. 88 | Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-64 |
| Tabel 2. 89 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013..... | II-65 |
| Tabel 2. 90 | Tabel Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura Tahun 2010-2013 | II-65 |
| Tabel 2. 91 | Penggunaan Pupuk Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-66 |
| Tabel 2. 92 | Data Sebaran Penggilingan Padi Besar Selama Kurun Waktu Tahun 2009 - 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-67 |
| Tabel 2. 93 | Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Selama Tahun 2009 -2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-68 |
| Tabel 2. 94 | Sebaran Perkembangan Alat Mekanisasi Pertanian Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-69 |
| Tabel 2. 95 | Luas Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Kebun Bibit Rakyat yang telah di rehabilitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-71 |
| Tabel 2. 96 | Data Perkembangan populasi Ternak Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-72 |
| Tabel 2. 97 | Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-73 |
| Tabel 2. 98 | Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-73 |
| Tabel 2. 99 | Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-73 |
| Tabel 2. 100 | Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang | II-74 |
| Tabel 2. 101 | Perkembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 – 2012..... | II-75 |
| Tabel 2. 102 | Data Perkembangan Industri | II-75 |
| Tabel 2. 103 | Data Ketrasmigrasian | II-77 |
| Tabel 2. 104 | Persentase Konsumsi Pangan & Non Pangan | II-78 |
| Tabel 2. 105 | Data Perhubungan Tahun 2009 – 2013 Kab Sidenreng Rappang..... | II-79 |
| Tabel 2. 106 | Daftar Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang | II-79 |
| Tabel 2. 107 | Jenis-Jenis Retribusi Pendapatan Asli Daerah | II-80 |
| Tabel 2. 108 | Angka Kriminalitas..... | II-82 |
| Tabel 2. 109 | Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2009 – 2013..... | II-83 |
| Tabel 2. 110 | Persentase penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan Tahun 2013 | II-85 |

| | | |
|--------------|---|--------|
| Tabel 2. 111 | Tabel Keadaan Penduduk berdasarkan Kemampuan Baca Tulis, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013 | II-85 |
| Tabel 2. 112 | Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2009 – 2013 | II-86 |
| Tabel 2. 113 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | II-92 |
| Tabel 2. 114 | Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya | II-94 |
| Tabel 3 1 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang | III-3 |
| Tabel 3 2 | Indeks Pembangunan Manusia Menurut Indikator Tahun 2011-2013..... | III-7 |
| Tabel 3 3 | Proyeksi Indikator Makro Tahun 2015 dan 2016 | III-8 |
| Tabel 3 4 | Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang | III-13 |
| Tabel 3 5 | Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang | III-18 |
| Tabel 3 6 | Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang | III-21 |
| Tabel 4. 1 | Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran/Strategi Pembangunan | IV-4 |
| Tabel 4. 2 | Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah | IV-17 |
| Tabel 4. 3 | Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 | IV-18 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1 1 | Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota..... | I-4 |
| Gambar 1 2 | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | I-8 |
| Gambar 2 1 | Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang | II-1 |
| Gambar 2 2 | Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang | II-3 |
| Gambar 2 3 | Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang..... | II-9 |
| Gambar 2 4 | Perkembangan Sex Ratio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013..... | II-13 |
| Gambar 2 5 | Pertumbuhan Ekonomi | II-17 |
| Gambar 2 6 | Perbandingan PDRB Perkapita untuk Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2013..... | II-20 |
| Gambar 2 7 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang | II-20 |
| Gambar 2 8 | Sandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 -2013..... | II-21 |
| Gambar 2 9 | Sandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 - 2013 | II-22 |
| Gambar 2 10 | Angka Kematian Balita | II-32 |
| Gambar 2 11 | Angka Kematian Bayi | II-32 |
| Gambar 2 12 | Kasus Gizi Buruk dan Kurang..... | II-33 |
| Gambar 2 13 | Penduduk yang bekerja Menurut Sektor (%)..... | II-48 |
| Gambar 3. 1 | Persentase perbandingan antara PDRB Kab. Sidrap terhadap PDRB Prov. Sulsel..... | III-4 |
| Gambar 3. 2 | Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 dan 2013 Menurut Sektor..... | III-5 |
| Gambar 3. 3 | Perbandingan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 dan 2013..... | III-5 |
| Gambar 3. 4 | PDRB Masing-masing Sektor atas ADHB tahun 2013 | III-6 |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------|---|
| ADHB | : Atas Dasar Harga Berlaku |
| ADHK | : Atas Dasar Harga Konstan |
| AHH | : Angka Harapan Hidup |
| AKABA | : Angka Kematian Balita |
| AKB | : Angka Kematian Bayi |
| APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| APM | : Angka Partispai Murni |
| BBLR | : Berat Badan Lahir Rendah |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| IPKM | : Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat |
| IPM | : Indeks Pembangunan Manusia |
| KUA | : Kebijakan Umum APBD |
| PAD | : Pendapatan Asli Daerah |
| PDRB | : Pendapatan Domestik Regional Bruto |
| PPAS | : Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara |
| RAPBD | : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| RENJA | : Rencana Kerja |
| RKP | : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) |
| RKPD | : Rencana Kerja Pembangunan Daerah |
| RPJMD | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJPD | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| SILPA | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan, meliputi sosial, budaya dan politik sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyesuaian konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi, sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas Lingkungan yang baik. Optimalisasi sumber daya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkungan luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPDP adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPDP Provinsi. RKPDP memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun bersama partisipasi masyarakat. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPDP memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Proses penyusunan dokumen RKPDP Tahun 2016 ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. (1) Pendekatan Partisipatif : pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, (2) Pendekatan Teknokratik : pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk merumuskan tujuan, strategi, sasaran, prioritas, kebijakan pembangunan berbasis kinerja ke dalam program kegiatan lengkap dengan pagu indikatif dan prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya. (3) Pendekatan Politis : pendekatan ini dilaksanakan konsultasi dengan Kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah serta pokok-pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaan penjabaran aspirasi masyarakat (reses), (4) Pendekatan *top-down* dan

bottom-up : pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan dan sinkronisasi atau penyalarsan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Kedudukan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dalam periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran pada tahun ke-3 (tiga) dengan menitik beratkan pada prioritas **"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Didukung Oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah"** sebagaimana menjadi tema pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015 dihadiri oleh Bupati Sidenreng Rappang, para Kepala SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, pimpinan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan beserta staf, Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang beserta staf, unsur kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, delegasi kecamatan, akademisi, LSM dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dengan keterwakilan dari unsur perempuan peserta musrenbang sekitar 30%.

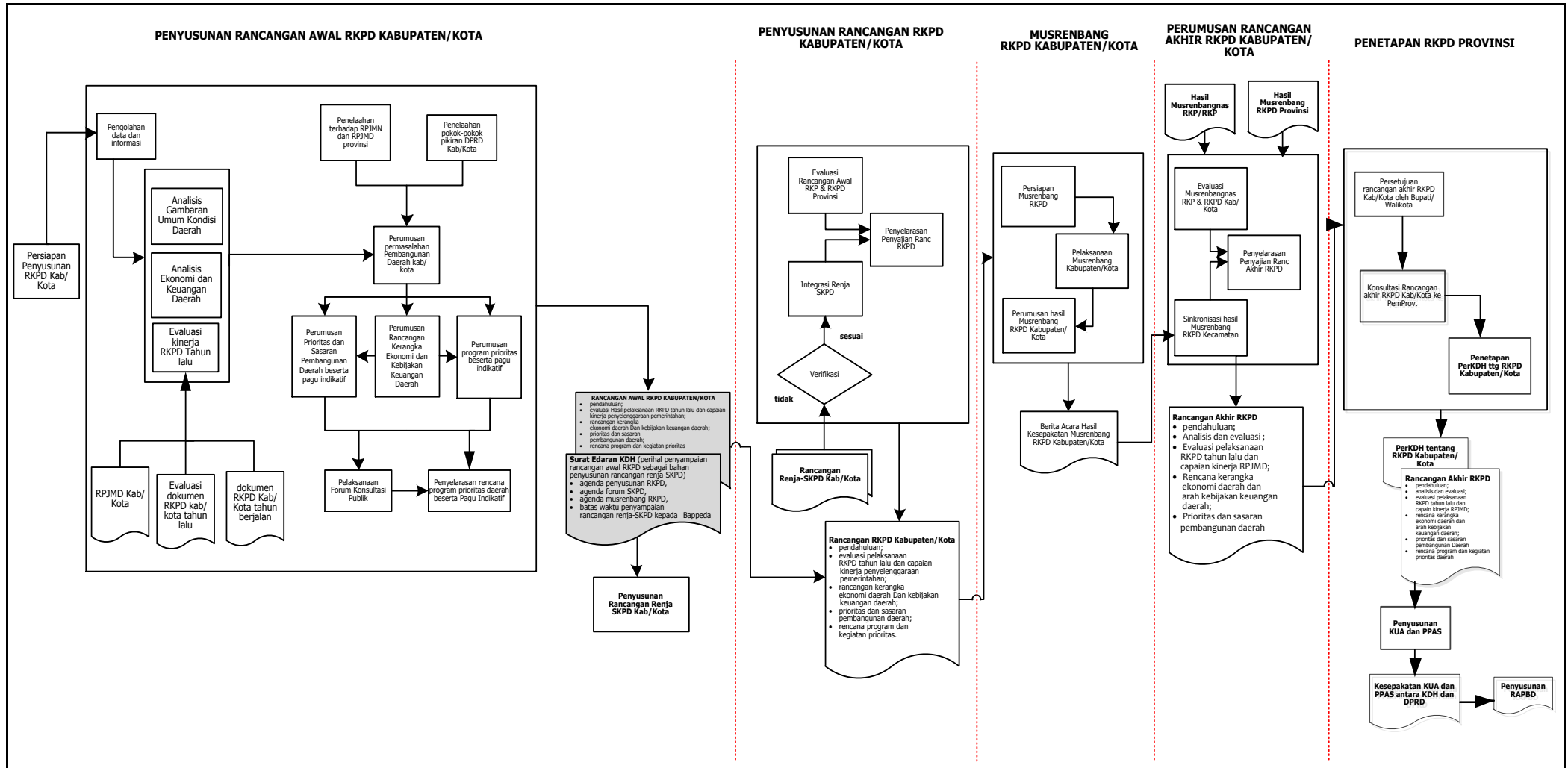
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Di samping itu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan melaksanakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan dengan perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD berdasarkan pengelolaan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan kebijakan pemerintah nasional, penelaahan pokok pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik, dan penyalarsan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

2. Penyusunan rancangan RKPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah meintergrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Pelaksanaan musrenbang RKPD, dalam pelaksanaanya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD, yakni penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang mulai dari Musrenbang Dusun/Lingkungan, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten.
4. Perumusan rancangan akhir RKPD, berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancanagn akhir RKPD.
5. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang. Hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat provinsi dan pusat.

Adapun skema tahapan penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 1 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 didasarkan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena RKPd disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 dan RPJMN Tahun 2015 - 2019 Selain itu, RKPd Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 juga mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan RKPd Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

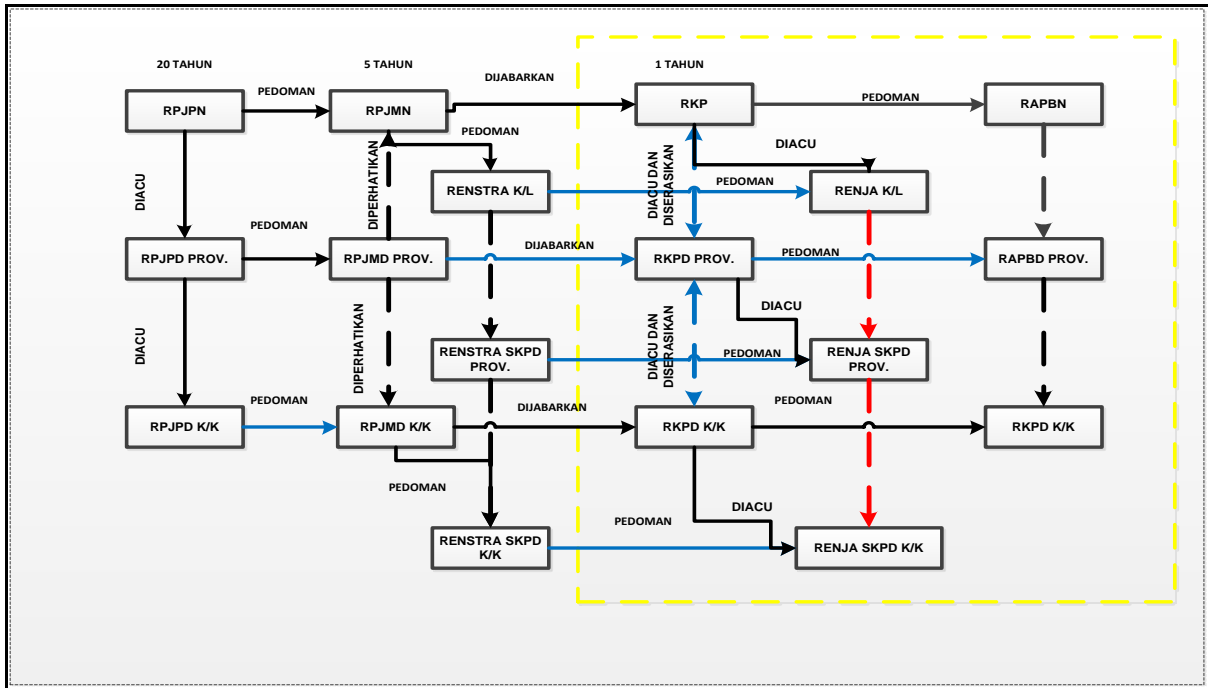
Lebih lanjut hubungan RKPd dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD yaitu RKPd memuat program dan kegiatan SKPD, penjabaran Renstra SKPD dan Dokumen RKPd merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPd

dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). RKPd Kabupaten Sidenreng Rappang juga merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPd. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPd harus diselesaikan pada setiap Akhir bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember. RKPd Tahun 2016 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai penjabaran sebagai berikut:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah itu sendiri memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan.
2. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
3. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 1 2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4 Sistematika Dokumen Rancangan Awal RKPD

Sistematika dokumen RKPD terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan tentang tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan prakiraan sumber sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan isu strategis, arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERIORITAS DAERAH

Bab ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, Instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam RKPD dan kaidah pelaksanaan dari Renca Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Renca Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Ranperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2016 adalah:

1. Memberikan informasi awal mengenai tujuan dan strategi pelaksanaan pembangunan satu tahun ke depan serta faktor-faktor yang mendukung pencapaian tujuan.
2. Memberikan informasi mengenai arah kebijakan dan prioritas program pembangunan tahun 2016.
3. Memberikan informasi awal mengenai rencana program dan kegiatan dan sumber pendanaan setiap usulan program/kegiatan pembangunan pada tahun 2016 dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
4. Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2014-2018) dan RPJPD 2005-2025.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibiayai dari sumber dana APBD Kabupaten.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pada Bab II berikut ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun 2014 selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 dan dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sebagai bahan acuan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten.

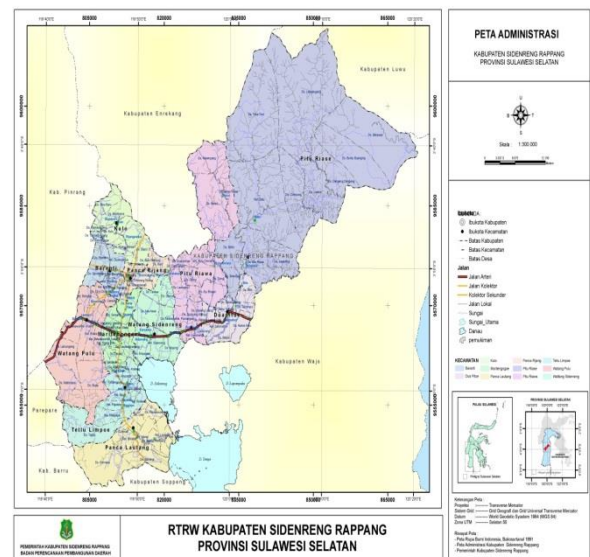
2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak diantara $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}10'$ Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}10'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- ❖ Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Berikut ini disajikan tabel luas daerah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha), Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2014



Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 2. 1 Luas Daerah Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha),
Persentase Luas dan Jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2014

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Presentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten | Jumlah Desa/Kelurahan | |
|--------|------------------|-----------|---|-----------------------|------|
| | | | | Kelurahan | Desa |
| 1 | Panca Lautang | 15.393 | 8,17 | 3 | 7 |
| 2 | Tellu LimpoE | 10.320 | 5,48 | 6 | 3 |
| 3 | Watang Pulu | 15.131 | 8,05 | 5 | 5 |
| 4 | Baranti | 5.389 | 2,86 | 5 | 4 |
| 5 | Panca Rijang | 3.402 | 1,80 | 4 | 4 |
| 6 | Kulo | 7.500 | 3,98 | - | 6 |
| 7 | MaritengngaE | 6.590 | 3,52 | 7 | 5 |
| 8 | Watang Sidenreng | 12.081 | 6,40 | 3 | 5 |
| 9 | Pitu Riawa | 21.043 | 11,17 | 2 | 10 |
| 10 | Dua Pitue | 6.999 | 3,72 | 2 | 8 |
| 11 | Pitu Riase | 84.477 | 44,85 | 1 | 11 |
| Jumlah | | 188.325 | 100,00 | 38 | 68 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2014

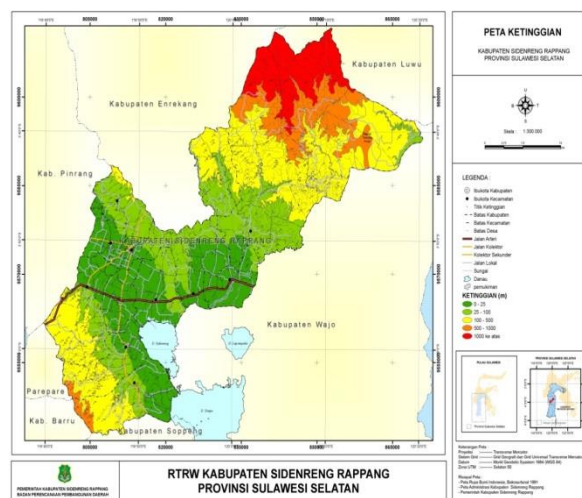
B. Kondisi Topografi

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- Lereng 0 – 2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
- Lereng 2 – 15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Lereng 15 – 40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan

sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15 – 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15 – 40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).



Gambar 2 3 Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah berada di Kecamatan MaritengngaE, Panca Rijang dan Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0 – 25 M dpl.

Tabel 2. 2 Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No | Kecamatan | Keadaan Tanah (%) | | | | Total |
|----|------------------|-------------------|----------|-----------|--------------|-------|
| | | Datar | Berbukit | Bergunung | Rawa / Danau | |
| 1 | Panca Lautang | 15 | 25 | 57 | 3 | 100 |
| 2 | Tellu LimpoE | 15 | 35 | 49 | 1 | 100 |
| 3 | Watang Pulu | 25 | 5 | 70 | - | 100 |
| 4 | Baranti | 100 | - | - | - | 100 |
| 5 | Panca Rijang | 97 | 3 | - | - | 100 |
| 6 | Kulo | 90 | 5 | 5 | - | 100 |
| 7 | MaritengngaE | 100 | - | - | - | 100 |
| 8 | Watang Sidenreng | 85 | 15 | - | - | 100 |
| 9 | Pitu Riawa | 60 | 10 | 30 | - | 100 |
| 10 | Dua Pitue | 100 | - | - | - | 100 |
| 11 | Pitu Riase | 35 | 25 | 40 | - | 100 |

Sumber : Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2014

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung.

C. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumosol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah **Alluvial** meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah **Regosol** seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase. Jenis tanah Regosol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah **Grumosol** seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumosol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu LimpoE seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah **Podsolit** seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah pedsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang

Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

D. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi *Shmidt dan Fergusson* terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

Tipe Pertama : Adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua : Adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3 – 4 bulan . Bulan-bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara).

Tipe Ketiga : Adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4 – 6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur).

E. Kondisi Hidrologi

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan MaritengngaE

dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua PituE dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No. | Kecamatan | Nama Sungai | Panjang (M) | Lebar (M) | Kedalaman (M) |
|-----|---------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 1. | Panca Lautang | - Bilokka | 20.000 | 22 | 9 |
| | | - Lokabatu | 2.000 | 6 | 3 |
| | | - Pape | 2.000 | 2 | 3 |
| | | - Cakkarella | 1.500 | 2 | 2 |
| | | - Bengkulu | 5.000 | 6 | 2,5 |
| | | - Sessanriu | 3.250 | 13 | 2,5 |
| 2. | Tellu LimpoE | - La Toling | 5.000 | 5 | 2 |
| | | - Pemantingan | 7.000 | 7 | 2,5 |
| | | - Watang Lowa | 6.000 | 3 | 1,5 |
| 3. | Watang Pulu | - BangkaE | 5.000 | 10 | 8 |
| | | - CakkaloloE | 5.000 | 10 | 5 |
| | | - AlekarajaE | 11.000 | 8 | 3 |
| | | - Lompengan | 5.000 | 8 | 2,5 |
| | | - DataE | 3.000 | 6 | 2,5 |
| | | - Pabbaresseng | 4.000 | 5 | 2,5 |
| | | - Polojiwa | 3.000 | 4 | 2,5 |
| | | - Batu Pute | 3.000 | 3 | 3 |
| 4. | Baranti | - Rappang | 15.000 | 30 | 5 |
| 5. | Panca Rijang | - Rappang | 10.000 | 25 | 8 |
| | | - Poka | 2.500 | 5 | 7 |
| | | - Tellang | 2.550 | 5 | 7 |
| | | - Taccipi | 4.500 | 6 | 5 |
| 6. | Kulo | - Pangkiri | 4.200 | 10 | 8 |
| | | - Kulo | 7.500 | 7 | 5 |
| | | - AnrelliE | 2.000 | 7 | 6 |
| | | - Anyuara | 4.200 | 8 | 5 |
| | | - Cinra Angin | 7.500 | 8 | 5 |
| 7. | MaritengngaE | - Takkalasi | 5.000 | 8 | 3 |
| 8. | Dua PituE | - Bila | 15.100 | 70 | 4 |
| | | - Baramasih | 11.750 | 50 | 5 |
| | | - Betao | 10.085 | 50 | 3 |
| | | - Tanru Tedong | 4.250 | 100 | 5 |
| | | - Kalempang | 6.375 | 80 | 4 |
| | | - Lancirang | 8.150 | 10 | 3 |
| | | - Samallangi | 2.500 | 8 | 2 |
| | | - Loka | 10.250 | 25 | 3 |
| 9. | Pitu Riawa | - AnabannaE | 5.000 | 7 | 3 |
| | | - Banjara | 2.500 | 6 | 2,5 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2014

F. Penggunaan Lahan

- ✓ Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032, Kawasan Lindung dibagi atas :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. Kawasan lindung geologi.
- ✓ Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No | Peruntukan | Luas (Ha) | Persentase terhadap Luas Kabupaten (%) |
|----|---------------|-----------|--|
| 1 | Permukiman | 4.126,71 | 2,10 |
| 2 | Sawah | 46.969,12 | 23,86 |
| 3 | Hutan Sejenis | 1.632,94 | 0,83 |
| 4 | Hutan Lebat | 59.724,57 | 30,34 |
| 5 | Perkebunan | 18.443,45 | 9,37 |
| 6 | Padang Rumput | 18.032,41 | 9,16 |
| 7 | Kebun Campur | 21.391,79 | 10,87 |

| No | Peruntukan | Luas (Ha) | Persentase terhadap Luas Kabupaten (%) |
|--------|-------------------|------------|--|
| 8 | Ladang/Tegalan | 1.464,90 | 0,74 |
| 9 | Kolam/Tambak/Rawa | 765,05 | 0,39 |
| 10 | Danau | 1.636,15 | 0,83 |
| 11 | Belukar/Lainnya | 22.668,05 | 11,52 |
| Jumlah | | 188.325,18 | 100,00 |

Sumber : Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2014

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu:

A. Banjir

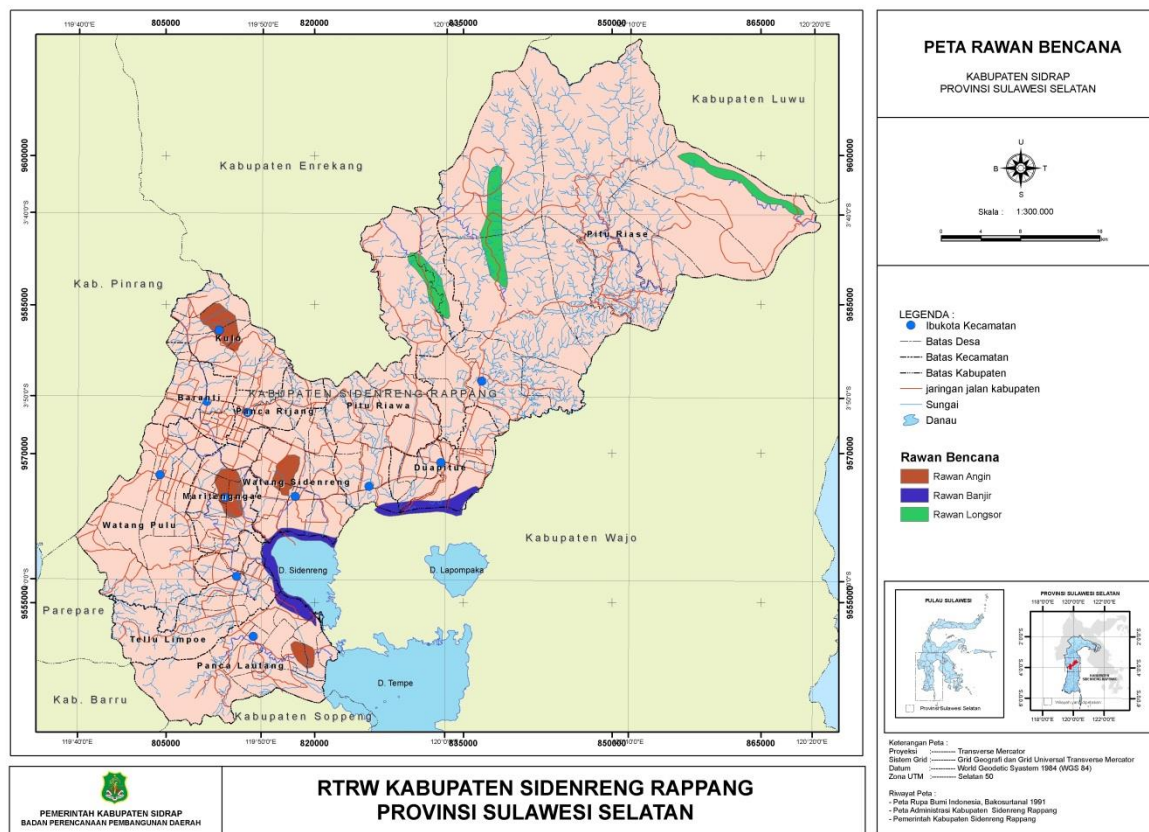
Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang berada disekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di Kecamatan Dua Pitue.

B. Longsor

Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa Lepangeng, Desa Tana Toro dan Desa Belawae.

C. Angin Puting Beliung

Sedangkan untuk kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan Maritangngae, Kecamatan Tellu Limpoe serta Kecamatan Panca Lautang.



Gambar 2 4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Sumber: RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2012

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam yaitu angin puting beliung/kencang sebanyak 23 kali kejadian, banjir sebanyak 5 kejadian dan longsor sebanyak 2 kejadian yang tersebar di beberapa desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar Rp. 64.639.564.000,- dengan jumlah korban jiwa sebanyak 6 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan 13 orang Seperti yang dijelaskan pada tabel 2.7 di bawah ini

Tabel 2. 5 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 – 2013

| Tahun | Kejadian bencana | Lokasi kejadian | Jumlah kejadian | Nilai Kerugian (Rp) | Ket. |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| 2011 | Angin Kencang / Puting Beliung | Tersebar di 32 Desa / Kelurahan | 10 Kali | 332.629.000,- | |
| 2012 | Angin Kencang / Puting Beliung | Tersebar di 67 Desa / Kelurahan | 6 Kali | 5.107.175.000,- | 5 Korban Jiwa 3 Luka Berat 13 Luka Ringan |
| | Banjir | Tersebar di 40 Desa / Kelurahan | 3 Kali | 10.730.125.000,- | 1 Korban Jiwa |
| | Longsor | Terjadi di 2 Desa / Kelurahan | 2 Kali | 2.000.000.000,- | |

| Tahun | Kejadian bencana | Lokasi kejadian | Jumlah kejadian | Nilai Kerugian (Rp) | Ket. |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| 2013 | Angin Kencang / Puting Beliung | Tersebar di 88 Desa / Kelurahan | 7 Kali | 2.678.885.000,- | |
| | Banjir | Tersebar di 21 Desa / Kelurahan | 2 Kali | 43.790.750.000,- | |
| TOTAL | | | | 64.639.564.000,- | |

Sumber: RTRW Kabuapten Sidenreng Rappang; 2012-2013

Untuk bencana yang timbul akibat kelalaian manusia yaitu kebakaran dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir mulai tahun 2011 – 2013 jumlah kejadian sebanyak 56 kali yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar Rp. 4.714.500.000,- serta korban jiwa sebanyak 1 orang dan luka berat 1 orang seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 – 2013

| Tahun | Kejadian bencana | Lokasi kejadian | Jumlah kejadian | Nilai kerugian (Rp.) | Ket. |
|-------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| 2011 | Kebakaran | Tersebar di 17 Desa / Kelurahan | 17 Kali | 589.000.000,- | |
| 2012 | Kebakaran | Terjadi di 23 Desa / Kelurahan | 21 Kali | 2.476.500.000,- | |
| 2013 | Kebakaran | Tersebar di 15 Desa / Kelurahan | 18 Kali | 1.649.000.000,- | 1 Korban Jiwa 1 Luka Berat |
| | Total | | 56 Kali | 4.714.500.000,- | |

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2012-2013

2.1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2009 sampai 2013 atau selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan dan terkonsentrasi di kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten, kecamatan Panca Rijang dan kecamatan-kecamatan sekitar ibukota kabupaten. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2009-2013

| NO. | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 17,071 | 17,241 | 17,339 | 17,442 | 18,113 |
| 2 | Tellu Limpoe | 21,511 | 22,728 | 22,871 | 23,089 | 23,415 |
| 3 | Watang Pulu | 25,959 | 30,128 | 30,582 | 30,947 | 31,590 |

| NO. | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4 | Baranti | 26,569 | 28,068 | 28,369 | 28,522 | 28,997 |
| 5 | Panca Rijang | 25,258 | 27,086 | 27,332 | 27,613 | 28,195 |
| 6 | Kulo | 10,660 | 11,345 | 11,462 | 11,586 | 11,831 |
| 7 | Maritengngae | 40,767 | 46,139 | 46,643 | 47,203 | 48,197 |
| 8 | Watang Sidenreng | 15,729 | 17,051 | 17,203 | 17,395 | 17,762 |
| 9 | Pitu Riawa | 24,212 | 24,980 | 25,213 | 25,473 | 26,210 |
| 10 | Dua Pitue | 26,340 | 27,272 | 27,549 | 27,865 | 28,252 |
| 11 | Pitu Riase | 18,407 | 19,873 | 20,089 | 20,316 | 20,745 |
| Jumlah | | 252,483 | 271,911 | 274,652 | 277,451 | 283,307 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya, Pada tahun 2009 kenaikan sebesar 1.817 jiwa, dari 250.666 jiwa menjadi 252.483 jiwa. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan paling besar untuk lima tahun terakhir yaitu sebesar 19.428 jiwa, yaitu dari 252.483 menjadi 271.911 jiwa. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan 2.741 jiwa menjadi 274.652 jiwa dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 277.451 jiwa atau terdapat kenaikan 2.799 jiwa. Mengamati perkembangan jumlah penduduk terdapat hal menarik yaitu angka peningkatan jumlah penduduk yang kurang lebih konstan diangka 2700 jiwa tiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Adapun data sementara jumlah penduduk pada Tahun 2014 meningkat menjadi 286.610 jiwa, dengan kenaikan sekitar 3.303 jiwa. Jumlah penduduk per kecamatan tahun 2009 – 2013 tersebut di atas selanjutnya dibagi atas jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan seperti pada data berikut ini :

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2009-2013

| NO | KECAMATAN | TAHUN | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Panca Lautang | 8,113 | 8,958 | 8,316 | 8,925 | 8,363 | 8,976 | 8,404 | 9,038 | 8,726 | 9,387 |
| 2 | Tellu Limpoe | 10,100 | 11,411 | 10,761 | 11,967 | 10,847 | 12,024 | 10,951 | 12,138 | 11,167 | 12,248 |
| 3 | Wattang Pulu | 12,740 | 13,219 | 14,846 | 15,282 | 15,074 | 15,508 | 15,244 | 15,703 | 15,577 | 16,013 |
| 4 | Baranti | 12,687 | 13,882 | 13,527 | 14,541 | 13,690 | 14,679 | 13,706 | 14,816 | 13,988 | 15,009 |
| 5 | Panca Rijang | 12,144 | 13,114 | 13,032 | 14,054 | 13,163 | 14,169 | 13,292 | 14,321 | 13,591 | 14,604 |
| 6 | Kulo | 5,173 | 5,487 | 5,511 | 5,834 | 5,582 | 5,880 | 5,635 | 5,951 | 5,762 | 6,069 |
| 7 | Maritengngae | 19,660 | 21,107 | 22,295 | 23,844 | 22,595 | 24,048 | 22,886 | 24,317 | 23,400 | 24,797 |
| 8 | Watang Sidenreng | 7,606 | 8,123 | 8,346 | 8,705 | 8,439 | 8,764 | 8,528 | 8,867 | 8,720 | 9,042 |
| 9 | Pitu Riawa | 11,828 | 12,384 | 12,277 | 12,703 | 12,395 | 12,818 | 12,518 | 12,955 | 12,858 | 13,352 |
| 10 | Dua Pitue | 12,686 | 13,654 | 13,219 | 14,053 | 13,423 | 14,126 | 13,581 | 14,284 | 13,886 | 14,366 |
| 11 | Pitu Riase | 9,299 | 9,108 | 9,973 | 9,900 | 10,101 | 9,988 | 10,221 | 10,095 | 10,451 | 10,294 |
| Jumlah | | 122,036 | 130,447 | 132,103 | 139,808 | 133,672 | 140,980 | 134,946 | 142,485 | 138,126 | 145,181 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan selalu lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki pada 10 kecamatan tahun 2009-2013. Terjadi pengecualian di Kecamatan Pitu Riase lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan. Pada

tahun 2009 penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 39 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2010 - 2013. Tahun 2010 jumlahnya naik menjadi 73 jiwa lebih banyak daripada penduduk perempuan, tahun 2011 jumlahnya naik 113 jiwa lebih banyak, pada tahun 2012 jumlahnya bertambah 126 jiwa lebih banyak dan pada tahun 2013 jumlah penduduk laki-laki bertambah sebanyak 157 jiwa daripada jumlah penduduk perempuan.

Selain jumlah penduduk, data lain yang terkait dengan aspek demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer persegi, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2009 – 2013

| No. | Kecamatan | Tahun | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 111 | 112 | 113 | 113 | 118 |
| 2 | Tellu Limpoe | 208 | 220 | 222 | 224 | 227 |
| 3 | Wattang Pulu | 172 | 199 | 202 | 205 | 209 |
| 4 | Baranti | 493 | 521 | 526 | 529 | 538 |
| 5 | Panca Rijang | 742 | 796 | 803 | 812 | 829 |
| 6 | Kulo | 142 | 151 | 153 | 154 | 158 |
| 7 | Maritengngae | 619 | 700 | 708 | 716 | 731 |
| 8 | Watang Sidenreng | 130 | 141 | 142 | 144 | 147 |
| 9 | Pitu Riawa | 115 | 119 | 120 | 121 | 125 |
| 10 | Dua Pitue | 376 | 390 | 394 | 398 | 404 |
| 11 | Pitu Riase | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Jumlah Rata-Rata | | 134.07 | 144.38 | 145.84 | 147.33 | 150.44 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Terlihat bahwa sebaran kepadatan jumlah penduduk tiap kilometer persegi di kabupaten Sidenreng Rappang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk tiap kecamatan dengan luas wilayah kecamatan. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sementara wilayah administrasi kecamatannya relatif sempit maka tingkat kepadatan per kilomernya juga besar. Walaupun jumlah penduduk terbesar berada dikecamatan Maritengngae yang juga sebagai ibukota kabupaten, kepadatan per kilomernya masih di bawah kecamatan Panca Rijang, hal ini karena luas wilayah kecamatan Panca Rijang lebih sempit dari pada kecamatan Maritengngae, hal yang sama juga berlaku bagi kecamatan yang memiliki potensi kependudukan dan wilayah kecamatan yang kurang lebih sama.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah 1.883,25 kilometer persegi yang didiami oleh 252.483 orang, pada tahun 2009 rata-rata kepadatan per kilomernya adalah 134,07, tahun 2010 naik menjadi 144.38, tahun 2011 jumlah rata-rata naik menjadi 145,84, tahun 2012 sebesar

147.33 dan pada tahun 2013 sebesar 150.44 rata-rata kepadatan penduduk perkilometranya. Kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Panca Rijang yang menunjukkan angka 737 sampai 812 jiwa sedangkan paling rendah adalah kecamatan Pitu Riase dimana pada setiap satu kilometer persegi hanya didiami 22 sampai 25 jiwa penduduk.

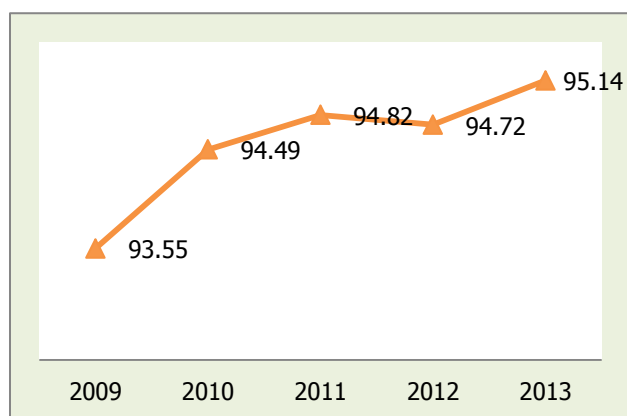
Faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah *sex ratio* atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditampilkan pada data berikut ini :

Tabel 2. 10 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013

| NO. | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 90.57 | 93.18 | 93.17 | 92.99 | 92.96 |
| 2 | Tellu Limpoe | 88.51 | 89.92 | 90.21 | 90.22 | 91.17 |
| 3 | Wattang Pulu | 96.38 | 97.15 | 97.20 | 97.08 | 97.28 |
| 4 | Baranti | 91.39 | 93.03 | 93.26 | 92.51 | 93.20 |
| 5 | Panca Rijang | 92.60 | 92.73 | 92.90 | 92.81 | 93.06 |
| 6 | Kulo | 94.28 | 94.46 | 94.93 | 94.69 | 94.94 |
| 7 | Maritengngae | 93.14 | 93.50 | 93.96 | 94.12 | 94.37 |
| 8 | Watang Sidenreng | 93.64 | 95.88 | 96.29 | 96.18 | 96.44 |
| 9 | Pitu Riawa | 95.51 | 96.65 | 96.70 | 96.63 | 96.30 |
| 10 | Dua Pitue | 92.91 | 94.07 | 95.02 | 95.08 | 96.66 |
| 11 | Pitu Riase | 102.10 | 100.74 | 101.13 | 101.25 | 101.53 |
| Jumlah | | 93.55 | 94.49 | 94.82 | 94.72 | 95.14 |

Sumber Data : Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Secara regional sex ratio penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan angka 93,55 pada tahun 2009, 94,49 pada tahun 2010, 94,98 pada tahun 2011, 94,87 pada tahun 2012 dan



Gambar 2 5 Perkembangan Sex Ratio Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

95,14 pada tahun 2013. Angka-angka tersebut mengandung pengertian setelah pembulatan pada angka dibelakang koma adalah bahwa pada tahun 2009 dan 2010 untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 94 orang penduduk laki-laki, tahun 2010 pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki demikian seterusnya.

Data tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan bahwa sex ratio pada 10 kecamatan memperlihatkan angka 88 sampai 97 atau angka dibawah 100, pengecualian terjadi pada kecamatan Pitu Riase yang menunjukkan angka di atas 100. Di Kecamatan Pitu Riase sex ratio menunjukkan angka sebaliknya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 sampai 102 orang penduduk laki-laki, hal ini sesuai dengan data pada tabel sebelumnya yaitu penduduk berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan

bahwa hanya Kecamatan Pitu Riase satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang penduduk Laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia menurut kecamatan tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tabel 2. 11 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013

| NO. | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 4,317 | 4,303 | 4,427 | 4,427 | 4,455 |
| 2 | Tellu Limpoe | 5,440 | 5,155 | 5,304 | 5,354 | 5,388 |
| 3 | Wattang Pulu | 6,567 | 7,289 | 7,500 | 7,589 | 7,639 |
| 4 | Baranti | 6,720 | 7,042 | 7,246 | 7,285 | 7,332 |
| 5 | Panca Rijang | 6,389 | 6,450 | 6,637 | 6,705 | 6,748 |
| 6 | Kulo | 2,695 | 2,761 | 2,841 | 2,872 | 2,890 |
| 7 | Maritengngae | 10,311 | 10,678 | 10,987 | 11,118 | 11,118 |
| 8 | Watang Sidenreng | 3,979 | 4,077 | 4,195 | 4,242 | 4,269 |
| 9 | Pitu Riawa | 6,124 | 5,767 | 5,934 | 5,995 | 6,033 |
| 10 | Dua Pitue | 6,663 | 6,257 | 6,438 | 6,512 | 6,553 |
| 11 | Pitu Riase | 4,657 | 4,734 | 4,871 | 4,926 | 4,957 |
| Jumlah Rata-Rata | | 63,862 | 64,513 | 66,380 | 67,025 | 67,382 |

Sumber : Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Tabel 2. 12 Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013

| NO. | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|------------------|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 4.0 | 4.01 | 3.92 | 3.94 | 4,07 |
| 2 | Tellu Limpoe | 4.0 | 4.41 | 4.31 | 4.31 | 4,35 |
| 3 | Wattang Pulu | 4.0 | 4.13 | 4.08 | 4.08 | 4,14 |
| 4 | Baranti | 4.0 | 3.99 | 3.92 | 3.92 | 3,95 |
| 5 | Panca Rijang | 4.0 | 4.20 | 4.12 | 4.12 | 4,18 |
| 6 | Kulo | 4.0 | 4.11 | 4.03 | 4.03 | 4,09 |
| 7 | Maritengngae | 4.0 | 4.32 | 4.25 | 4.25 | 4,34 |
| 8 | Watang Sidenreng | 4.0 | 4.18 | 4.10 | 4.10 | 4,16 |
| 9 | Pitu Riawa | 4.0 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4,34 |
| 10 | Dua Pitue | 4.0 | 4.36 | 4.28 | 4.28 | 4,31 |
| 11 | Pitu Riase | 4.0 | 4.20 | 4.12 | 4.12 | 4,18 |
| Jumlah Rata-Rata | | 4.0 | 4.21 | 4.14 | 4.14 | 4,20 |

Sumber : Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2010-2014

Pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang sebelumnya 63.403 menjadi 63.862 pada tahun 2009 atau bertambah 459 rumah tangga tetapi bila dirata-ratakan tetap pada 4,0 orang artinya pada setiap satu rumah tangga terdapat 4 orang penghuni rumah tangga sama seperti tahun 2010. Tahun 2010 bertambah 651 menjadi 64.513 rumah tangga atau bila dirata-ratakan menjadi 4,21 orang tiap rumah tangganya. Pada tahun 2011 menunjukkan angka 66.380 atau bertambah 1.867 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,14 sama seperti tahun 2012. Data tahun 2009 sampai 2013 terlihat mengalami penambahan jumlah rumah tangga setiap tahunnya.

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki anggota rumah tangga dibawah rata-rata kabupaten. Dari 11 kecamatan yang ada, 7 (tujuh) kecamatan memiliki rata-rata anggota rumah di bawah rata-rata kabupaten sedangkan 4 (empat) kecamatan lainnya yaitu kecamatan Tellu Limpoe, Maritengngae, Pitu Riawa dan Dua Pitue rata-rata anggota rumah tangganya diatas rata-rata kabupaten. Kecamatan Baranti adalah kecamatan dengan rata-rata anggota rumah tangga terendah dibanding dengan 10 kecamatan lainnya. Sedangkan Kecamatan Dua Pitue adalah kecamatan tertinggi rata-rata anggota rumah tangganya dibanding dengan 10 kecamatan lainnya.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**. Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Tabel 2. 13 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 – 2013
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang

| No | Sektor | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----|---------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian | 721,175,63 | 49,42 | 732,139,84 | 48,03 | 846,473,56 | 49,66 | 908,599,86 | 49,19 | 959,020,76 | 48,32 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 7,015,11 | 0,48 | 7,574,59 | 0,50 | 8,924,65 | 0,52 | 10,723,48 | 0,58 | 12,354,11 | 0,62 |
| 3 | Industri Pengelohan | 102,080,70 | 6,99 | 106,651,15 | 7,00 | 120,950,02 | 7,10 | 136,415,22 | 7,57 | 150,284,35 | 7,57 |
| 4 | Listrik, Gas, & Air Bersih | 15,206,70 | 1,04 | 17,053,42 | 1,12 | 19,214,72 | 1,13 | 21,692,89 | 1,17 | 24,332,72 | 1,23 |
| 5 | Konstruksi | 89,014,98 | 6,10 | 96,092,83 | 6,30 | 105,332,64 | 6,18 | 121,132,54 | 6,56 | 139,395,63 | 7,02 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 184,364,46 | 12,63 | 199,844,88 | 13,11 | 217,616,13 | 12,77 | 237,820,14 | 12,87 | 256,928,88 | 12,95 |
| 7 | Angkutan & Komunikasi | 42,127,81 | 2,89 | 45,362,91 | 2,98 | 49,198,53 | 2,89 | 54,148,00 | 2,93 | 59,558,64 | 3,00 |
| 8 | Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan | 80,778,85 | 5,54 | 93,619,72 | 6,14 | 102,496,13 | 6,01 | 116,114,83 | 6,29 | 134,415,62 | 6,77 |
| 9 | Jasa Jasa | 217,636,95 | 14,91 | 226,020,76 | 14,83 | 234,325,79 | 13,75 | 240,560,21 | 13,02 | 248,414,70 | 12,52 |

| No | Sektor | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----|--------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| | PDRB | 1,459,401,19 | 100 | 1,524,360,11 | 100 | 1,704,532,17 | 100 | 1,847,207,17 | 100 | 1,984,705,41 | 100 |

Sumber : PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 14 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang

| No | Sektor | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian | 1,276,699,73 | 43,36 | 1,440,822,17 | 42,87 | 1,915,017,37 | 45,42 | 2,243,865,26 | 45,49 | 2,521,630,50 | 44,69 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 12,350,65 | 0,42 | 14,080,38 | 0,42 | 19,126,76 | 0,45 | 23,610,54 | 0,48 | 28,787,77 | 0,51 |
| 3 | Industri Pengolahan | 176,076,99 | 5,98 | 192,484,20 | 5,72 | 233,421,35 | 5,54 | 275,999,51 | 5,60 | 318,762,64 | 5,65 |
| 4 | Listrik, Gas, & Air Bersih | 34,941,94 | 1,19 | 41,367,25 | 1,23 | 49,129,01 | 1,17 | 59,182,37 | 1,20 | 70,578,03 | 1,25 |
| 5 | Konstruksi | 157,712,93 | 5,36 | 185,564,67 | 5,51 | 223,587,63 | 5,30 | 272,776,91 | 5,53 | 334,234,98 | 5,92 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 337,519,65 | 11,46 | 385,424,91 | 11,45 | 457,853,77 | 10,86 | 526,309,95 | 10,67 | 598,908,66 | 10,61 |
| 7 | Angkutan & Komunikasi | 87,208,79 | 2,96 | 96,354,73 | 2,86 | 112,713,44 | 2,67 | 130,678,98 | 2,65 | 151,455,31 | 2,68 |
| 8 | Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan | 156,929,34 | 5,33 | 190,789,30 | 5,67 | 218,679,53 | 5,19 | 260,930,95 | 5,29 | 317,743,87 | 5,63 |
| 9 | Jasa Jasa | 704,880,52 | 23,94 | 819,814,14 | 24,35 | 986,392,18 | 23,47 | 1,139,154,18 | 23,09 | 1,300,251,02 | 23,04 |
| | PDRB | 2,944,140,54 | 100 | 3,366,701,75 | 100 | 4,215,957,04 | 100 | 4,932,508,65 | 100 | 5,642,352,81 | 100 |

Sumber : PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 15 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Sidenreng Rappang

| No | Sektor | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Pertanian | 43,36 | 49,42 | 42,87 | 48,03 | 45,42 | 49,66 | 45,49 | 49,19 | 44,69 | 48,32 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 0,42 | 0,48 | 0,42 | 0,50 | 0,45 | 0,52 | 0,48 | 0,58 | 0,51 | 0,62 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,98 | 6,99 | 5,72 | 7,00 | 5,54 | 7,10 | 5,60 | 7,57 | 5,65 | 7,57 |
| 4 | Listrik, Gas, & Air Bersih | 1,19 | 1,04 | 1,23 | 1,12 | 1,17 | 1,13 | 1,20 | 1,17 | 1,25 | 1,23 |
| 5 | Konstruksi | 5,36 | 6,10 | 5,51 | 6,30 | 5,30 | 6,18 | 5,53 | 6,56 | 5,92 | 7,02 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 11,46 | 12,63 | 11,45 | 13,11 | 10,86 | 12,77 | 10,67 | 12,87 | 10,61 | 12,95 |
| 7 | Angkutan & Komunikasi | 2,96 | 2,89 | 2,86 | 2,98 | 2,67 | 2,89 | 2,65 | 2,93 | 2,68 | 3,00 |
| 8 | Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan | 5,33 | 5,54 | 5,67 | 6,14 | 5,19 | 6,01 | 5,29 | 6,29 | 5,63 | 6,77 |
| 9 | Jasa Jasa | 23,94 | 14,91 | 24,35 | 14,83 | 23,47 | 13,75 | 23,09 | 13,02 | 23,04 | 12,52 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

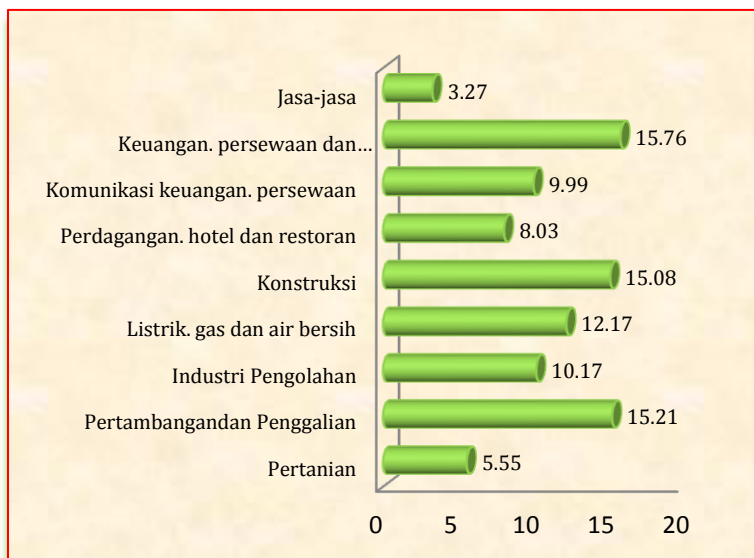
Sumber : PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Sektor Tahun 2009 - 2013

| No. | Sektor | TAHUN | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Pertanian | 4,19 | 1,52 | 15,62 | 7,34 | 5,55 |
| 2 | Pertambangan & Penggalian | 7,20 | 7,98 | 17,82 | 20,16 | 15,21 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,80 | 4,48 | 13,41 | 12,79 | 10,17 |
| 4 | Listrik, Gas, & Air Bersih | 10,55 | 12,14 | 12,67 | 12,90 | 12,17 |
| 5 | Konstruksi | 6,54 | 7,95 | 9,62 | 15,00 | 15,08 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, & Restoran | 10,67 | 8,40 | 8,89 | 9,28 | 8,03 |
| 7 | Angkutan & Komunikasi | 7,52 | 7,68 | 8,46 | 10,06 | 9,99 |
| 8 | Keuangan, Sewa & Js. Perusahaan | 7,30 | 5,90 | 9,48 | 13,29 | 15,76 |
| 9 | Jasa Jasa | 8,70 | 3,85 | 3,70 | 2,66 | 3,27 |
| | PDRB | 6,66 | 4,45 | 11,82 | 8,37 | 7,44 |

Sumber : PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Memasuki tahun ke dua belas pelaksanaan otonomi daerah (2013) Sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 5,55 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 7,34 persen.



Gambar 2 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Sektor Tahun 2013

Disisi lain, sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 15,21 persen, pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada sektor konstruksi tahun 2012 yang mencapai 20,16 persen sedangkan tahun 2011 juga tumbuh sebesar 17,82 persen, disusul sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari 13,29 persen menjadi 15,76 persen pada tahun 2012 ke 2013 dan sektor bangunan dari 15,00 persen menjadi 15,08 persen, selain itu sektor listrik gas dan air yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2012 sekitar 12,90 persen menjadi 12,17 juga mengalami peningkatan kontribusi dari 8,89 persen menjadi 9,28 persen pada tahun 2012.

Untuk melihat beberapa nilai PDRB dibandingkan dengan enam Kabupaten di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang menempati urutan ketiga dengan PDRB sebesar Rp. 5.642.352,81 yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan sebesar 3,05 persen. Kemudian urutan pertama dan kedua berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang dengan kontribusi sebesar 4,84 persen dan 4,47 persen. Demikian halnya untuk angka PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1.984.705,41, Kabupaten Sidenreng Rappang juga berada diperingkat ketiga dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan sebesar 3,24 persen. Kemudian urutan pertama dan kedua berturut-turut ditempati oleh Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang dengan kontribusi sebesar 4,96 persen dan 4,88 persen, selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

| No. | Kabupaten/Kota | Harga Berlaku | % Terhadap Sul Sel | Harga Konstan | % Terhadap Sul Sel |
|-----|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Pare-Pare | 2.771.804,96 | 1,50 | 967.507,82 | 1,51 |
| 2 | Enrekang | 3.316.599,41 | 1,79 | 921.310,40 | 1,43 |
| 3 | Wajo | 8.941.540,52 | 4,84 | 3.189.598,87 | 4,96 |
| 4 | Pinrang | 8.261.557,75 | 4,47 | 3.137.429,31 | 4,88 |
| 5 | Sidenreng Rappang | 5.642.352,81 | 3,05 | 1.984.705,41 | 3,24 |
| 6 | Soppeng | 4.254.982,77 | 2,3 | 1.507.686,50 | 2,35 |
| | Provinsi Sulawesi Selatan | 159.427.096,97 | 3,00 | 59.708.627,06 | 3,04 |

Sumber: PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah. Berikut ini Tabel Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2008-2012. Khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare.

Tabel 2. 18 Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Tahun 2008-2012

| Tahun | Nasional (%) | Provinsi Sulawesi Selatan (%) | Kota Parepare (%) |
|-------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 2008 | 11,06 | 12,40 | 11,06 |
| 2009 | 2,78 | 3,39 | 2,78 |
| 2010 | 6,96 | 6,56 | 5,76 |
| 2011 | 3,79 | 2,88 | 1,60 |
| 2012 | 4,30 | 4,41 | 3,49 |

Sumber: RPJMD 2014-2018 dan BPS Parepare 2013.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008. Tingginya inflasi disebabkan karena gejolak ekonomi akibat krisis global. Selanjutnya pada Tahun 2009 – 2012 inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare cenderung memperlihatkan perkembangan inflasi fluktuatif yang berada pada kisaran dua sampai dengan enam persen. Inflasi ini masih positif dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya daya beli masyarakat.

C. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya tingkat produktivitas dari berbagai leading sektor yang menopang tingkat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai fasilitas produksi di berbagai bidang terutama pada sektor pertanian, industri dan peternakan. Setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup besar, dalam lima tahun terakhir misalnya dari Rp. 12.387.006,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 22.813.436,- pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 1,84 kali lipat.

Tabel 2. 19 PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2009-2013

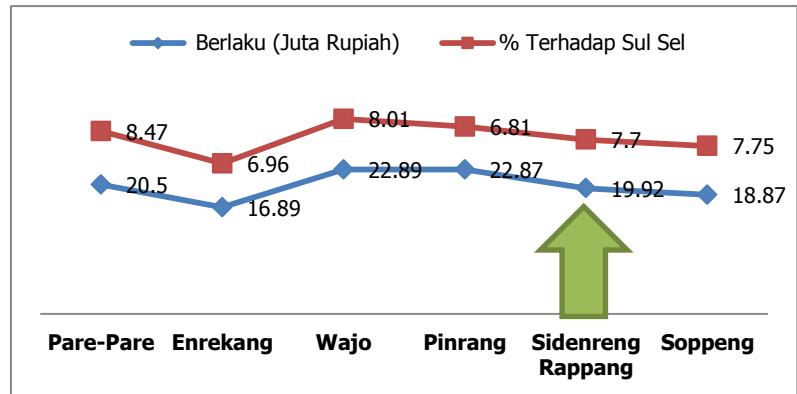
| Tahun | Nilai (Rp) | Perkembangan (%) |
|-----------|------------|------------------|
| 2010 | 12.387.006 | 6,23 |
| 2011 | 15.350.303 | 23,92 |
| 2012 | 17.777.949 | 15,81 |
| 2013 | 19.916.530 | 12,03 |
| 2014 | 22.813.436 | 14,55 |
| Rata-rata | Xxx | 14,51 |

Sumber: PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Pada data tersebut PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2010 mengalami perlambatan sekitar 6,23 persen dengan PDRB perkapita sebesar 12.387.006 rupiah, pada tahun 2011 tumbuh sebesar 23,92 persen, sedangkan tahun 2012 penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 277.451 jiwa dengan PDRB perkapita 17.777.949 rupiah, kemudian pada tahun 2013 PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 19.916.530 rupiah dengan perkembangan sekitar 12,03 persen dan pada tahun 2014 sekitar 22.813.436 rupiah dengan perkembangan 14,55 persen. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Selanjutnya untuk melihat perbandingan PDRB perkapita pada enam wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Nilai PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada grafik di samping terlihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten/Kota terpilih, dimana PDRB perkapita Kabupaten Wajo berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan PDRB Kabupaten/Kota Lainnya dengan nilai PDRB Rp. 22,89 juta disusul



Gambar 2 7 Perbandingan PDRB Perkapita untuk Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2013

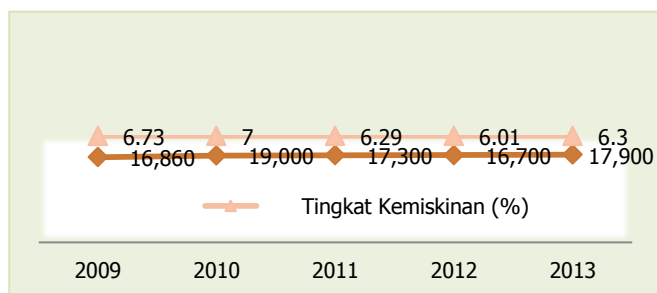
Kabupaten Pinrang, Kota Pare-pare. Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada posisi keempat dengan nilai PDRB sebesar Rp. 19,92 juta. Urutan terakhir (Keenam) ditempati oleh Kabupaten Enrekang dimana nilai PDRB yang diperoleh pada tahun 2013 sebesar Rp. 16,89 juta. tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk daerah tersebut.

D. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dengan budaya yang dimiliki menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang dimiliki, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri. Di dalamnya terkait dengan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, aspek psikologi dan aspek politik.

Trend Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Antar Waktu menunjukkan trend kecenderungan menurun dari tahun 2009

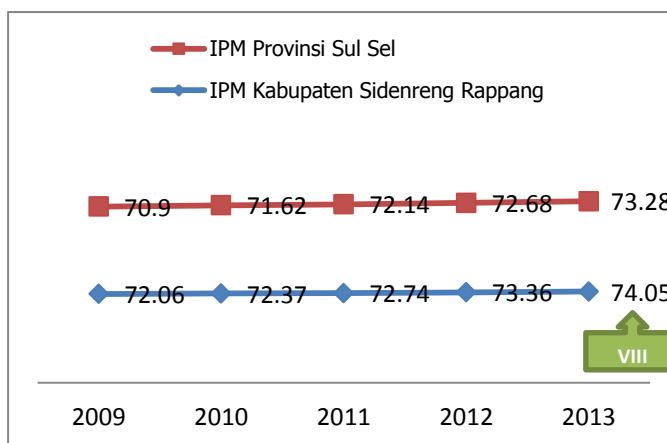


Gambar 2 8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009- 2013

sebesar 6,73 persen hingga pada tahun 2012 sebesar 6,01 persen namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,30 persen dengan perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dari tahun 2009-2013 seperti pada grafik di samping. *Sumber : TNP2K – LP2KD, Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang , Tahun 2014 tahun 2015*

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu **usia hidup, pengetahuan dan hidup layak**. Perkembangan IPM terus menunjukkan peningkatan. Pada grafik disamping IPM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 berada pada peringkat ke delapan (8) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian IPM sebesar 74,05 point. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 73,36 point. Hal ini tidak terlepas dari peranan komponen penyusun IPM, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.



Gambar 2 9 Sandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 -2013

Berikut ini digambarkan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 – 2013.

Tabel 2. 20 Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013

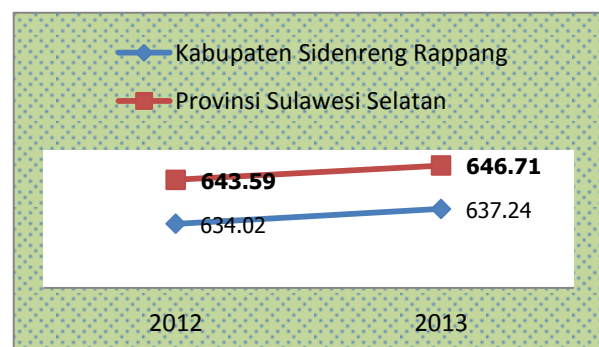
| Komponen IPM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angka Harapan Hidup (Tahun) | 72.07 | 72,50 | 72,81 | 73,12 | 73,38 |
| Angka Melek Huruf (%) | 89,57 | 89,63 | 89,77 | 89,90 | 90,25 |
| Rata-rata Lama sekolah (Tahun) | 7,24 | 7,25 | 7,27 | 7,48 | 7,77 |
| Pengeluaran per Kapita (Rp. 000) | 627,99 | 628,61 | 630,64 | 634,02 | 637,24 |
| IPM Kabupaten Sidenreng Rappang | 72,06 | 72,37 | 72,74 | 73,36 | 74,05 |
| Peringkat | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| IPM Provinsi Sul Sel | 70,9 | 71,62 | 72,14 | 72,68 | 73,28 |

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

Beberapa Komponen Penyusun IPM, yaitu:

1. **Angka Usia Harapan Hidup** merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia Harapan Hidup menjadi dasar penghitungan indeks kesehatan. Angka Harapan Hidup pada tahun 2013 mencapai 73,38 Tahun. Peningkatan Usia Harapan Hidup merupakan kumulatif dari berbagai kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif maupun kuratif diberbagai tingkatan pelayanan kesehatan.
2. **Angka Melek Huruf** Salah satu Indikator Pembangunan Pendidikan yaitu Angka Melek Huruf adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca/tulis dan berhitung. Dilihat dari perkembangan antar waktu angka melek huruf di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 89,57 % dan pada tahun 2012 sebesar 90,25 %. Posisi relatif Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 86,69 % pencapaian Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2009 sebesar 89,57 % dan tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai 90,25 %.
3. **Angka Rata-Rata Lama Sekolah** Indikator pembangunan pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2009 mencapai 5,8 tahun dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 7,77 tahun. Pencapaian rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan dalam upaya mengangkat level IPM di Sulawesi Selatan. Peningkatan ini relatif sangat lambat mengingat komitmen pemerintah yang cukup besar terhadap pendidikan melalui pendidikan gratis TK sampai SMA. Beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi rata-rata lama sekolah yaitu ketersediaan fasilitas sekolah pada daerah terpencil, *mindset* masyarakat untuk melanjutkan pendidikan masih relatif rendah, hal ini terbukti dengan masih adanya masyarakat usia sekolah memilih mencari pekerjaan dibanding melanjutkan pendidikan serta pernikahan dini pada siswi khususnya pada jenjang pendidikan SMP/MTSi dan SMA/MA.

4. **Paritas Daya Beli Masyarakat (Pengeluaran Perkapita)** menjadi salah satu komponen IPM yang menyangkut pada aspek daya beli masyarakat. Capaian pengeluaran perkapita masyarakat pada grafik menunjukkan Kabupaten Sidenreng



Rappang tahun 2013 sebesar Rp. 637.240,- masih berada di bawah rata-rata pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar Rp. 646.710,- pada Tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan paritas daya beli masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2009 sampai dengan

Gambar 2 10 Sandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 - 2013

tahun 2013 tetapi tidak cukup besar pengaruhnya jika ditinjau dari nilai nominalnya, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya daya beli masyarakat yang membutuhkan dukungan yang cukup besar dengan menggerakkan sektor basis perekonomian serta mengembangkan usah kecil mikro dan menengah agar masyarakat lebih berdaya dan produktif.

F. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap indikator pendidikan dalam rangka menghitung tingkat partisipasi pendidikan, maka tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi terhadap semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 terdapat pada tingkat SD/MI sebesar 104,61 persen dan APK terendah di tingkat SMP/MTs sebesar 70,57 persen. Tingkat Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu lima tahun telah melampaui target, namun pada tahun 2011 berada di bawah 100 persen, pada jenjang pendidikan SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2013 mencapai 94,25 persen dan terjadi penurunan 70,57 persen pada tahun 2014, sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA mengalami perlambatan di tahun 2013 namun pada tahun 2014 sedikit meningkat sekitar 89,70 persen dibanding tahun sebelumnya. Berikut ini trend perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2010 – 2014.

Tabel 2. 21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 - 2014

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | SD/MI | 107,13 | 96,41 | 101,46 | 105,92 | 104,61 |
| 2 | SMP/MTs | 72,00 | 86,06 | 90,85 | 94,25 | 70,57 |
| 3 | SMA/MA | 56,11 | 64,83 | 82,92 | 73,27 | 89,70 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

G. Angka Partisipasi Murni

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga pada tahun 2014 masih di bawah 100%. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari semua jenjang pendidikan.

Tabel 2. 22 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 - 2014

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | SD/MI | 93,45 | 87,82 | 89,68 | 93,23 | 89,70 |
| 2 | SMP/MTs | 62,12 | 63,11 | 70,71 | 67,66 | 77,29 |
| 3 | SMA/M | 37,41 | 47,06 | 53,79 | 50,66 | 43,37 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia di bawah 1 (satu) tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Pada tahun 2010 terdapat 55 kematian bayi dari 5.259 kelahiran hidup, Pada Tahun 2014 menjadi 4 kematian bayi dari 4.983 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin agar meminimalisir terjadinya kematian bayi.

Tabel 2. 23 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kematian Bayi (Jiwa) | 55 | 44 | 36 | 33 | 4 |
| 2 | Kelahiran Hidup Bayi (Jiwa) | 5.259 | 5.771 | 5.305 | 5.353 | 4.983 |
| 3 | AKB | 10,46 | 7,62 | 6,79 | 6,16 | 0,80 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

Tabel 2. 24 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Puskesmas | Tahun | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Baranti | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Maritengngae | 3 | 12 | 7 | 9 | 0 |
| 3 | Watang Pulu | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Panca Lautang | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Kulo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Tellu Limpoe | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Dua Pitue | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pitu Riase | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 9 | Pitu Riawa | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Watang Sidenreng | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Panca Rijang | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | Jumlah | 55 | 44 | 36 | 33 | 4 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

B. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009 adalah 0,60 persen dari 4.702 keseluruhan jumlah balita, dan pada Tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,07% dari 14.216 keseluruhan jumlah balita.

Tabel 2. 25 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jiwa | 20 | 26 | 21 | 10 | 15 |
| 2 | Jumlah Balita | Jiwa | 5.076 | 5.111 | 5.893 | 14.216 | 27.208 |
| | Persentase Balita Gizi Buruk | Persen | 0,39 | 0,51 | 0,36 | 0,07 | 0,06 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2014

C. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Selama tiga tahun terakhir tingkat pengangguran terus meningkat dari 4,78 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 6,99 persen pada tahun 2012 dan puncaknya mencapai 7,62 persen tahun 2013. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014 sebanyak 112.252 orang atau sekitar 52,25 persen dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.295 orang (sekitar 93,80 persen) berstatus bekerja. Sementara sisanya masih terdapat 7.930 orang (sekitar 7,62 persen) berstatus tidak bekerja (pengangguran). Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan Angkatan Kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2010 sebesar 91,24 persen dan pada Tahun 2014 naik sebesar 93,80 persen. Berikut ini perkembangan rasio penduduk yang bekerja lima tahun terakhir seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. 26 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Penduduk yang bekerja | Jiwa | 101.589 | 118.720 | 104.710 | 96.076 | 105.295 |
| 2 | Angkatan kerja | Jiwa | 111.338 | 124.680 | 112.583 | 104.006 | 112.252 |
| 3 | Rasio Penduduk yang bekerja | % | 91,24 | 95,22 | 93,01 | 92,38 | 93,80 |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang: 2014

Tabel 2. 27 Rasio Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| Golongan Umur | Angkatan Kerja | | Jumlah |
|---------------|----------------|--------------------|--------|
| | Bekerja | Penganggur terbuka | |
| 15-19 | 73.80 | 26.20 | 100 |
| 20-24 | 81.19 | 18.81 | 100 |
| 25-29 | 93.66 | 6.34 | 100 |
| 30-34 | 95.24 | 4.76 | 100 |

| Golongan Umur | Angkatan Kerja | | Jumlah |
|---------------|----------------|-------------------|--------|
| | Bekerja | Pengangur terbuka | |
| 35-39 | 94.90 | 5.10 | 100 |
| 40-44 | 97.64 | 2.36 | 100 |
| 45-49 | 97.04 | 2.96 | 100 |
| 50-54 | 96.33 | 3.67 | 100 |
| 55-59 | 95.19 | 4.81 | 100 |
| 60+ | 100.00 | 0.00 | 100 |
| Total | 93.42 | 6.58 | 100 |

Sumber : Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka, 2014

2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA

A. Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya dan Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata adalah bidang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang sama seperti bidang-bidang lainnya.

Tabel 2. 28 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Grup Kesenian | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | Jumlah Sarana Gedung Kesenian | - | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah Klub Olahraga | 169 | 200 | 200 | 200 | 221 |
| 4 | Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga | 270 | 274 | 279 | 281 | 287 |

Sumber: Disporabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

B. Pemuda Dan Olahraga

Pembinaan pemuda atau generasi muda dilakukan dengan berbagai pola pembinaan dengan pengelompokan bentuk kedalam instrument pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah. Instrumen kepemudaan ini dibedakan atas pengelompokan menurut organisasi, bentuk kegiatan dan jenis usaha produktif yang terdiri atas Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pemuda Pelopor (PP), Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Purna Paskibraka dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 29 Instrumen Kepemudaan Tahun 2014

| Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) | Pemuda Pelopor (PP) | Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) | Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) | Purna Paskibraka | Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) |
|--|---------------------|------------------------------------|--|------------------|--|
| 28 orang | 15 orang | 7 orang | 5 orang | 30 orang | 8 kelompok |

Sumber: *Disporabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014*

Organisasi kepemudaan yang ada dan terdaftar sebanyak 28 OKP yang telah berkontribusi melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan, Pemuda Pelopor tahun 2014 sebanyak 15 orang dengan latar belakang pengusaha, anggota DPRD, PNS dan wiraswasta dengan berbagai bidang keahlian. Bakti pemuda antar propinsi sebanyak 7 orang yang telah melakukan kegiatan kepemudaan diberbagai propinsi, Sarjana penggerak pembangunan pedesaan sebanyak 5 orang yang menjadi pioner program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kewirausahaan, Purna paskibraka yang menjadi wadah berkumpul dan pembinaan para alumni pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional. Dan kelompok usaha pemuda produktif sebanyak 8 kelompok dari berbagai jenis usaha yang mendapat bantuan dana usaha dari APBN.

Selain pemuda, pembinaan olahraga juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembinaan seluruh cabang olahraga untuk berbagai tingkatan dan kalangan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui SKPD terkait bersama Komite Olah Raga Nasional (KONI). Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat menuju masyarakat yang sehat jasmani dan rohani juga menjadi tujuan yang juga diinginkan oleh pemerintah daerah. Selain itu dengan pembinaan olah raga yang baik akan melahirkan atlet-atlet olahraga berprestasi yang akan mengharumkan nama daerah diberbagai tingkatan. Dimasa sekarang ini beberapa cabang olah raga juga sudah menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang lumayan besar, tetapi hal ini harus diimbangi dengan prestasi yang luar biasa.

C. Seni Budaya

Untuk bidang seni dan budaya daerah ini memiliki potensi organisasi kesenian yang terdiri atas tim kesenian kabupaten, beberapa sanggar seni dan group kesenian yang sering mengangkat dan mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional, misalnya pertunjukan seni budaya bugis sidenreng seperti : simponi kecapi, tari padduppa, tari pattennung, lagu ongkona sidenreng dan lagu mappadendang.

Tabel 2. 30 Organisasi Kesenian dan Sarana Pementasan Seni dan Budaya Tahun 2014

| Tim Kesenian Kabupaten | Sanggar Seni | Group Kesenian | Gelanggang Seni Budaya | Sarana Tempat Pementasan |
|------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 15 | 15 | 1 | 10 |

Sumber: *Disporabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang;2014*

Dari tabel diatas terlihat untuk pementasan seni dan budaya pemerintah kabupaten telah memiliki tim kesenian yang dipersiapkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya didalam di berbagai kegiatan. Selain tim kesenian kabupaten juga terdapat 15 sanggar seni dan 15 group kesenian yang tersebar di beberapa kecamatan. Organisasi kesenian di atas berkontribusi dalam melestarikan seni dan budaya tradisional Bugis. Organisaasi kesenian ini sering ditampilkan pada acara-acara penting di tingkat kabupaten dan propinsi. Untuk aksi pementasan seni dan budaya telah tersedia sarana tempat pementasan baik terbuka maupun tertutup yang tersebar dibeberapa kecamatan yang berjumlah 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) buah gelanggang seni budaya yang berlokasi di ibukota kabupaten. Untuk menjaga eksistensi organisasi kesenian dan sarana pementasan seni dan budaya masih perlu upaya yang lebih serius dari pemerintahan daerah melalui SKPD terkait untuk melestarikan, membimbing dan memelihara seni budaya tradisional dan sarana pementasan yang ada.

Pemuda adalah pewaris dan pelanjut pelestari seni budaya tradisional. Dengan mengenalkan hal ini kepada mereka berarti merupakan upaya pemerintah daerah untuk membina generasi muda dengan mengarahkan mereka untuk menyalurkan energinya dengan melakukan hal-hal positif sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke kriminalitas.

Untuk bidang seni budaya, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki situs-situs cagar budaya, baik yang berupa peninggalan sejarah masuknya agama Islam berupa Masjid dan makam, maupun situs-situs kuno peradaban sebelum agama Islam masuk didaerah kita ini, seperti makam-makam kuno. Berikut ini akan disajikan daftar situs cagar budaya yang keberadaan masih dapat kita saksikan sampai hari ini :

Tabel 2. 31 Situs Cagar Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| Masjid Kuno | Makam | Rumah Adat (Saoraja) | Sumur Kuno | Lainnya |
|-------------|-------|------------------------|------------|---------|
| 2 | 26 | 5 | 2 | 3 |

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

Dari tabel di atas untuk situs masjid kuno sebanyak 2 buah yaitu Masjid kuno Jerra'e Allakuang dan Langgara Tungga Tanatoro. Masjid Jerrae ini merupakan satu diantara tiga masjid tertua yang terdapat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya makam-makam kuno sebanyak 26 buah yang terdiri atas makam-makam kuno penyiar Islam dan makam-makam kuno raja-raja. Selain itu juga terdapat 5 rumah adat dan rumah raja-raja (saoraja) yang tersebar dibeberapa kecamatan, 2 sumur kuno termasuk sumur tua atau Bungnge Citta yang berlokasi di desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, tidak jauh dari Masjid Kuno Jerra'e. Situs-situs yang disebutkan diatas juga selama ini menjadi destinasi wisata budaya yang banyak diminati oleh wisatawan lokal sebagai pesiarah.

Untuk menjaga dari kerusakan yang sudah banyak terjadi diperlukan upaya lebih maksimal dari pemerintah daerah melalui SKPD terkait, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk

memelihara dan menjaga situs cagar budaya diatas, karena selama ini upaya pelestarian dari pemerintah masih minim.

Tabel 2. 32 Benda, Situs Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Benda, Situs, dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber : *Disporabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014*

D. Pariwisata

Selain seni budaya dan situs cagar budaya, kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun buatan yang apabila dikelompokkan menjadi jenis dapat dibagi atas obyek wisata alam, sejarah, budaya, agro dan obyek wisata sport yang kami tampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 33 Jenis Obyek Wisata Tahun 2014

| Wisata Alam | Wisata Sejarah | Wisata Budaya | Wisata Agro | Wisata Sport |
|-------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 7 | 27 | 5 | 7 | 1 |

Sumber : *Dispota Kabupaten Sidenreng Rappang;2014*

Pada tabel di atas terlihat bahwa obyek wisata sejarah cukup banyak yaitu 27 buah yang sebagian besar merupakan situs cagar budaya yang menjadi potensi utama wisata sejarah yaitu sebanyak 24 buah, selebihnya merupakan monument-monumen perjuangan kemerdekaan. Untuk obyek wisata alam yang menonjol dan banyak dikunjungi adalah taman wisata hutan Maddenra yang berlokasi di Kecamatan Kulo dan Taman Wisata Air Puncak Bila Riase yang dilengkapi fasilitas water boom yang kerap dikunjungi wisatawan lokal khususnya dalam wilayah Ajattappareng atau kabupaten-kabupaten tetangga. Selain itu obyek wisata agro juga mendapat tempat dihati wisatawan misalnya sanggar kerajinan tenun sutra di desa Carawali. Karena lokasinya yang strategis yaitu dijalan poros kearah Tana Toraja, lokasi wisata agro ini kerap disinggahi oleh turis mancanegara yang akan ke Tana Toraja. Disana mereka akan menyaksikan proses pembuatan kain tenun sutera dengan peralatan tenun tradisional sekaligus dapat membelinya langsung sebagai oleh-oleh.

Untuk wisata sport, terdapat obyek wisata terbaru dan disukai oleh kalangan remaja dan pencinta otomotif khususnya motor sport yaitu obyek wisata sport sirkuit RMS Land yang berlokasi di Kota Rappang. Obyek wisata ini sering dan dipercaya melaksanakan berbagai even balap motor sampai ketingkat nasional karena sarana kelengkapan yang dimiliki memenuhi standar Ikatan Motor Indonesia sebagai pendamping penyelenggara kegiatan racing motor sport.

Dari beberapa obyek wisata yang ada, wisatawan mancanegara umumnya mengunjungi obyek wisata sejarah, agro dan budaya, sedangkan wisatawan lokal dan nusantara rata-rata menyukai semua obyek wisata yang dimiliki daerah ini.

Akan tetapi disadari bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara dan melengkapi khususnya terhadap obyek wisata milik pemerintah daerah masih kurang. Pada umumnya obyek-obyek wisata tersebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, seperti obyek wisata Data'e, Masjid kuno Jerra'e, Sumur tua Citta, obyek wisata air panas Masepe dan lain-lain. Sedangkan untuk obyek wisata milik masyarakat atau swasta perlu upaya konsisten melalui pembinaan sebab semua obyek wisata diatas berpotensi berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Perkembangan rasio siswa per sekolah untuk tingkat SD/Mi lima tahun terakhir mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 melambat sebesar 133,67 persen dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 147 persen. Sedangkan Rasio Siswa per Sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 207,80 persen dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 214,58 persen. Pada Rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2010 sebesar 298 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 317 persen dan melambat di tahun 2014 sebesar 289,58 persen.

Perkembangan Rasio Siswa per Kelas untuk tingkat SD/Mi untuk tahun 2010 sebesar 22,04 persen mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 21 persen. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 27,93 persen dan pada tahun 2014 menurun menjadi 25 persen. Pada Rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/MA sebesar 34,12 % dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 29 persen.

Perkembangan rasio siswa per guru menunjukkan tingkat kecukupan guru pada setaiap jenjang pendidikan. Perkembangan Rasio Siswa per Guru untuk tingkat SD/MI untuk tahun 2010 sebesar 12,68 persen mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014 sebesar 13 persen. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 10,01 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2014 sekitar 12 persen. Pada Rasio siswa per Sekolah tingkat SMA/SMK/MA sebesar 9 persen dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 11 persen.

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/ MI mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2010 sebanyak 0,5 persen hingga pada tahun 2014 melambat sebesar 0,4 persen sedangkan pada tingkat

SMP/MTs perkembangan Angka Putus Sekolah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 0,85 persen menjadi 0,75 persen di tahun 2014. Demikian pula pada tingkat SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah pada tahun 2010 sebesar 0,76 persen mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 2,10 persen dan melambat di tahun 2014 sebesar 1,43 persen. Dilihat dari perkembangan pada Angka Putus Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar penduduk usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikan.

Dilihat dari trend peningkatan terkait dengan Angka Kelulusan untuk SD/ MI pada tahun 2010 sebesar 95,20 persen dan pada tahun 2014 menjadi 99,52 persen. Pada tingkat SMP/MTs Angka Kelulusan pada tahun 2010 sebesar 89,72 persen dan pada tahun 2014 mengalami perlambatan sebesar 98,03 persen. Dan pada tingkat SMA/SMK/MA Angka Kelulusan pada tahun 2010 sebesar 89,34 persen mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2014 sebesar 99,17 persen.

Perkembangan Angka Kelulusan pada tahun 2014 mulai dari tingkat SD/MI mencapai 99,52 persen atau meningkat sekitar 3,20 persen dari tahun sebelumnya sebesar 96,32 persen, Angka Kelulusan SMP/MTs mengalami perlambatan sekitar 98,03 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 99,14 persen sedangkan Angka Kelulusan tingkat SMA/SMK/MA mencapai 99,17 persen atau meningkat sekitar 1,18 persen dari tahun sebelumnya sebesar 97,70 persen. Berikut gambaran kinerja urusan pendidikan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 tahun seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 34 Kinerja Urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 – 2014

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|-----------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Pembangunan Daerah | | | | | |
| | Pendidikan | | | | | |
| 1 | Rasio Siswa / Sekolah | | | | | |
| | - Rasio Siswa/Sekolah SD/ MI | 140,61 | 142,60 | 144,6 | 147 | 133,67 |
| | - Rasio Siswa/Sekolah SMP/MTs | 207,58 | 228,21 | 229,48 | 209 | 214,58 |
| | - Rasio Siswa/Sekolah SMA/SMK/MA | 298,00 | 311,00 | 315 | 317 | 289,58 |
| 2 | Rasio Siswa / Kelas | | | | | |
| | - Rasio Siswa / Kelas SD / MI | 22,04 | 22,37 | 22,44 | 22 | 21 |
| | - Rasio Siswa / Kelas SMP / MTs | 27,93 | 26,90 | 27,30 | 25 | 26 |
| 3 | Rasio Siswa / Guru | | | | | |
| | - Rasio Siswa / Guru SD / MI | 12,68 | 13,66 | 13,52 | 12 | 13 |
| | - Rasio Siswa / Guru SMP/MTs | 10,01 | 9,94 | 10,60 | 11 | 12 |
| | - Rasio Siswa / Guru SMA/SMK/MA | 9,00 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 4 | Angka Putus Sekolah (APtS) | | | | | |
| | - Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ³⁾ | 0,5 | 0,3 | 0,30 | 0,4 | 0,4 |
| | - Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ³⁾ | 0,85 | 0,80 | 0,43 | 0,53 | 0,75 |
| | - Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA ³⁾ | 0,76 | 1,20 | 2,10 | 2,10 | 1,43 |
| 5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | | | |
| | -APS SD/MI | 94,15 | 90,52 | 91,25 | 91,25 | 95,97 |
| | -APS SMP/MTs | 67,65 | 66,37 | 65,66 | 65,66 | 79,21 |
| | -APS SMA/MA | 41,08 | 49,75 | 49,91 | 49,91 | 41,97 |
| 6 | Angka Kelulusan | | | | | |

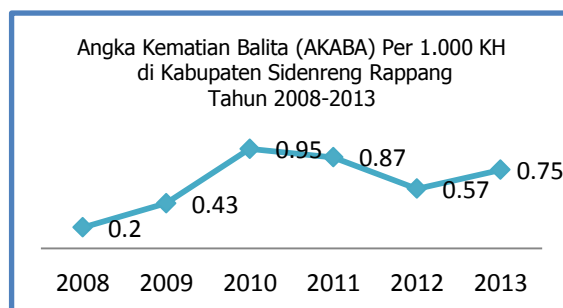
| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | |
|-----|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Pembangunan Daerah | | | | | |
| | - Angka Kelulusan (AL) SD/MI ²⁾ | 95,2 | 99,1 | 99,20 | 96,32 | 99,52 |
| | - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ²⁾ | 89,72 | 99,28 | 99,67 | 99,14 | 98,03 |
| | - Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ²⁾ | 89,34 | 97,47 | 97,99 | 97,70 | 99,17 |

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

B. Kesehatan

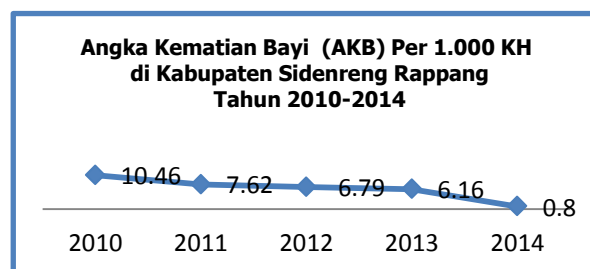
1. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 KH. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2008 sebesar 123,5 per 100.000 KH, sedangkan tahun 2009 naik menjadi sebesar 129,31 per 100.000 KH, tahun 2010 naik menjadi sebesar 133,11 per 100.000 KH dan tahun 2011 turun menjadi sebesar 69,31 per 100.000 KH, tahun 2012 turun menjadi sebesar 37,70 per 100.000 KH dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 93,41 per 100.000 KH (Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013)

2. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal *sebelum* mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2008 sebesar 0,2 per 1.000 KH, sedangkan tahun 2009 naik menjadi sebesar 0,43 per 1.000 KH, tahun 2010 naik menjadi sebesar 0,95 per 1.000 KH dan tahun 2011 sebesar 0,87 per 1.000 KH, tahun 2012 turun menjadi sebesar 0,57 per 1.000 KH dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar 0,75 per 1.000 KH (Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2013)



Gambar 2 11 Angka Kematian Balita

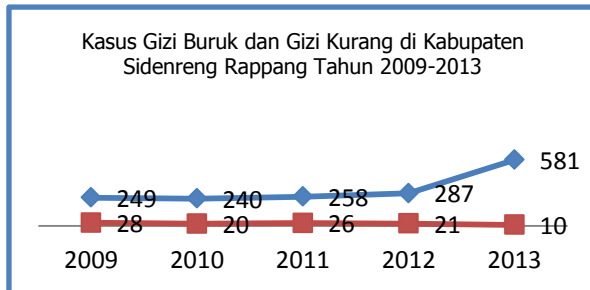
3. Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Gambaran perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2010-2014



Gambar 2 12 Angka Kematian Bayi

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar 10,46 per 1.000 KH hingga pada tahun 2014 menurun secara signifikan sebesar 0,80 persen (*Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2015*)

4. Kasus Gizi Balita Berikut ini digambarkan kasus gizi berdasarkan tinggi badan per berat



Gambar 2 13 Kasus Gizi Buruk dan Kurang

badan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 – 2013, dimana kasus gizi kurang pada tahun 2009 sebesar 249 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 581 kasus.

Sedangkan kasus gizi buruk mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun

2009 sebanyak 28 kasus dan pada tahun 2013 mengalami penurunan mencapai 10 kasus. (*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013*).

Jumlah Posyandu pada tahun 2010 - 2014 sebanyak 309 unit, tidak terjadi penambahan dan ketersediaan posyandu di setiap Desa/Kelurahan minimal 2 unit. Rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2010 sebesar 43,87 dan pada tahun 2013 naik sebesar 45,58 dan sedikit melambat sekitar 45,18 di tahun 2014.

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2010 - 2014 sebanyak 3 rumah sakit. Dimana Rasio Rumah Sakit Per Satuan sebesar 1,19 pada tahun 2010 dan menurun 1,05 pada tahun 2014. Sementara Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk dari tahun 2009 sebanyak 17,15 dan pada tahun 2013 sebesar 17,03.

Perkembangan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani selama periode 2010 sampai 2014 mengalami fluktuasi pada tahun 2010 mencapai 59,15 persen dan tahun 2014 sebesar 73,71 persen. Adapun cakupan komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu /bayi.

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari tahun 2009 hanya mencapai 82,89% hingga pada tahun 2013 mencapai 96,11%.

Perkembangan cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari tahun 2009 sebesar 83,96% dan tahun 2013 sebesar 95,28%. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Keurahan. dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi data lengkap dalam waktu satu tahun.

Perkembangan Cakupan Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi

buruk sudah tertangani seluruhnya. Berikut disajikan data kinerja kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013:

Tabel 2. 35 Kinerja Kesehatan Tahun 2010 – 2014 Kab Sidenreng Rappang

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Pengembangan Daerah Kesehatan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Posyandu (unit) | | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| 2 | Jumlah Balita | | 5.076 | 5.111 | 5.893 | 14.216 | 27.208 |
| 3 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | | 16,43 | 16,54 | 19,07 | 46,01 | 88,05 |
| 4 | Rasio Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes Per 100.000 Penduduk | | 41,98 | 43,87 | 45,99 | 45,58 | 45,18 |
| 5 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | | 1,19 | 1,14 | 1,10 | 1,07 | 1,05 |
| 6 | Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk | | 17,03 | 19,07 | 18,40 | 17,09 | 14,12 |
| 7 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani | | 59,15% | 75,62% | 69,01% | 73,71% | 60,00% |
| 8 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | | 91,25% | 94,56% | 92,70% | 96,11% | 91,44% |
| 9 | Cakupan Desa/Kel. <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | | 88,68% | 87,74% | 99,06% | 95,28% | 100% |
| 10 | Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | | 58,48% | 59,89% | 54,82% | 46,27% | 55,26% |
| 12 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | | 72,69% | 70,73% | 86,44% | 90,17% | 100% |
| 13 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | | 39,01% | 69,68% | 80,48% | 81,91% | 67,67% |
| 14 | Cakupan Kunjungan Bayi | | 97,34% | 95,34% | 96,89% | 96,45% | 98,00% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2015

C. Pekerjaan Umum

Kondisi sarana-prasarana jalan, jembatan dan irigasi mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi masih memerlukan pembenahan-pembenahan. Pada target RPJMD 2009-2013 aksesibilitas semua desa telah terjangkau kendaraan roda empat telah tercapai 100%, namun kondisi jalan masih banyak yang rusak. Sementara infrastruktur jembatan juga masih memerlukan perhatian, karena beberapa pembangunan yang masih terbengkalai sehingga tidak mampu berfungsi sebagai penghubung antar desa, wilayah atau lokasi-lokasi tertentu.

Untuk infrastruktur irigasi sendiri kinerja irigasi khususnya desa masih sangat rendah yaitu 33,33%, dimana SPM nasional pada tahun 2014, diharapkan kinerja irigasi dapat mencapai 70%.

Berikut ini diuraikan hasil kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2009-2013.

Tabel 2. 36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/ Urusan | Satuan | Tahun | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
| 1 | Kondisi Baik | Km | 392,05 | 40 | 392,05 | 38,84 | 429,05 | 41,70 | 439,02 | 42,67 | 473,75 | 46,05 |
| 2 | Kondisi Sedang | Km | 294,04 | 30 | 318,74 | 31,57 | 328,11 | 31,89 | 341,25 | 33,17 | 361,37 | 35,12 |
| 3 | Kondisi Rusak Ringan | Km | 196,00 | 20 | 195,80 | 19,40 | 175,80 | 17,09 | 136,56 | 13,27 | 116,44 | 11,32 |
| 4 | Kondisi Rusak Berat | Km | 98,00 | 10 | 102,90 | 10,19 | 95,90 | 9,32 | 112,03 | 10,89 | 77,30 | 7,51 |
| 5 | Jalan secara keseluruhan kabupaten | Km | 980,09 | | 1009,49 | | 1028,86 | | 1028,86 | | 1028,86 | |

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

Tabel 2. 37 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013

| Jenis Infrastruktur | Hasil kinerja sampai dengan tahun 2013 | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Jalan: | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
| - Hotmix | 320, 436 km | |
| -Beton | 3, 735 km | 0,401 km |
| -Lapen | 21, 022 km | 18,754 km |
| -Kerikil | 708, 543 km | 135,376 km |
| -Paving Block | 23, 898 km | 6, 314 km |
| -Tanah | 20, 353 km | 8,060 km |
| Jumlah jembatan dalam kondisi baik | 270 unit | 61 unit |
| Tingkat kerusakan jaringan irigasi: | | |
| - Saluran Primer | | 50% |
| - Saluran sekunder | | 45% |
| - Bangunan Bendung | | 50% |
| - DI desa | | 67% |

Sumber: Dinas Bina Marga, PSDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

D. Perumahan

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada di sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini data kondisi infrastruktur permukiman selama tahun 2009-2013.

Tabel 2. 38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013

| Jenis Infrastruktur | Hasil Kinerja Sampai Dengan Tahun 2013 | | | | |
|---------------------|--|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gedung Kantor | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 |
| MCK | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Air bersih Non PDAM | 24 | 21 | 21 | 24 | 25 |

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014; Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 39 Jumlah Infrastruktur Permukiman yang Terlayani

| Jenis Infrastruktur | Hasil kinerja sampai dengan tahun 2013 |
|--|--|
| Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi | 77% |
| Prasarana Air Limbah | 2.670 Jiwa |
| Air Bersih PDAM | 6.107.484 Jiwa |
| Air Bersih NON PDAM | 24.695 Jiwa |
| Persampahan | 14% |

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 40 Kinerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam penanganan Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013

| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|----|--------|--------|--------|
|----|--------|--------|--------|

| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Kejadian Kebakaran yang tertangani | % | 100 |
| 2 | Jumlah armada Pemadam Kebakaran | Buah | |
| | a.Mobil tangki | | 1 |
| | b.Mobil Pemadam | | 6 |
| 3 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Menit | 10-45 |
| 4 | Jumlah personil pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi | Orang | 0 |
| | | | |

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

Mengingat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih ada kawasan kumuh, maka perlu diantisipasi dengan penyediaan rumah layak huni dan melakukan penataan lingkungan di kawasan tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah luasan kawasan kumuh dari tahun 2009-2013 sudah mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Pembangunan perumahan di beberapa lokasi perumahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2013 terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Maritengngae 6 lokasi, Kecamatan Watang Pulu 3 lokasi dan 1 lokasi di Kecamatan Baranti. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berkembang pesat. Perumahan tersebut telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas sosial, namun dalam hal sanitasi masih menggunakan sistem *on site*, belum menggunakan IPAL komunal.

Berdasarkan hasil survey yang tertuang di Master Plan drainase Kota Pangkajene, menjelaskan bahwa kondisi drainase makro meliputi anak sungai di sebelah utara kota dan sebelah selatan Pangkajene yang bermuara langsung atau tidak langsung menuju Danau Sidenreng. Air hujan yang mengalir menuju Danau Sidenreng kemudian mengalir menuju Danau Tempe menuju Sungai Cenranae dan akhirnya bermuara di Teluk Bone. Sementara untuk sistem drainase mikro dibangun di sisi-sisi jalan yang berada di wilayah kota pangkajene, terdapat 7 zona yaitu:

- Zona 1 : Batas timur s/d Jl.. La Nu'mang- Jl. Korban 40.000
- Zona 2: Batas barat Jl. La Nu'mang- Jl. Korban 40.000; Batas Tiur Jl. Pasar- Jl. Callakara
- Zona 3: Batas Barat Jl. Pasar – Jl. Callakara; Batas timur Jl. Achmad Yani
- Zona 4: Batas Barat Jl. Achmad Yani; batas Timur Pertemuan Sungai dengan Jl. Hasanuddin
- Zona 5: Batas Barat Jl. Achmad Yani; Batas Timur Pertemuan sungai dengan jl. Landaung
- Zona 6: Batas Jl. Callakara; batas Timur dengan jl. Badak
- Zona 7 : Batas Utara Jl. Pengairan; Batas Barat Selatan Sungai

Untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.

Untuk melakukan keterpaduan dan pengendalian perencanaan program, maka pada tahun 2013 telah dilakukan penyusunan dokumen RPIJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018. Dokumen ini sangat penting untuk menjaga sinergitas dan keteraduan antar program, serta untuk memantau sejauh mana perkembangan program-program keciptakaryaannya. Selain itu Sebagaimana program dari direktorat jenderal Cipta karya adanya percepatan pembangunan sanitasi permukiman, maka Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengikuti program tersebut dan telah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan dokumen Strategi sanitasi Kot dan pada Tahun 2014 dilakukan penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi.

Tabel 2. 41 Dokumen perencanaan permukiman yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No. | Jenis dokumen | Tahun Penyusunan |
|-----|---|------------------|
| 1. | SPPIP | 2011 |
| 2. | RPKPP | 2012 |
| 3. | Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL | 2012 |
| 4. | Buku Putih Sanitasi | 2013 |
| 5. | Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2014-2018 | 2013 |
| 6. | Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Tahun 2014-2018 | 2013 |
| 7. | Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) | 2013 |
| 8. | Master Plan Drainase | 2013 |

Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 42 Panjang Drainase yang terbangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Drainase | 72.253 | 9.767 | 7.462 | 8.792 | 4.381 |
| Talud | - | 15.186 | 18.205 | 5.599 | 2.363 |
| Duiker | 49 | 40 | 33 | 4 | 12 |

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gorong-gorong | - | 1 | - | - | 12 |

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenren Rappang; 2013

E. Perencanaan Pembangunan

Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan Pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan mengikuti perkembangan dinamika yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perencanaan. Proses dan Produk perencanaan merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi antara lain; penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penyusunan Draft Awal RKPD, RKPD Final, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD, Penyusunan KUA-PPAS Pokok dan Perubahan sampai pada Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, Penyusunan Dokumen yang mendukung perencanaan secara makro. Penyusunan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan RPJMD, dll. Proses dan Produk perencanaan masih memerlukan penyempurnaan dalam mewujudkan proses dan produk perencanaan yang berkualitas, terarah, terukur sesuai kaidah-kaidah peraturan dan perundang-undangan perencanaan. Untuk mewujudkan itu semua, pada tahun-tahun mendatang diupayakan melakukan perbaikan melalui penyiapan program-program yang bersinergi dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

F. Perhubungan

Urusan perhubungan sangatlah penting dalam hal perpindahan manusia, barang dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. Ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keselamatan dalam berlalulintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur-jalur yang dilewati kendaraan. Untuk kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Data Perhubungan Tahun 2009 – 2013 Kab Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Jumlah arus penumpang umum | 30.740 | 32.340 | 558.000 | 651.600 | 667.440 |
| 2. | Jumlah izin trayek | 2.866 | 3.600 | 2.619 | 2.596 | 2.537 |
| 3. | Pengujian Kelayakan angkutan umum | - | 3.477 | 3.589 | 3.626 | - |

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 4. | Tingkat kepemilikan/ kelulusan keur angkutan umum | 2.871 | 3.471 | 3.588 | 2.626 | 3.616 |
| 5. | Jumlah kendaraan umum melalui terminal | 287.000 | 240.000 | 213.500 | 179.500 | 137600 |
| 6. | Pengadaan rambu-rambu lalulintas | 110 | - | - | 6 | - |

Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

G. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup/ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi. Untuk urusan Lingkungan hidup kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|--|---|
| | Taman Kota 0,25 Ha | Kota Pangkajene |
| | Hutan Kota 2 Ha | Kota Pangkajene |
| | Dokumen : - UKL/UPL 61 Dok. - SPPL 37 DoK. - SLHD 1 Dok, - KLHS RTRW 1 Dok. - Rencana Induk RTH | |
| | Regulasi : Perda no.02 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| | Sarana & Prasarana Persampahan: - Tong Sampah 1193 unit - Kontainer terbuka/tertutup 19 unit - Kontainer Sampah Plastik (80 ltr) 250 unit | Tersebar di Kota Pangkajene dan Rappang |

| No. | Uraian | Keterangan |
|-----|--------------------|------------|
| - | Bak sampah 10 unit | |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 45 Jumlah Armada Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jumlah Sampah yang ditangani | 22.688 | 22.688 | 20.340 | 20.340 | 33.468 |
| TPS | 38 | 38 | 23 | 23 | 24 |

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

H. Kependudukan Dan Catatan Sipil

Berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami fluktuasi mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 2,76 persen. Dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan baik dari tingkat akurasi data melalui validasi data setiap tahunnya sehingga pelayanan kependudukan dan catatan sipil bisa lebih optimal. Sehubungan dengan hal itu Penyelenggaraan layanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola dengan baik. Sejak Tahun 2009 Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis informasi komunikasi secara online.

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2013 mencapai 80,44 persen dari jumlah penduduk wajib KTP prosentase ini mengalami penurunan 2 tahun terakhir dari tahun 2012, hal ini lebih disebabkan pada tahun 2012 penerapan E KTP secara Nasional yang secara teknis di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kepemilikan akte Kelahiran mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2013 mencapai 75,3 persen hal ini menandakan masih ada 24,7 persen penduduk yang belum memiliki akte kelahiran diantaranya adalah bayi yang baru lahir maupun penduduk lainnya utamanya mereka yang berada pada wilayah terpencil.

Tabel 2. 46 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 – 2014

| Elemen Data | Tahun | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Jumlah Penduduk | 338.146 | 346.090 | 342.161 | 338.958 | 299.077 |
| Laki Laki | 168.697 | 172.100 | 169.969 | 168.053 | 148.004 |
| Perempuan | 169.449 | 173.990 | 172.465 | 170.905 | 151.003 |
| Jumlah Penduduk Wajib KTP | 200.708 | 201.438 | 211.412 | 236.179 | 207.153 |
| Jumlah Penduduk Memiliki KTP | 178.088 | 179.681 | 181.532 | 189.976 | 192.005 |

| Elemen Data | Tahun | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kepemilikan KTP (%) | 88,73 | 89,20 | 85,87 | 80,44 | |
| Jumlah Balita | 32.250 | 31.450 | 29.553 | 26.243 | 23.404 |
| Jumlah Bayi Lahir | 6.386 | 5.063 | 3.880 | 1.941 | 2.637 |
| Jumlah Penduduk Memiliki Akta | 218.524 | 240.577 | 245.376 | 255.112 | 268.571 |
| Kepemilikan Akta Kelahiran (%) | 64,42 | 69,51 | 71,71 | 75,26 | |

Sumber data : Dinas Kependudukan & Capil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014

I. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki komitmen yang besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak hal ini terbukti dengan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang merupakan penghargaan tertinggi bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan peran perempuan, demikian pula dengan anak yang merupakan generasi penerus.

Penanganan KDRT

Perlindungan bagi anak merupakan prioritas dalam pembangunan daerah utamanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak diantaranya penyediaan sarana bermain sebagai media tumbuh kembang anak serta pemenuhan kebutuhan kebutuhan anak yang terintegrasi ke dalam pelayanan pemerintah. Terkait dengan perlindungan anak beberapa regulasi tentang telah diterbitkan diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penanggulangan HIV dan Aids, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, Keputusan Bupati Nomor 731 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja (P2TP2AR) dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut disajikan Data Angkatan Kerja di bawah umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014:

Tabel 2. 47 Angkatan Kerja di Bawah Umur 15-19 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun | 111.338 | 124.680 | 112.583 | 104.006 | 112.252 |

Sumber: Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

J. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Kualitas individu dalam masyarakat sangat ditunjang oleh pembinaan dalam keluarganya, karena keluarga merupakan penopang dasar perkembangan dalam individu. Keluarga yang bahagia

dan sejahtera akan membentuk masyarakat maju. Berikut disajikan rata-rata jumlah anak per keluarga:

Tabel 2. 48 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jumlah Anak | 111.077 | 113.965 | 112.546 | 113.575 | 114.383 |
| Jumlah Keluarga | 64.897 | 68.074 | 70.591 | 74.313 | 72.805 |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber: BKBPP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2014

Cakupan peserta KB Aktif dan Rasio Akseptor KB

Berikut ini digambarkan kinerja Kinerja urusan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2011 – 2013, adapun perkembangan cakupan peserta aktif tahun 2011 sebesar 70 persen dari 48.937 pasangan usia subur dan menurun pada Tahun 2013 sebesar 67 persen dari 49.021 pasangan usia subur. Peningkatan cakupan peserta KB aktif ini tidak terlepas dari upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut tabel Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2013.

Tabel 2. 49 Rasio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2013

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah | 34.427 | 33.418 | 32.888 |
| 2 | Jumlah Pasangan Usia Subur | Jumlah | 48.937 | 49.955 | 49.021 |
| 3 | Rasio Akseptor KB | % | 70 | 66 | 67 |

Sumber: BKBPP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Tabel 2. 50 Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 - 2013

| No | Tahun | Jumlah PUS | Jumlah Peserta KB Aktif | % KB Aktif |
|----|-------|------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2009 | 44.364 | 27.011 | 60,88 % |
| 2 | 2010 | 46.037 | 29.661 | 64,43 % |
| 3 | 2011 | 48.937 | 34.427 | 70,35 % |
| 4 | 2012 | 49.955 | 33.418 | 66,89 % |
| 5 | 2013 | 49.021 | 32.888 | 67,09% |

Sumber: BKBPP Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

K. Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib yang disediakan pemerintah daerah. Sarana sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial berupa Panti Asuhan.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Sarana Sosial LKS

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Sarana Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 3 LKS | 3 LKS | 3 LKS | 4 LKS | 4 LKS | 4 LKS |

Sumber: Dinas Sosial Nakertrans; 2013

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi prioritas dalam pembangunan masih banyaknya para penyandang masalah kesejahteraan. Penanggulangan masalah kesejahteraan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pemberian keterampilan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 52 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012

| No | Jenis PMKS | Satuan | Jumlah |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | - | - |
| 2 | Anak Terlantar | Orang | 134 |
| 3 | Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Jiwa | 64 |
| 4 | Anak Jalanan | - | - |
| 5 | Anak dengan Kedisabilitas (ADK) | Orang | 91 |
| 6 | Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | - | - |
| 7 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | - | - |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | Orang | 2.734 |
| 9 | Penyandang Disabilitas | Orang | 196 |
| 10 | Tuna Susila | Orang | 51 |
| 11 | Gelandangan | - | - |
| 12 | Pengemis | Orang | 147 |

| No | Jenis PMKS | Satuan | Jumlah |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 13 | Pemulung | Orang | 119 |
| 14 | Kelompok Minoritas | - | - |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP) | Orang | 68 |
| 16 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) | Orang | 43 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Jiwa | 56 |
| 18 | Korban Trafficking | - | - |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | Orang | 126 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | - | - |
| 21 | Korban Bencana Alam | Orang | 940 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | KK & Jiwa | 37 & 3 |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Orang | 176 |
| 24 | Fakir Miskin (FM) | RTM | 11.935 |
| 25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | Orang | 40 |
| 26 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Orang | 93 |
| 27 | Pekerja Sosial Profesional | - | - |
| 28 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Orang | 232 |
| 29 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Orang | 13 |
| 30 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Orang | 4 |
| 31 | Karang Taruna | KLP | 105 |
| 32 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Orang | 19 |
| 33 | Keluarga Pioner | - | - |
| 34 | Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Kelurga Masyarakat (WPKS) | - | - |

| No | Jenis PMKS | Satuan | Jumlah |
|----|---------------------------------------|--------|--------|
| 35 | Penyuluh Sosial | - | - |
| 36 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Orang | 11 |
| 37 | Dunia Usaha | - | - |

Sumber: Dinas Sosial Nakertrans, 2012

Tabel 2. 53 PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah PMKS yang diberi bantuan | Jiwa | 11.580 | 11.731 | 11.778 | 11.993 | 12.098 |
| 2 | Jumlah PMKS yang belum diberi bantuan | Jiwa | 5.147 | 4.996 | 4.949 | 4.737 | 4.629 |
| 3 | Jumlah PMKS yang ada | Jiwa | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 | 16.727 |
| | PMKS memperoleh bantuan sosial | % | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |

Sumber: Dinas Sosial Nakertrans, 2013

Tabel 2. 54 Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah PMKS yang tertangani | Jenis | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | Jumlah PMKS yang ada | Jenis | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 3 | Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | % | 33 | 28 | 33 | 37 | 32 |

Sumber: Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

Dalam urusan sosial masalah penanggulangan bencana juga menjadi sangat penting, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam sering terjadi seperti banjir di sekitar Sungai Salo Bukkang, sekitar Danau Sidenreng, dan di beberapa lokasi yang tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain banjir bencana alam seperti angin puting beliung juga sering terjadi, pada tahun 2012 terjadi angin puting beliung di Kelurahan Wette'e yang menjadi bencana nasional. Berikut data peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2. 55 Jenis dan Jumlah kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Jumlah kejadian | | |
|-----|---------------|-----------------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Angin Kencang | 10 | 6 | 7 |
| 2. | Kebakaran | 17 | 21 | 18 |
| 3. | Banjir | 0 | 3 | 2 |
| 4. | Longsor | 0 | 2 | 0 |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

L. Ketenagakerjaan

Penduduk usia 15 Tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 81,57% sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 35,33%

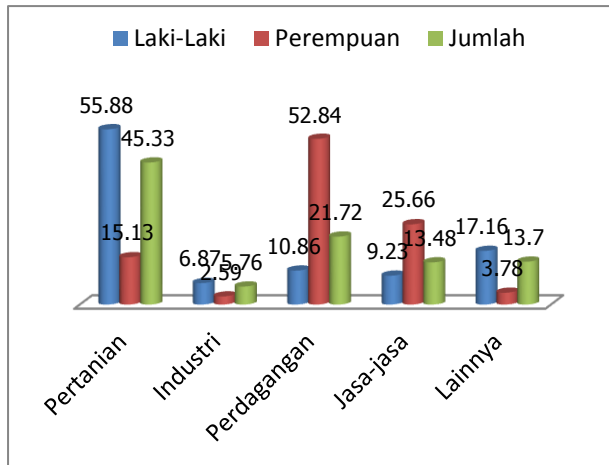
Tabel 2. 56 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Seminggu yang lalu di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----------|---|-----------|-----------|---------|
| 1 | ANGKATAN KERJA | | | |
| | Bekerja | 72,685 | 32,610 | 105,295 |
| | Pengangguran | 3,229 | 3,728 | 6,957 |
| | Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (1) | 75,914 | 36,338 | 112,252 |
| 2 | BUKAN ANGKATAN KERJA | | | |
| | Sekolah | 7,652 | 7,866 | 15,518 |
| | Mengurus RT | 411 | 65,086 | 65,497 |
| | Lainnya | 9,505 | 4,526 | 14,031 |
| | Jumlah Penduduk bukan Angkatan Kerja (2) | 17,568 | 77,478 | 95,046 |
| | Jumlah Penduduk Usia Kerja (1)+(2) | 93,482 | 114,147 | 207,628 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 81.20 | 32.12 | 54.00 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4.25 | 12.25 | 6.20 |

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2014

Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Jika dilihat menurut lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja di sector pertanian. Pada Tahun 2013 persentase penduduk yang bekerja di sector ini sekitar 45,33 persen. Dari angka tersebut, sebanyak 39.795 orang atau sekitar 91,37 persen merupakan tenaga kerja laki-laki dan sisanya tenaga kerja perempuan. Dari grafik di samping terlihat pula sector



Gambar 2.14 Penduduk yang bekerja Menurut Sektor (%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013

perdagangan yang menjadi penyerap terbesar tenaga kerja perempuan yaitu sebanyak 13.319 orang atau sekitar 62,95 persen dan sisanya tenaga kerja laki-laki.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2009 sebesar 55 % dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 57,18%. Untuk lebih lengkapnya pada tabel berikut disajikan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012

Tabel 2. 57 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | |
|----|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas | Jiwa | 103.279 | 111.338 | 124.680 | 112.583 |
| 2 | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas | Jiwa | 187.780 | 192.626 | 193.122 | 196.858 |
| | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | % | 55,00 | 57,8 | 64,56 | 57,18 |

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2012

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tabel 2. 58 Pencari Kerja yang ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 20010-2014

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan | Orang | 240 | 110 | 365 | 359 | 319 |
| 2 | Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar | Orang | 665 | 182 | 1.375 | 1.375 | 638 |
| 3 | Pencari Kerja yang ditempatkan | % | 36,09 | 60,43 | 26,54 | 26,10 | 50 |

Sumber: Dinas Sosial Nakertrans;2014

Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 sebesar 8 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2011 sebesar 4,78 persen. Selama tiga tahun terakhir, tingkat

pengangguran terus meningkat dari 4,78 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 6,99 persen pada tahun 2012 dan puncak kenaikannya mencapai 7,62 persen. Berikut ini disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013.

Tabel 2. 59 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja | Orang | 9.789 | 5.960 | 7.873 | 7.930 | 7.391 |
| 2 | Jumlah Penduduk usia angkatan kerja | Orang | 111.338 | 124.680 | 112.583 | 199.052 | 112.252 |
| 3 | Tingkat pengangguran terbuka | % | 8,8 | 4,78 | 6,99 | 7,62 | 6,20 |

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

M. Ketrasmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2009 sudah mencapai 8 UPT dan jumlah KK yang diserahkan pada tahun 2009 sebesar 100 KK.

Tabel 2. 60 Data Ketrasmigrasian Kab Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No. | Uraian/UPT | Kecamatan | Tahun Penempatan | Jumlah KK | KET. |
|-----|------------|------------|------------------|-----------|---|
| 1 | Lombok I | Pitu Riase | 1995 | 200 | Sudah diserahkan ke Pemda 12 April 2000 |
| 2 | Betao I | Pitu Riawa | 1995 | 215 | 3 Desember 2000 |
| 3 | Lombok II | Pitu Riase | 1996 | 220 | 2001 |
| 4 | Betao II | Pitu Riawa | 1997 | 200 | 2002 |
| 5 | Betao III | Pitu Riawa | 1997 | 290 | 2002 |
| 6 | Lampiring | Pitu Riase | 1998 | 200 | 2003 |
| 7 | Lombok III | Pitu Riase | 1997 | 170 | 2001 |
| 8 | Tana Toro | Pitu Riase | 2001 | 100 | Masih dalam Pembinaan |

Sumber: Dinas Sosial dan Nakertrans, 2014

N. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk tumbuh bersama, dengan asas semangat kebersamaan dan silaturahmi, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan melainkan mensejahterakan anggotanya. Koperasi dapat menjembatani dan menyelesaikan kebutuhan dasar anggotanya antara lain; memfasilitasi Kegiatan Simpan Pinjam, Memfasilitasi pemenuhan Kebutuhan Pokok anggotanya, dll. Berikut presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

Tabel 2. 61 Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/Urusan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 143 | 153 | 164 | 166 | 168 |
| 2 | Jumlah Koperasi | 334 | 344 | 355 | 357 | 359 |
| 3 | Presentase Koperasi Aktif | 42,8 | 44,5 | 46,2 | 46,5 | 46,8 |

Sumber: Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

2. Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir, pada tahun 2009 jumlah UKM sebanyak 182, meningkat menjadi 17.018 pada tahun 2013, sedangkan jumlah BPR/LKM Pada Tahun 2009 sebanyak 39 menjadi 222 pada tahun 2013.

Tabel 2. 62 Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/Urusan | Tahun | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Seluruh UKM | 182 | 5.985 | 7.060 | 11.999 | 17.018 |
| 2 | Jumlah BPR/LKM | 39 | 85 | 222 | 222 | 222 |

Sumber: Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

UMKM

Tabel 2. 63 Data Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2010-2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | BIDANG/URUSAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|----|--------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| A | Jumlah Usaha Mikro | Jumlah | 5.845 | 6.888 | 9.273 | 13.547 | 2.442 |

| NO | BIDANG/URUSAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|----|-----------------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| B | Jumlah Usaha Kecil | Jumlah | 142 | 174 | 2.478 | 3.193 | 129 |
| C | Jumlah Usaha Menengah | Jumlah | 0 | 0 | 249 | 278 | 71 |
| D | Jumlah UMKM | Jumlah | 5.987 | 7.062 | 12.000 | 17.018 | 2.642 |

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kabupaten Sidenreng Rappang, 2014

Usaha Mikro dan Kecil berperan dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data tabel tersebut di atas menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2009 Usaha Mikro berjumlah 184 menjadi 13.547. Demikian pula dengan Usaha Kecil mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2010 berjumlah 142 menjadi 3.193 pada tahun 2013, sementara Usaha Menengah terjadi peningkatan dari tahun 2012 berjumlah 249 menjadi 278 pada Tahun 2013. Tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus mendorong pengembangannya melalui pembinaan pengelolaan usaha yang menerapkan prinsip manajemen yang ditandai dengan pemenuhan syarat untuk mengakses penguatan permodalan (Bankable).

O. Penanaman Modal

Tabel 2. 64 Jumlah Investor Berskala Nasional dan (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013

| No | Nama Perusahaan | Nilai Investasi (Rp) | Keterangan |
|----|------------------------------|----------------------|--|
| 1 | PT.BULI | - | Proses Produksi (2004) |
| 2 | PT.SATWA MEDIKA UTAMA | - | Proses Produksi |
| 3 | PT. SINAR ENERGI SULAWESI | 1.500.000.000 | Proses Produksi |
| 4 | PT.MALINDO FEEDMILL,Tbk | 100.000.000.000 | |
| 5 | PT. SEMESTA MARGAREKSA | 40.000.000.000 | 2006 (Perkebunan Tebu), 2013(Proses Perubahan Komoditi ke Tanaman Karet) |
| 6 | PT.JAPFA COMFEED INDONESIA | 10.000.000.000 | 2008 (Proses Produksi) |
| 7 | PT.BIOGUNA SUSTAINABLE POWER | 218.500.000.000 | 2013 (Proses Perizinan) |
| 8 | PT UPC SIDRAP BAYU ENERGI | 1.500.000.000.000 | 2013 (Proses Perizinan) |
| 9 | PT. CAHAYA MITRA SULAWESI | - | 2013 (Proses Pembangunan) |

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

P. Kebudayaan

Dalam upaya melestarikan seni dan budaya Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun dilaksanakan Festival Seni dan Budaya serta kegiatan pelestarian situs – situs sejarah.

Tabel 2. 65 Situs Budaya Kab Sidenreng Rappang Tahun 2008 – 2012 (dobel)

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah | Capaian Kinerja | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya | 3 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 5 Kali |
| 2. | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya | 20 Situs 4 Kawasan | 20 Situs 4 Kawasan | 20 Situs 4 Kawasan | 20 Situs 4 Kawasan | 20 Situs 4 Kawasan |
| 3. | Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 1 Buah | 1 Buah | 1 Buah | 1 Buah | 1 Buah |
| 4. | Prosentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang; 2013

Q. Pariwisata

Kabupaten Sidenreng Rappang selain memiliki potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor pertanian dalam arti luas, daerah ini juga memiliki daya tarik di bidang pariwisata. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Kawasan Pariwisata dibagi atas Kawasan Pariwisata Budaya, Kawasan Pariwisata Alam, dan Kawasan Pariwisata Buatan.

1. Kawasan Pariwisata Budaya :

- a. Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
- b. Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang;
- c. Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu;
- d. Kawasan Masjid Kuno Jerrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan
- e. Upacara Adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang

2. Kawasan Pariwisata Alam :

- a. Bungge Tjitta di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae;
- b. Taman Wisata Alam di Desa Maddenra Kecamatan Kulo;
- c. Pemandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe;
- d. Danau Sidenreng di Sebagian Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, Panca Lautang; dan
- e. Gua Parinding di Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase.

3. Kawasan Pariwisata Buatan :

- a. Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu;
- b. Taman Rekreasi Puncak Harapan di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase; dan

Agrowisata seperti Kerajinan Batu Ukir Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae, Processing Beras Berkualitas PT.Pertani Sidenreng Rappang di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae, Peternakan Sapi Berskala Besar di Desa Bila Kecamatan Pitu Riase, Sanggar Kerajinan Tenun Sutra di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu, Wisata Agro Toddangbojo di Desa Ciro Ciroe Kecamatan Watang Pulu dan lain-lain

R. Pemuda Dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terangkum dalam kegiatan senidan olahraga yang menjadi suatu kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berikut ini digambarkan perkembangan seni budaya dan olahraga tahun 2009-2013. Jumlah gedung olahraga mencapai 282 Gedung yang tersebar pada 11 Kecamatan yang merupakan sarana bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga. Hingga saat ini sarana gedung kesenian belum ada sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana kesenian bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan diri secara positif dalam bidang seni dan melestarikan budaya daerah. Dalam tabel berikut ini disajikan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2. 66 Jumlah Organisasi Pemuda per Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Kecamatan | Kondisi Tahun | | | | |
|----|------------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2 | Tellu Limpoe | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Maritengngae | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Watang Sidenreng | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | Pitu Riawa | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 6 | Dua Pitue | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 7 | Pitu Riase | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 8 | Panca Rijang | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 9 | Kulo | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Baranti | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 11 | Watang Pulu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Sumber: Dinas Pora Budpar Kabupaten Sidenreng Rappang; 2014

Tabel 2. 67 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Group Kesenian | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah Sarana Gedung Kesenian | - | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah Klub Olahraga | 168 | 169 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga | 262 | 270 | 274 | 279 | 281 |

Sumber: Dinas Porabudpar Kabupaten Sidenreng Rappang 2013

S. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik khususnya dalam pembinaan LSM dan Ormas dan OKP dalam kurun waktu 6 (enam) tahun hanya dua kegiatan pada tahun 2010, demikian pula dengan kegiatan pembinaan Politik Daerah sebanyak satu kegiatan pada tahun 2011, seyogyanya kegiatan pembinaan ini perlu dilaksanakan setiap tahunnya untuk membina dan menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Tabel 2. 68 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah | Capaian Kinerja | | | | | |
|----|--|-----------------|------|--------|--------|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | - | - | 2 Keg. | - | - | - |
| 2. | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | - | - | - | 1 Keg. | - | - |

Sumber: Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Sidenreng Rappang

T. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan 940 jabatan structural, rinciannya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 69 Jumlah Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No | Uraian | Jumlah |
|---------------|--------------|------------|
| 1 | Eselon I.b | 0 |
| 2 | Eselon II.a | 1 |
| 3 | Eselon II.b | 31 |
| 4 | Eselon III.a | 56 |
| 5 | Eselon III.b | 88 |
| 6 | Eselon IV.a | 470 |
| 7 | Eselon IV.b | 262 |
| 8 | Eselon V.a | 32 |
| Jumlah | | 940 |

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2. 70 Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014

| No | SKPD | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 1 |
| 2 | Asisten | 3 |

| No | SKPD | Jumlah |
|--------|--------------------|------------|
| 3 | Kepala Bagian | 10 |
| 4 | Staf Ahli | 5 |
| 5 | Sekretariat DPRD | 1 |
| 6 | Sekretariat Korpri | 1 |
| 7 | Dinas-Dinas | 14 |
| 8 | Lembaga Teknis | 16 |
| 9 | UPT Dinas | 6 |
| 10 | UPT Badan | 2 |
| 11 | Kecamatan | 11 |
| 12 | Kelurahan | 38 |
| 13 | Desa | 68 |
| Jumlah | | 176 |

Sumber: *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2014*

Tabel 2. 71 Jumlah dan Nomenklatur Dinas Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

| No | Dinas | No | Dinas |
|----|--|----|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 8 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 2 | Dinas Kesehatan | 9 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | Dinas Sosial dan Nakertrans | 10 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| 4 | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 11 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 12 | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| 6 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 13 | Dinas Pendapatan Daerah |
| 7 | Dinas Bina Marga | 14 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata |

Sumber: *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2014*

Tabel 2. 72 Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

| No | Lembaga Teknis Daerah | No | Lembaga Teknis Daerah |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Badan Kesbang Linmas | 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | Badan Ketahanan Pangan | 10 | Inspektorat Kabupaten |
| 3 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 11 | Kantor Arsip dan Perpustakaan |
| 4 | Badan Kepegawaian Daerah | 12 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Lembaga Teknis Daerah | No | Lembaga Teknis Daerah |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 | Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 14 | Perwakilan |
| 7 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 15 | Rumah Sakit Nene' Mallomo |
| 8 | Badan lingkungan Hidup | 16 | Rumah Sakit Arifin Nu'mang |

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2008 sebesar 1,72 persen sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1,37 persen.

Tabel 2. 73 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2012

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Penduduk | Orang | 252.483 | 271.911 | 274.652 | 277.451 | 283.307 |
| 2 | Jumlah Polisi Pamong Praja | Orang | 44 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 3 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | | 1,74 | 1,47 | 1,42 | 1,37 | 1,37 |

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

Penegakan PERDA

Rasio Penegakan PERDA dalam kurun 5(lima) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2013 sebesar 72%

Tabel 2. 74 Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| NO | Uraian | Jumlah |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2010 | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | 24 |
| | Jumlah Pelanggaran PERDA | 61 |
| | Rasio | 39% |
| 2 | 2011 | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | 56 |
| | Jumlah Pelanggaran PERDA | 100 |
| | Rasio | 56% |

| NO | Uraian | Jumlah |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 3 | 2012 | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | 56 |
| | Jumlah Pelanggaran PERDA | 100 |
| | Rasio | 56% |
| 4 | 2013 | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | 27 |
| | Jumlah Pelanggaran PERDA | 31 |
| | Rasio | 87% |
| 5 | 2014 | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | 39 |
| | Jumlah Pelanggaran PERDA | 43 |
| | Rasio | 91% |

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2. 75 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Uraian | Jumlah |
|----------|--|--------|
| 1 | 2009 | |
| | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan | 4 |
| 2 | 2010 | |
| | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan | 4 |
| 3 | 2011 | |
| | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan | 5 |
| 4 | 2012 | |
| | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan | 4 |
| 5 | 2013 | |
| | Jumlah Patroli Petugas Satpol PP (Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3) dalam satu bulan | 4 |

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

Tabel 2. 76 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Uraian | Jumlah |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2009 | |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 19 |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 19 |
| | Rasio | 100% |
| 2 | 2010 | |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 34 |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 49 |
| | Rasio | 69% |
| 3 | 2011 | |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 46 |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 46 |
| | Rasio | 100% |
| 4 | 2012 | |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 61 |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 85 |
| | Rasio | 72% |
| 5 | 2013 | |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 41 |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 77 |
| | Rasio | 53% |

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

U. Ketahanan Pangan

Penyuluhan

Ketersediaan Sumberdaya tenaga penyuluh dalam mengawal Potensi Lahan Pertanian kearah lebih produktif yang ditandai dengan peningkatan luas tanam, menurunnya tingkat serangan H/P, peningkatan produksi/produktivitas dan berkembangnya teknologi budidaya pertanian secara makro ditingkat petani sangat ditentukan dengan standar ratio penyuluh per luas lahan yang menjadi wilayah kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan kendaraan Roda 2 (dua) sampai pada tahun 2013 sebanyak 111 Unit, atau telah terpenuhi 70,2% dari 158 Penyuluh. Sedangkan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan terdiri dari 11 Kantor BPP yang tersebar pada 11 Kecamatan. Sementara alat bantu penyuluh seperti infokus, laptop dan alat peraga lainnya telah terpenuhi 75%. Dari penjelasan tersebut, Pemerintah

Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang bagi aparat penyuluh. Berikut ini disajikan data perkembangan jumlah penyuluh.

Tabel 2. 77 Data Penyuluh Sektor Pertanian berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013

| NO | SUB SEKTOR | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|----|----------------|---------------|-----------|--------|
| | | LAKI LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Tanaman Pangan | 53 | 22 | 75 |
| 2 | Hortikultura | - | - | 0 |
| 3 | Perkebunan | 12 | 2 | 14 |
| 4 | Peternakan | 29 | 17 | 46 |
| 5 | Kehutanan | 15 | 3 | 18 |
| 6 | Perikanan | 2 | 3 | 5 |
| | Jumlah | 111 | 47 | 158 |

Sumber: Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kesediaan jumlah penyuluh dari masing-masing sektor masih sangat rendah. Dengan potensi luas areal pertanian masing-masing lahan persawahan 46.973 Ha, Kebun Campur 21.395 Ha, Kolam 765 Ha, Danau 1.636,15 Ha, Perkebunan 18.443,45 Ha, Hutan lebat 59.724,57 Ha, Hutan sejenis 1.632,94 Ha. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, adalah menambah jumlah penyuluh dan peningkatan kapasitas penyuluh secara bertahap, ditargetkan 1 (satu) desa/kelurahan di kawal minimal 1 (satu) penyuluh.

Tabel 2. 78 Data Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | KECAMATAN | DESA/KEL | DATA POKTAN | JUMLAH ANGGOTA |
|----|------------------|----------|-------------|----------------|
| 1 | MARITENGGAE | 12 | 147 | 4643 |
| 2 | WATANG PULU | 10 | 136 | 6797 |
| 3 | PANCA LAUTANG | 10 | 117 | 5468 |
| 4 | TELLU LIMPOE | 9 | 113 | 4248 |
| 5 | BARANTI | 9 | 125 | 7127 |
| 6 | KULO | 6 | 120 | 4894 |
| 7 | PANCA RIJANG | 8 | 139 | 10893 |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 8 | 166 | 7932 |
| 9 | PITU RIAWA | 12 | 217 | 11275 |
| 10 | DUA PITUE | 10 | 119 | 7088 |
| 11 | PITU RIASE | 12 | 181 | 6665 |
| | Jumlah | 106 | 1580 | 77030 |

Sumber: Data Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Tahun 2013

Jumlah kelompok Tani mengalami peningkatan yang cukup, pada tahun 2013 berjumlah 1580 dengan jumlah petani 77.030 jiwa pada tahun 2013. Berdasarkan data tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketersediaan tenaga penyuluh, ratio kondisi yang dihadapi adalah 1 Penyuluh : 489 Jiwa Petani, demikian pula dengan ratio jumlah kelompok tani 1 penyuluh : 10 kelompok tani.

Melihat ratio tersebut, terlihat ketimpangan yang cukup besar, sehingga kemampuan penyuluh melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap optimalisasi lahan pertanian sangat rendah. Tahun-tahun mendatang penting dilakukan penyesuaian ratio penyuluh dengan jumlah petani, luas lahan dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya

Tabel 2. 79 Data Kelembagaan Kelompok Wanita Tani Tahun 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KELOMPOK |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | MARITENGGAE | 10 |
| 2 | WATANG PULU | 12 |
| 3 | PANCA LAUTANG | 4 |
| 4 | TELLU LIMPOE | 16 |
| 5 | BARANTI | 10 |
| 6 | KULO | 8 |
| 7 | PANCA RIJANG | 27 |
| 8 | WATANG SIDENRENG | 13 |
| 9 | PITU RIAWA | 6 |
| 10 | DUA PITUE | 9 |
| 11 | PITU RIASE | 8 |
| | Jumlah | 123 |

Sumber Data: Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Sidenreng Rappang, 2014

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Dalam percepatan pemenuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Selain Peraturan Bupati tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor : 521/2061/IV/KP-BPKP/2013, Tanggal 17 April 2013, Perihal Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Untuk mengontrol besarnya pemanfaatan pangan lokal pada setiap wilayah kecamatan, telah disiapkan sistem informasi yang dapat memberikan gambaran daerah rawan dan aman.

Sampai pada Tahun 2013, telah ditetapkan 6 (enam) Desa Mandiri Pangan yang berada dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan, ditargetkan pada tahun-tahun mendatang minimal 3 (tiga) Desa Reflikasi Desa Mandiri Pangan. Dalam mendukung Reflikasi Desa Mandiri Pangan, diwajibkan setiap Rumah Tangga memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam tanaman bahan pangan lokal,

untuk selanjutnya diolah secara sederhana guna mendapatkan diversifikasi pangan sebagai bahan makanan.

Tabel 2. 80 Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|---------|-------|------|------|------|------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Regulasi Ketahanan Pangan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Sumber: Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Dari data yang disajikan pada tabel berikut inimerlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2009-2013 mengalami surplus, bahkan di tahun 2013 hampir sebesar dua kali lipat (193,80%)

Tabel 2. 81 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/Urusan | Satuan | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Rata-rata Konsumsi beras | Kg/Kap/Thn | 114,39 | 114,39 | 114,39 | 109,50 | 106,18 |
| 2 | Konsumsi Beras penduduk | Kg/Tahun | 28.673.683,74 | 31.091.316,39 | 31.417.442,28 | 30.380.884,50 | 25.622.316,58 |
| 3 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | % | 160,38 | 161,63 | 165,36 | 176,76 | 193,80 |

Sumber: Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

V. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Beberapa lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat desa/kelurahan yang telah terbentuk dan terbina berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD yang tersebar pada seluruh desa dan kelurahan. Demikian pula dengan jumlah kelompok binaan PKK yang telah tersebar pada 106 desa/kelurahan dan pada 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini dapat dikatakan bahwa binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 100%. Dalam tabel-tabel berikut ini disajikan kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang:

Tabel 2. 82 Jumlah Kelembagaan Masyarakat Tahun 2009 – 2013

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Tahun | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Kelembagaan masyarakat | 38 LPM 68 LKMD | 38 LPM 68 LKMD | 38 LPM 68 LKMD | 38 LPM 68 LKMD | 38 LPM 68 LKMD |
| 2 | Jumlah Kelompok Binaan PKK | 117 Kel | 117 Kel | 117 Kel | 117 Kel | 117 Kel |

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2013

Tabel 2. 83 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | 2009 | |
| | Jumlah LPM | 106 |
| | Jumlah KLP Binaan LPM | 212 |
| | Rata-rata Jumlah LPM | 2,00 |
| 2 | 2010 | |
| | Jumlah LPM | 106 |
| | Jumlah KLP Binaan LPM | 318 |
| | Rata-rata Jumlah LPM | 3,00 |
| 3 | 2011 | |
| | Jumlah LPM | 106 |
| | Jumlah KLP Binaan LPM | 318 |
| | Rata-rata Jumlah LPM | 3,00 |
| 4 | 2012 | |
| | Jumlah LPM | 106 |
| | Jumlah KLP Binaan LPM | 318 |
| | Rata-rata Jumlah LPM | 3,00 |
| 5 | 2013 | |
| | Jumlah LPM | 106 |
| | Jumlah KLP Binaan LPM | 424 |
| | Rata-rata Jumlah LPM | 4,00 |

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2. 84 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | 2009 | |
| | Jumlah PKK | 2.040 |
| | Jumlah KLP Binaan PKK | 4.962 |
| | Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK | 2,43 |
| 2 | 2010 | |
| | Jumlah PKK | 2.040 |
| | Jumlah KLP Binaan PKK | 5.042 |
| | Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK | 2,47 |
| 3 | 2011 | |
| | Jumlah PKK | 1.806 |
| | Jumlah KLP Binaan PKK | 6.008 |
| | Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK | 3,33 |
| 4 | 2012 | |
| | Jumlah PKK | 1.806 |
| | Jumlah KLP Binaan PKK | 3.716 |
| | Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK | 2,06 |
| 5 | 2013 | |
| | Jumlah PKK | 1.689 |

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| | Jumlah KLP Binaan PKK | 3.640 |
| | Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK | 2,15 |

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

Tabel 2. 85 PKK Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | Uraian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1 | 2009 | |
| | Jumlah PKK | 2.040 |
| | Jumlah PKK aktif | 1.836 |
| | % PKK Aktif | 90,00 |
| 2 | 2010 | |
| | Jumlah PKK | 2.040 |
| | Jumlah PKK aktif | 1.856 |
| | % PKK Aktif | 91,00 |
| 3 | 2011 | |
| | Jumlah PKK | 1.806 |
| | Jumlah PKK aktif | 1.662 |
| | % PKK Aktif | 92,00 |
| 4 | 2012 | |
| | Jumlah PKK | 1.806 |
| | Jumlah PKK aktif | 1.680 |
| | % PKK Aktif | 93,00 |
| 5 | 2013 | |
| | Jumlah PKK | 1.689 |
| | Jumlah PKK aktif | 1.680 |
| | % PKK Aktif | 100 |

Sumber: BPMPD Kabupaten Sidenreng Rappang;2014

W. Perpustakaan Dan Arsip

Pengelolaan Arsip dan Peningkatan SDM Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Berikut ini disajikan Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013.

Tabel 2. 86 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | BIDANG URUSAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|----|--------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 1 | Jumlah Perpustakaan | 116 | 157 | 126 | 15 | 11 | 425 |
| | a. SD/MI | 50 | 100 | 84 | 0 | 0 | 244 |
| | b. SMP/MTsN | 20 | 21 | 23 | 0 | 0 | 64 |
| | c. SMA/MA/SMK | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 35 |
| | d. SLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | e. Puskesmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | f. Desa/Kelurahan | 36 | 21 | 7 | 5 | 11 | 80 |
| 2 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 501 | 470 | 301 | 265 | 169 | 1706 |
| 3 | Jumlah Koleksi Buku | 798 | 206 | 299 | 1000 | 1015 | 3318 |

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2013

Dalam menjamin keselamatan arsip dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik. Dilihat dari perkembangan Pengelolaan Arsip secara baku di kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2012 mencapai 25, 00 % hingga pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 35, 00 % .

Tabel 2. 87 Perkembangan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| NO | BIDANG URUSAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|----|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Pengelolaan Arsip secara Baku | % | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 |
| 2 | Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan | Orang | 10 | 20 | 30 | 35 | 106 |

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan pengelolaan kearsipan yang handal dan profesional. Untuk itu dibutuhkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 2. 88 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013

| No | Bidang/Urusan | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Perpustakaan | 108 | 194 | 263 | 313 | 425 |
| 2 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | 169 | 265 | 301 | 470 | 501 |
| 3 | Jumlah Koleksi Buku | 1.000 | 2.030 | 3.035 | 3.950 | 4.545 |

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

X. Komunikasi Dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengawasan terhadap media dan pembangunan tower telekomunikasi. Sampai dengan tahun 2013 jumlah tower telekomunikasi sebanyak 81 buah. Selain itu telah dilakukan mobile pelayanan internet kecamatan juga telah dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian, Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 diperoleh angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 44,69 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2009 mengalami kontribusi sector pertanian sebesar 43,36 persen, tahun 2010 sebesar 42,79 persen, Tahun 2011 – 2012 meningkat menjadi 45,42 persen dan 45,49 persen, namun pada tahun 2013 mengalami perlambatan di angka 44,69 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya transformasi kontribusi pada sektor lain terutama sektor jasa-jasa.

Berikut ini dapat dilihat Tabel Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2009-2013.

Tabel 2. 89 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013

| No. | Sektor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pertanian | 43,36 | 42,79 | 45,42 | 45,49 | 44,69 |
| | • Tanaman Bahan Makanan | 32.06 | 31.70 | 35.44 | 36.00 | 35,34 |
| | • Tanaman Perkebunan | 5.79 | 5.55 | 4.83 | 4.53 | 4,41 |
| | • Peternakan | 4.22 | 4.30 | 4.02 | 3.88 | 3.87 |
| | • Kehutanan | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | • Perikanan | 1.25 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 1.03 |

Sumber : PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013.

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, Tanaman Bahan Makanan merupakan penyumbang terbesar selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari total presentase sektor pertanian, menyusul Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, sektor ini menjadi penentu dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2009-2013 lalu. Sejalan dengan itu pula, sektor ini masih menjadi tumpuan harapan dalam mendukung struktur perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun yang akan datang 2014-2018.

Tabel 2. 90 Tabel Perkembangan Produksi dan Luas Panen Komoditi Tanaman Pangan, Palawija, Hortikutura Tahun 2010-2013

| No. | Jenis Komoditas | Tahun | | | |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Padi | | | | |
| | Hasil Produksi (ton) | 326,063.02 | 418,778.56 | 454,947.00 | 461,617.45 |
| 2 | Jagung | | | | |
| | Hasil Produksi (ton) | 89,511.37 | 59,475.00 | 54,972.00 | 39,950.00 |
| 3 | Buah-buahan | | | | |
| | Hasil Produksi (ton) | 86,051.50 | 279,850.00 | 204,504.00 | 188,493 |
| 4 | Sayur-sayuran | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 479.00 | 420.00 | 441.00 | 406 |
| | Hasil Produksi (ton) | 11,233.00 | 12,103.00 | 12,600.00 | 31.260 |
| 5 | Ubi Jalar | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 72.00 | 65.00 | 177.00 | 33 |

| No. | Jenis Komoditas | Tahun | | | |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Hasil Produksi (ton) | 573.26 | 863.00 | 2,438.00 | 501 |
| 6 | Ubi Kayu | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 171.00 | 120.00 | 233.00 | 67 |
| | Hasil Produksi (ton) | 2,164.00 | 2,357.00 | 4,355.00 | 1.514 |
| 7 | Kacang Tanah | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 506.00 | 182.00 | 365.00 | 209 |
| | Hasil Produksi (ton) | 818.36 | 267.00 | 690.00 | 445 |
| 8 | Kacang Kedelai | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 97.00 | 440.00 | 99.00 | 34 |
| | Hasil Produksi (ton) | 134.44 | 778.00 | 145.02 | 42 |
| 9 | Kacang Hijau | | | | |
| | Luas Panen (HA) | 134.00 | 102.00 | 87.00 | 28 |
| | Hasil Produksi (ton) | 226.00 | 169.00 | 141.00 | 45 |

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang;2013.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi hasil produksi padi memperlihatkan tren peningkatan produksi dari tahun 2010-2012. Komoditi ini sangat besar peranannya dalam menjaga Nilai PDRB dan laju pertumbuhan perekonomian daerah di tahun-tahun mendatang. Jika komoditi ini gagal, perekonomian daerah ini dipastikan melambat. Demikian juga sebaliknya jika komoditi ini mengalami peningkatan produksi minimal 5% per tahun, dipastikan pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat. Untuk mendukung peningkatan kontribusi Tanaman Bahan Makanan dalam Sektor Pertanian, maka komoditi palawija (jagung dan kedelai) serta hortikultura akan terus dilakukan upaya peningkatan produksi melalui penyediaan program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. Berikut ini disajikan Data Pendukung Sektor Pertanian khususnya Tanaman Pangan dan Palawija selama kurun waktu 5 (lima) tahun. (*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan setelah diolah, 2014*)

Tabel 2. 91 Penggunaan Pupuk Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | JENIS PUPUK | Satuan | TAHUN | | | | |
|----|-------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Urea | Ton | 21,848.80 | 17,415.01 | 21,767.53 | 20,859.78 | 1,295,963.20 |
| 2 | Za | Ton | 2,049.00 | 1,990.70 | 3,896.47 | 3,914.02 | 3,490.00 |
| 3 | TSP/SP 36 | Ton | 1,172.20 | 1,797.55 | 3,929.68 | 7,565.98 | 3,383.00 |
| 4 | KCL | Ton | 40.00 | | | | |
| 5 | Organik | Ton | 10,251.61 | 3,227,827.30 | 13,136.07 | 15,286.10 | 635.50 |
| 6 | NPK | Ton | 2,585.85 | 1,738.65 | 7,053.55 | 112,635.78 | 7,654.35 |

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend penggunaan pupuk masih sangat fluktuatif selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Hal tersebut akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap Peningkatan Produksi serta Degradasi Lahan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama unsur kimia dan fisik tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus adalah dengan penerapan pupuk berimbang serta pemberian pupuk organik secara massal terhadap lahan persawahan. Tahun-tahun mendatang sudah saatnya dilakukan suatu penelitian secara bertahap terkait peta kesesuaian lahan terutama pada daerah sentra pengembangan komoditi pertanian padi.

Tabel 2. 92 Data Sebaran Penggilingan Padi Besar Selama Kurun Waktu Tahun 2009 -2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | DATA PENDUKUNG | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|----|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Penggilingan Beras(Unit) | | | | | | |
| • | Penggilingan Padi Besar (Unit) | Panca Lautang | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | Tellu LimpoE | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| | | Wattang Pulu | 20 | 5 | 6 | 6 | - |
| | | Baranti | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | | Panca Rijang | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| | | Kulo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | MaritengaE | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| | | Wattang Sidenreng | 15 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| | | Pitu Riawa | 9 | 2 | 6 | 7 | - |
| | | Dua PituE | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| | | Pitu Riase | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| | | (Jumlah) | 92 | 27 | 40 | 41 | 54 |
| • | Penggilingan Padi Kecil dan Sedang (Unit) | Panca Lautang | 16 | 15 | 5 | 5 | 22 |
| | | Tellu LimpoE | 21 | 23 | 18 | 18 | - |
| | | Wattang Pulu | 34 | 50 | 24 | 25 | - |
| | | Baranti | 42 | 50 | 25 | 27 | 51 |
| | | Panca Rijang | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| | | Kulo | 11 | 16 | 12 | 13 | 9 |
| | | MaritengaE | 15 | 27 | 19 | 19 | - |
| | | Wattang Sidenreng | 30 | 34 | 35 | 36 | 34 |
| | | Pitu Riawa | 28 | 35 | 34 | 34 | 32 |
| | | Dua PituE | 23 | 18 | 23 | 24 | 75 |
| | | Pitu Riase | 10 | 9 | 7 | 7 | 16 |
| | | (Jumlah) | 246 | 286 | 209 | 216 | 244 |
| • | Rice Milling (Unit) | Panca Lautang | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| NO | DATA PENDUKUNG | KECAMATAN | TAHUN | | | | |
|----|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | Tellu LimpoE | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| | | Wattang Pulu | 21 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| | | Baranti | 28 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| | | Panca Rijang | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | Kulo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | MaritengaE | 12 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | Wattang Sidenreng | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | | Pitu Riawa | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| | | Dua PituE | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| | | Pitu Riase | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| | | (Jumlah) | 129,00 | 46,00 | 75,00 | 76,00 | 78,00 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa, penggilingan padi dari semua skala hampir seluruhnya tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggilingan padi sangat diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Sektor Industri Pengolahan pada tahun-tahun mendatang. Jumlah gabah yang diproses melalui penggilingan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar daripada produksi padi daerah ini. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah mobil angkutan/truk yang memuat gabah masuk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sumbernya dari kabupaten tetangga antara lain; Kabupaten Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Luwu, Palopo dan Luwu Utara. Untuk mengoptimalkan produksi industri penggilingan dalam menjaga kualitas, kuantitas serta harga beras, telah terbangun beberapa *Sylo Dryer* yang dilakukan oleh sebagian pemilik penggilingan. Dalam mensinergikan peran masyarakat terhadap eksistensi penggilingan beras, pada Tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan membanguan suatu kawasan industri yang didalamnya terbangun gudang *Buffer Stock* beras yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara/resi gudang.

Tabel 2. 93 Data Perkembangan Perintisan Jalan Tani Selama Tahun 2009 -2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|----|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Panca Lautang | Meter | 1.000,00 | 4.546,00 | - | 2.035,00 | 1.817,08 |
| 2 | Tellu LimpoE | Meter | - | 4.500,00 | 1.000,00 | 444,00 | 1.879,00 |
| 3 | Watang Pulu | Meter | - | 7.858,00 | 4.100,00 | 2.792,00 | - |
| 4 | Baranti | Meter | - | 8.000,00 | 4.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Panca Rijang | Meter | - | 7.217,00 | 7.300,00 | 800,00 | 3.320,00 |
| 6 | Kulo | Meter | 1.000,00 | 9.011,00 | 4.800,00 | 1.366,00 | 908,00 |
| 7 | MaritengngaE | Meter | 1.000,00 | 7.618,00 | 3.408,00 | 3.506,88 | 1.020,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8 | Watang Sidenreng | Meter | - | 2.000,00 | 4.400,00 | 3.199,00 | 630,00 |
| 9 | Pitu Riawa | Meter | 1.000,00 | 11.853,00 | 1.652,39 | 6.929,40 | 2.720,00 |
| 10 | Dua PituE | Meter | - | 3.328,00 | 5.700,00 | 1.740,17 | 818,00 |
| 11 | Pitu Riase | Meter | - | 1.954,00 | 3.870,00 | - | - |
| | (Jumlah) | Meter | 4.000,00 | 67.885,00 | 40.630,39 | 23.812,45 | 14.112,08 |

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan setelah diolah, 2014.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung sektor pertanian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat petani dalam mengangkut sarana dan prasarana usahatani ketingkat lapang, maka dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2009-2013 telah terbangun jalan tani (Farm Road) sepanjang 14.112,08 Meter atau 141,12 Kilometer yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dampak daripada pembangunan jalan tani tersebut telah dirasakan oleh masyarakat petani, oleh karena berpengaruh terhadap ketepatan waktu penggunaan sarana produksi, tingginya frekuensi kunjungan ke lahan usahatani, memudahkan angkutan hasil produksi dan lain-lain. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadikan prioritas untuk dilakukan kegiatan pembangunan jalan tani.

Tabel 2. 94 Sebaran Perkembangan Alat Mekanisasi Pertanian Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|--------------------------|------------------|--------|-------|------|-----------|------------|------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Combine Harvester | Panca Lautang | Unit | - | - | - | 5 | 7 |
| | Tellu LimpoE | Unit | - | - | - | 10 | 15 |
| | Watang Pulu | Unit | - | - | - | - | 8 |
| | Baranti | Unit | - | - | - | 3 | 4 |
| | Panca Rijang | Unit | - | - | - | 1 | - |
| | Kulo | Unit | - | - | - | 1 | 10 |
| | MaritengaE | Unit | - | - | - | - | 52 |
| | Watang Sidenreng | Unit | - | - | 13 | 87 | 89 |
| | Pitu Riawa | Unit | - | - | - | 14 | 22 |
| | Dua PituE | Unit | - | - | - | 25 | 30 |
| | Pitu Riase | Unit | - | - | - | - | 3 |
| | (Jumlah) | Unit | - | - | 13 | 146 | 240 |
| Traktor Roda Dua | Panca Lautang | Unit | 309 | 309 | 311 | 317 | 319 |
| | Tellu LimpoE | Unit | 283 | 285 | 290 | 161 | 161 |
| | Watang Pulu | Unit | 302 | 302 | 306 | 324 | 324 |
| | Baranti | Unit | 810 | 810 | 810 | 485 | 509 |
| | Panca Rijang | Unit | 319 | 319 | 332 | 328 | 328 |

| NO | KECAMATAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Kulo | Unit | 356 | 356 | 367 | 423 | 446 |
| | MaritengaE | Unit | 638 | 638 | 638 | - | 346 |
| | Wattang Sidenreng | Unit | 473 | 473 | 578 | 955 | 1.027 |
| | Pitu Riawa | Unit | 945 | 945 | 985 | 749 | 763 |
| | Dua PituE | Unit | 348 | 348 | 348 | 215 | 350 |
| | Pitu Riase | Unit | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | (Jumlah) | Unit | 4.968 | 4.970 | 5.150 | 4.142 | 4.758 |
| | | Unit | | | | | |
| Traktor Roda Empat | Panca Lautang | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Tellu LimpoE | Unit | - | - | - | - | - |
| | Wattang Pulu | Unit | - | - | - | 1 | 1 |
| | Baranti | Unit | - | - | - | - | - |
| | Panca Rijang | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Kulo | Unit | - | - | - | - | - |
| | MaritengaE | Unit | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | Wattang Sidenreng | Unit | - | - | - | - | - |
| | Pitu Riawa | Unit | 18 | 18 | 18 | - | - |
| | Dua PituE | Unit | 7 | 7 | 7 | - | 29 |
| | Pitu Riase | Unit | - | - | - | - | 1 |
| | (Jumlah) | Unit | 40 | 40 | 40 | 14 | 44 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan, diolah, 2014

Alat Mekanisasi pertanian merupakan alat yang sangat penting peranannya dalam mendukung kegiatan usahatani masyarakat baik pada tingkat on-farm/pengolahan tanah maupun pasca panen/panen. Berdasarkan data perkembangan hand traktor menunjukkan jumlah yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Jika diasumsikan kemampuan olah tanah 15 Ha per hand traktor dalam setiap musim tanam dengan ketersediaan lahan persawahan yang mencapai hingga 43 Ribu Ha, maka jumlah hand traktor yang harus tersedia di tingkat usahatani sebanyak 6.450 Unit. Jumlah hand traktor pada Tahun 2013 mencapai 4.758 Unit, jumlah ini menunjukkan bahwa, hand traktor dalam mendukung percepatan olah tanah pada tingkat usahatani masih kurang yang diperkirakan mencapai 1.692 Unit.

Dalam upaya mendukung percepatan proses pasca panen dan mengurangi tingginya tingkat kehilangan hasil pada tingkat usahatani, sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang telah beroperasi alat mekanisasi pertanian pemotong padi yang jumlahnya telah mencapai 240 unit yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan. Keberadaan alat mekanisasi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan petani disatu sisi, sementara disisi lain mempengaruhi tingginya tingkat

pengangguran. Sehingga pada tahun-tahun mendatang perlu dirumuskan regulasi terhadap pemanfaatan alat mekanisasi dimaksud.

Komoditi Perkebunan

Tiga jenis komoditas tanaman perkebunan rakyat yang banyak ditemukan di daerah ini antara lain, kakao, jambu mete dan kelapa. Produksi kakao pada tahun 2013 mencapai 11.017,36 ton yang dipanen dari areal seluas 8.059,50 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan kakao produksi tanaman jambu mete dan kelapa mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2013 produksi jambu mete hanya mencapai 2.297,91 ton yang dipanen dari area seluas 4.074,31 Ha atau turun sebesar 66,55 persen dibanding tahun 2012 sekitar 3.452,69 ton. Sedangkan produksi kelapa mencapai 2.721,49 ton yang dipanen dari area seluas 1.922,26 Ha atau turun sebesar 44,03 persen.

B. Kehutanan

Di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dari total luas kawasan hutan sebesar 68.810 Ha, dimana luas hutan lindung sebesar 39.292,60 Ha. Hingga tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi Hutan Lindung sebesar 2.160 Ha, Hutan Produksi terbatas sebesar 495 ha dan Kebun Bibit Rakyat sebesar 7.876 Ha. Sementara luas Lahan Kritis sebanyak 31.213 Ha yang terbagi dalam dua kawasan, antara lain: Lahan Kritis Dalam Kawasan seluas 26.157 Ha serta Lahan Kritis Luar Kawasan dengan luas 5.056,00 Ha. Sedangkan Luas kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 350 Ha yang titik lokasinya di Desa Lampiring, Kecamatan Pitu Riase.

Tabel 2. 95 Luas Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Kebun Bibit Rakyat yang telah di rehabilitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2014

| No | Tahun | Hutan Lindung (Ha) | Hutan Produksi Terbatas HPT (Ha) | Kebun Bibit Rakyat KBR (Ha) | Ket |
|--------------|-------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 2010 | 110 | - | 2.500 | |
| 2 | 2011 | 400 | 95 | 3.125 | |
| 3 | 2012 | 500 | 125 | 938 | |
| 4 | 2013 | 550 | 275 | 1.313 | |
| 5 | 2014 | 600 | - | 437,5 | |
| Total | | 2.160 | 495 | 8.313,50 | |

Sumber : Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi, 2015

Peternakan Dan Perikanan

C. Peternakan

Kontribusi Peternakan dalam PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang pada sektor pertanian menunjukkan angka perkembangan cenderung menurun selama kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu

dari 4,22 persen Tahun 2009 menjadi 3,43 persen Tahun 2013. Meskipun demikian, peranan sub sektor peternakan pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat berperan lebih cepat dalam peningkatan kontribusi PDRB. Salah satu komoditi peternakan yang menjadi perhatian oleh pemerintah pusat yang rancangan Peraturan Presiden sementara disempurnakan yaitu penetapan Kawasan Strategis Nasional yang dapat membantu proses percepatan pencapaian target sasaran MP3EI melalui BP-KAPET Parepare adalah Pengembangan Agropolitan Sapi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang menjadi kekuatan besar dalam mendukung pengembangan agropolitan sapi adalah keberadaan PT. BULI (Persero) yang memiliki lahan HGU seluas 6.000 Ha, populasi sapi yang dikembangkan selama ini di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sampai pada tahun 2014 telah mencapai 49.960 ekor. Konsep Agropolitan Sapi menekankan pada peningkatan pendapatan melalui upaya dalam mendorong peningkatan nilai tambah antara lain; pemanfaatan tulang sapi, pemanfaatan kulit sapi dan lain-lain. Berikut ini data perkembangan populasi ternak selama kurun waktu 2010 - 2014.

Tabel 2. 96 Data Perkembangan populasi Ternak Tahun 2010 – 2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang (ekor)

| NAMA POPULASI | TAHUN | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sapi | 38.269 | 36.303 | 41.623 | 45.425 | 49.960 |
| Kerbau | 1.356 | 2.095 | 2.211 | 2.569 | 2.711 |
| Kuda | 1.061 | 1.056 | 1.077 | 1.072 | 630 |
| Kambing | 9.696 | 10.278 | 10.997 | 11.271 | 11.893 |
| Ayam buras | 1.150.586 | 1.185.504 | 1.304.055 | 1.517.236 | 1.558.960 |
| Ayam ras pedaging | 2.023.375 | 2.084.404 | 2.209.468 | 2.496.604 | 2.553.135 |
| Ayam ras petelur | 3.439.556 | 3.479.946 | 3.827.941 | 4.041.027 | 5.717.872 |
| Itik | 378.859 | 397.802 | 429.626 | 461.529 | 521.185 |

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2015

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan populasi ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat, kecuali ternak kuda memperlihatkan trend populasi menurun, pada tahun 2013 populasi mencapai 1.072 ekor menjadi 630 ekor pada tahun 2014. Khusus untuk ternak sapi dan unggas ayam petelur yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang, terus dipacu peningkatannya di tahun-tahun mendatang melalui dukungan program yang berkaitan dengan peningkatan populasi dan nilai tambah.

Tabel 2. 97 Data Perkembangan Produksi Peternakan Tahun 2009 – 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | PRODUKSI TELUR (Kg) | | | | | |
| | Ayam Ras | 22.288.323 | 22.550.050 | 24.805.058 | 30.550.164 | 59.037.028 |
| | Itik | 1.773.060 | 1.861.713 | 2.010.650 | 2.159.956 | 2.601.756 |
| | Ayam Buras/Lokal | 483.244 | 497.912 | 547.703 | 637.239 | 654.763 |
| 2. | PRODUKSI DAGING (Kg) | | | | | |
| | Sapi Potong | 280.144 | 616.091 | 689.411 | 706.678 | 734.079 |
| | Kambing | 26.775 | 25.335 | 26.498 | 18.645 | 12.593 |
| | Ayam | | | | | |
| | - Petelur | 448.862 | 454.133 | 499.546 | 527.354 | 746.182 |
| | - Pedaging | 880.168 | 906.716 | 961.119 | 1.086.023 | 1.110.614 |
| | - Buras | 433.769 | 446.953 | 491.629 | 571.998 | 587.728 |
| - Itik | 147.755 | 155.143 | 167.554 | 179.996 | 203.262 | |

Sumber : Data Dinas Peternakan & Perikanan Tahun 2013

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkembangan produksi peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2010-2014 cenderung meningkat, kecuali ternak kambing memperlihatkan trend yang fluktuatif, akan tetapi jika dibandingkan populasi ternak kambing pada tahun 2010 dengan populasi 9.696 ekor mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 11.893 ekor.

Perikanan

Tabel 2. 98 Data Perkembangan Luas Area Budidaya Perikanan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| NAMA AREA BUDI DAYA | LUAS AREA BUDI DAYA PERIKANAN (Ha) | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| KOLAM | 148,04 | 333,96 | 364,48 | 374,53 | 382,84 |
| MINA PADI | 237,44 | 266,31 | 268,46 | 218,46 | 224,96 |
| JUMLAH | 385,31 | 600,27 | 632,94 | 592,99 | 607,8 |

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2013

Pengembangan Budidaya Kolam memperlihatkan tren peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2009 luas area pengembangannya 148,04 Ha meningkat menjadi 382,84 Ha pada tahun 2013. Sementara luas area Budidaya Mina Padi mengalami penurunan luas area. Pada tahun 2009 luas area mencapai 237,44 Ha menjadi 224,96 Ha pada Tahun 2013.

Tabel 2. 99 Data Perkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Tahun 2009-2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| KECAMATAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|-------------|-------|------|------|------|------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Maritenggae | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 |

| KECAMATAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|------------------|-------|------|------|------|------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Watang pulu | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Panca lautang | - | - | - | - | - | |
| Tellu limpoe | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Baranti | 11 | - | 1 | 1 | - | 13 |
| Kulo | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
| Panca rijang | 3 | 7 | - | 3 | 1 | 14 |
| Watang sidenreng | - | - | - | - | - | |
| Pitu riawa | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Dua pitue | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Pitu riase | - | - | - | - | - | |
| | 27 | 9 | 5 | 6 | 5 | 52 |

Sumber data : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2013.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, minat masyarakat terhadap pengembangan Budidaya Ikan masih sangat rendah, terlihat dari tren perkembangan kelompok pembudidaya rata-rata terbentuk 6 (enam) kelompok. Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok pembudidaya tahun 2009 ke tahun 2013 mengalami peningkatan 25 Kelompok Pembudidaya Ikan. Tahun-tahun mendatang, akan terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan sosialisasi agribisnis budidaya ikan. Dengan cara itu, dapat membantu mempercepat peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan ikan.

Tabel 2. 100 Data Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap 2010-2014 di Kabupaten Sidenreng Rappang

| PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP | | |
|----------------------------|-------|----------------|
| NO | TAHUN | PRODUKSI (TON) |
| 1 | 2010 | 727,6 |
| 2 | 2011 | 321,6 |
| 3 | 2012 | 2231,93 |
| 4 | 2013 | 2790,66 |
| 5 | 2014 | 2890,40 |

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan, 2013

Berdasarkan Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan produksi perikanan tangkap meningkat sangat signifikan, jika dibandingkan hasil produksi pada tahun 2010 yaitu 727,6 Ton mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.890,40 Ton. Untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan di Danau Sidenreng sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir danau, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus melakukan upaya penambahan populasi ikan di tahun-tahun mendatang.

D. Perindustrian Dan Perdagangan

Perindustrian

Kontribusi sektor Industri Olahan dalam Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2012 sebesar 5,60 persen. Angka persentase tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 yaitu 5,54 persen. Industri Olahan diharapkan mendorong percepatan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru

Tabel 2. 101 Perkembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 – 2012

| Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Perusahaan | 3.771 | 3.833 | 3.997 | 3.981 | 4.018 |
| Tenaga Kerja | 11518 | 11876 | 12.297 | 12.716 | 12.811 |
| Nilai Output (Miliar Rp) | 31.214.484 | 35.123.993 | 47.082.935 | 42.801.622 | 47.088.952 |
| Nilai Bahan Baku (Miliar Rp) | 17.771.113 | 19.942.796 | 21.038.876 | 20.313.148 | 21.924.096 |
| Investasi (Miliar Rp) | 14.076.392 | 15.997.280 | 18.321.104 | 17.990.955 | 18.827.104 |

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2013

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, Selama kurun waktu 2008 – 2012 jumlah perusahaan industri cenderung mengalami peningkatan. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2008 mencapai 3,771 perusahaan, tahun 2009 meningkat menjadi 3.833 perusahaan, tahun 2010 meningkat menjadi 3,997 perusahaan, tahun 2011 naik lagi menjadi 4,018 perusahaan.

Nilai output yang diperoleh dari perusahaan industri selama tahun 2012 sebesar 47.088.952miliar rupiah, meningkat bila dibanding dengan nilai yang diperoleh pada tahun 2011 sebesar 42.801.622 miliar rupiah. Sedangkan untuk nilai bahan baku yang mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 7.35 persen.

Tabel 2. 102 Data Perkembangan Industri

| No | Jenis Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Niali Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Nilai 000) |
|----|--|------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| I | Industri Kimia & hasil hutan | | | | |
| 1 | Pengolahan dan pengawetan daging | 7 | 21 | 480.605 | 265.250 |
| 2 | Pengupasan bijian/Jambu Mete | 180 | 418 | 1.750.000 | 1.818.000 |
| 3 | Pengupasan dan Pembersihan Kacang kacang | 10 | 37 | 295.500 | 501.800 |
| 4 | Tepung Beras | 17 | 45 | 71.500 | 185.750 |
| 5 | Ransum Makanan Ternak | 55 | 120 | 510.545 | 5.315.000 |
| 6 | Konsentrat | 5 | 23 | 490.225 | 778.500 |
| 7 | Roti | 20 | 65 | 157.755 | 597.500 |
| 8 | Gula Merah | 599 | 1 630 | 125.900 | 1.710 .000 |
| 9 | Es Batu/Balok | 3 | 10 | 126.500 | 106.600 |
| 10 | Garam Beryodium | 3 | 12 | 40.005 | 284.000 |

| No | Jenis Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Niali Investasi (Rp.000) | Nilai Produksi (Nilai 000) |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 11 | Minuman Ringan | 12 | 50 | 1.571.953 | 182.050 |
| 12 | Penggerjajian Kayu | 40 | 163 | 1.754.406 | 1.850.000 |
| 13 | Pengolahan Rotan dan Bambu | 36 | 76 | 84.200 | 153.900 |
| 14 | Kuseng Bangunan | 30 | 165 | 1.900.800 | 1.655.700 |
| 15 | Pengolahan Rotan dan Bambu | 36 | 76 | 84.200 | 153.900 |
| 16 | Kuseng Bangunan | 30 | 165 | 1.900.800 | 1.655.700 |
| 17 | Rak telur | 1 | 38 | 185.120 | 281.250 |
| 18 | Percetakan | 38 | 98 | 466.500 | 1.754.000 |
| 19 | Industri Pupuk Alam Organik | 6 | 300 | 960.000 | 5.800.000 |
| 20 | Vulkanisir Ban | 5 | 10 | 32.100 | 68.550 |
| 21 | Gerabah | 155 | 420 | 28.390 | 79. 263 |
| 22 | Batu Bata | 350 | 2 751 | 755.000 | 2.989. 000 |
| 23 | Loster,Buis beton, Paving block | 9 | 45 | 103.500 | 139.030 |
| 24 | Pemahat batu | 110 | 415 | 268.804 | 690. 800 |
| 25 | Marmmer,granit dan batu lainnya | 3 | 9 | 209 000 | 18. 840 |
| 26 | Industri furniture dari kayu | 132 | 635 | 768.300 | 1.798.000 |
| Jumlah (I) | | 1.826 | 7.556 | 13.136.248 | 29.022.783 |
| II | Industri Logam, Mesin,Elektronik dan aneka | | | | |
| 1 | Pemintalan Sutera | 79 | 201 | 173.498 | 41.500 |
| 2 | Pertununan sutera | 1.256 | 2.230 | 445.498 | 877. 500 |
| 3 | Tali temali | 55 | 86 | 18.305 | 2. 975 |
| 4 | Sulam sulaman/Bordir | 9 | 21 | 46.163 | 64. 500 |
| 5 | Barang tekstil jadi | 251 | 693 | 559.000 | 1.975.550 |
| 6 | Rekaman suara | 2 | 10 | 9.140 | 74.500 |
| 7 | Barang logam siap pasang | 49 | 209 | 589.500 | 987. 550 |
| 8 | Pandai besi | 210 | 769 | 696. 958 | 3.757.550 |
| 9 | Mesin/alat pertanian | 10 | 65 | 497.372 | 598.800 |
| 10 | Reparasi mesin/alat pertanian | 31 | 169 | 292.600 | 524.000 |
| 11 | Oven kue/kompor | 3 | 13 | 20.604 | 44 .490 |
| 12 | Karoseri mobil dari kayu | 11 | 66 | 88.250 | 499.500 |
| 13 | Ind Furniture dari logam | 14 | 36 | 149.000 | 1.806.500 |
| 14 | Perhiasan logam emas | 33 | 122 | 466.019 | 2.278.550 |
| 15 | Perhiasan logam bukan emas | 31 | 62 | 157.550 | 182.600 |
| 16 | Reparasi mesin mobil | 21 | 82 | 180.500 | 380.564 |
| 17 | Reparasi mesin motor | 75 | 290 | 385.250 | 329.550 |
| 18 | Reparasi radio/TV/Computer,printer/kulkas | 15 | 36 | 79.500 | 72.200 |
| Jumlah (II) | | | 2.115 | 5.160 | 4.854.707 |
| Jumlah (I) + (II) | | | 3.981 | 12.716 | 17. 990.955 |

Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto menempati urutan ketiga setelah sektor Pertanian dan Jasa-Jasa. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang.Pada tahun 2012 Jumlah surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terbitkan sebanyak 378 buah yang terdiri dari Perdagangan

Kecil (PK) sebanyak 140 buah, Perdagangan Menengah (PM) sebanyak 198 buah dan Perdagangan Besar (PB) sebanyak 40 buah dengan Total Tenaga Kerja sebanyak 1.587 orang dan Modal mencapai 132,30 Milyar. Sektor ini terus didorong dalam pemenuhan administrasi perizinan melalui pembinaan dan sosialisasi.

E. Ketrasmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya tingkat pengangguran. Kesepakatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 1995 sampai tahun 2009 sudah mencapai 8 UPT dan jumlah KK yang diserahkan pada tahun 2009 sebesar 100 KK.

Tabel 2. 103 Data Ketrasmigrasian

| No. | Uraian/UPT | Kecamatan | Tahun Penempatan | Jumlah KK | KET. |
|-----|------------|------------|------------------|-----------|---|
| 1. | Lombok I | Pitu Riase | 1995 | 200 | Sudah diserahkan ke Pemda 12 April 2000 |
| 2. | Betao I | Pitu Riawa | 1995 | 215 | 3 Desember 2000 |
| 3. | Lombok II | Pitu Riase | 1996 | 220 | 2001 |
| 4. | Betao II | Pitu Riawa | 1997 | 200 | 2002 |
| 5. | Betao III | Pitu Riawa | 1997 | 290 | 2002 |
| 6. | Lampiring | Pitu Riase | 1998 | 200 | 2003 |
| 7. | Lombok III | Pitu Riase | 1997 | 170 | 2001 |
| 8. | Tana Toro | Pitu Riase | 2001 | 100 | Masih dalam Pembinaan |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;2013

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, pengeluaran per kapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan perekonomian yang terus membaik sehingga mampu mendorong pendapatan masyarakat. Untuk melihat Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentasenya mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 104 Persentase Konsumsi Pangan & Non Pangan

| No | Tahun | Pengeluaran Perkapita | Persentase Konsumsi Makanan Pangan & Non Pangan (%) | |
|----|-------|-----------------------|---|--------------------|
| | | | Makanan Pangan | Makanan Non Pangan |
| 1. | 2008 | 424.367 | 56.92 | 43.08 |
| 2. | 2009 | 417.137 | 62.23 | 37.77 |
| 3. | 2010 | 388.562 | 59.62 | 40.38 |
| 4. | 2011 | 537.032 | 54.52 | 45.48 |
| 5. | 2012 | 567.121 | 45.99 | 54.01 |

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2013.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/pangan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2008-2012 memperlihatkan trend persentase penurunan kecuali pada tahun 2009 mengalami peningkatan persentase jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 sampai pada tahun 2011, persentase pengeluaran konsumsi pangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi non pangan. Hal ini menunjukkan bahwa, pengeluaran perkapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang masih memprioritaskan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Pada tahun 2012 persentase pengeluaran perkapita memperlihatkan angka persentase terbalik jika dibandingkan tahun 2011, dimana persentase pengeluaran makanan pangan lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi non pangan. Perubahan persentase tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2008 dan 2012. Pada tahun 2008 persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan mencapai 43,08%, dan pada tahun 2012 mencapai 54,01% sekaligus merupakan awal perubahan persentase lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten sidenreng rappang semakin membaik. Telah terjadi pergeseran pengeluaran dari pengeluaran kebutuhan primer/pokok menjadi kebutuhan sekunder bahkan sebagian masyarakat telah berada pada level pengeluaran lebih tinggi dari itu.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Luas Wilayah Terkena Banjir

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya disebabkan oleh luapan danau sidenreng, sehingga titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang

wilayah administratifnya berada di sekitar danau sidenreng dan wilayah kecamatan Dua Pitue diakibatkan luapan sungai Tanru Tedong. Selain itu berdasarkan data Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditinjau dari segi luas genangan bahwa masih ada sekitar 32,4% dari total luas genangan sebesar 1.455 Ha di areal permukiman yang terjadi banjir secara rutin.

Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Umum pada Tahun 2009 sebanyak 30.740 orang, dan pada Tahun 2013 sebanyak 667.440 orang. Dalam tabel berikut ini disajikan kinerja perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2013:

Tabel 2. 105 Data Perhubungan Tahun 2009 – 2013 Kab Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Jumlah arus penumpang umum | 30740 | 32340 | 558000 | 651600 | 667440 |
| 2. | Jumlah izin trayek | 2866 | 3600 | 2619 | 2596 | 2537 |
| 3. | Pengujian Kelayakan angkutan umum | - | 3477 | 3589 | 3626 | - |
| 4. | Tingkat kepemilikan/ kelulusan keur angkutan umum | 2871 | 3471 | 3588 | 2626 | 3619 |
| 5. | Jumlah kendaraan umum melalui terminal | 287000 | 240000 | 213500 | 179500 | 137600 |
| 6. | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 110 | - | - | 6 | - |

Sumber :Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2. 106 Daftar Izin Yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | JENIS PELAYANAN | WAKTU PROSES PELAYANAN |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Izin Mandirikan Bangunan (IMB) | 3 Hari |
| 2. | Izin Gangguan Tempat Usaha | 3 Hari |
| 3. | Izin Pemasangan Reklame | 3 Hari |
| 4. | Trayek Angkutan Kota | 1 Hari |
| 5. | Izin Usaha Perikanan | 1 Hari |

| NO | JENIS PELAYANAN | WAKTU PROSES PELAYANAN |
|-----|---|------------------------|
| 6. | Izin Usaha Peternakan | 3 Hari |
| 7. | Izin Usaha Pertanian | 7 Hari |
| 8. | Izin Usaha Konstruksi | 3 Hari |
| 9. | Izin Penelitian | 30 menit |
| 10. | Izin Kegiatan | 2 Hari |
| 11. | Izin Rumah Bersalin | 15 Hari |
| 12. | Izin Balai Pengobatan | 15 Hari |
| 13. | Izin Pendirian Apotek dan Toko Obat | 15 Hari |
| 14. | Izin Usaha Pertambangan | 7 Hari |
| 15. | Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu | 7 Hari |
| 16. | Izin Usaha Perdagangan | 3 Hari |
| 17. | Tanda Daftar Perusahaan | 3 Hari |
| 18. | Tanda Daftar Gudang | 3 Hari |
| 19. | Tanda Daftar Industri | 3 Hari |

Sumber : Kantor PTSP Sidenreng Rappang, 2014

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, transparansi terhadap waktu penyelesaian mulai dari proses sampai penerbitan setiap perizinan yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipublikasikan kepada seluruh masyarakat luas. Informasi ini sangat penting dalam mendorong minat masyarakat untuk melengkapi perizinannya sesuai dengan kebutuhan baik skala perorangan, kelompok maupun usaha. Batas Waktu Proses di atas, setelah administrasi pendukung yang menjadi persyaratan telah dipenuhi.

Tabel 2. 107 Jenis-Jenis Retribusi Pendapatan Asli Daerah

| No. | Jenis Retribusi | SKPD Pengelola |
|-----|-----------------|----------------|
| 1 | Pajak Daerah | |
| 1.1 | Pajak Hotel | Dispenda |
| 1.2 | Pajak Restoran | Dispenda |
| 1.3 | Pajak Hiburan | Dispenda |
| 1.4 | Pajak reklame | Dispenda |

| No. | Jenis Retribusi | SKPD Pengelola |
|------------|---|-----------------------------------|
| 1.5 | Pajak penerangan jalan | Dispenda |
| 1.6 | Pajak air bawah tanah | Dispenda |
| 1.7 | Pajak mineral bukan logam dan batuan | Dispenda |
| 1.8 | BPHTB | Dispenda |
| 2 | Retribusi Daerah | |
| <u>2.1</u> | <u>Retribusi jasa umum</u> | |
| 2.1.1 | Retribusi jasa pelayanan kesehatan | |
| 2.1.1.a | <i>-pelayanan kesehatan di puskesmas</i> | Dinas Kesehatan |
| 2.1.1.b | <i>-Pelayanan kesehatan RSUD Nene mallomo</i> | RSUD Nene Mallomo |
| 2.1.1.c | <i>-Pelayanan kesehatan RSUD Arifin Nu'mang</i> | RSUD Arifin Nu'mang |
| 2.1.2 | Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 2.1.3 | Retribusi penggantian biaya KTP/ akte capil | Dinas Kependudukan & Capil |
| 2.1.4 | Retribusi tempat parkir tepi jalan umum | Dinas Perhubungan |
| 2.1.5 | Pengujian kendaraan bermotor | Dinas Perhubungan |
| 2.1.6 | Retribusi pengendalian menara telekomunikasi | Dinas Perhubungan |
| <u>2.2</u> | <u>Retribusi Jasa Usaha</u> | |
| 2.2.2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | |
| 2.2.2.a | <i>-Retribusi hasil pengolahan traktor besar</i> | Dinas Pertanian/perkebunan |
| 2.2.2.b | <i>-Retribusi pemakaian kekayaan daerah Bina Marga</i> | Dinas Bina Marga |
| 2.2.2.c | <i>-Retribusi rumah potong hewan</i> | Dinas Peternakan & Perikanan |
| 2.2.2.d | <i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i> | BPKD |
| 2.2.2.e | <i>-Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos</i> | Perwakilan |
| 2.2.2.f | <i>-Penjualan hasil pertanian</i> | Badan Penyuluh & Ketahanan Pangan |
| 2.2.3 | Retribusi Pasar | Dispenda |
| 2.2.4 | Retribusi terminal | Dinas Perhubungan |
| 2.2.5 | Retribusi tempat khusus parkir | Dinas Perhubungan |
| 2.2.6 | Retribusi tempat rekreasi/olahraga | Dinas Pemuda & Olahraga |
| 2.2.7 | Retribusi penjualan produksi usaha daerah | |
| 2.2.7.a | <i>-BBI Passeno</i> | Dinas Peternakan & Perikanan |
| 2.2.7.b | <i>-BBI Majjelling</i> | Dinas Peternakan & Perikanan |
| 2.2.7.c | <i>-BBI Pangkajene</i> | Dinas Peternakan & Perikanan |
| 2.2.7.d | <i>-BBI Kalosi</i> | Dinas Peternakan & Perikanan |
| 2.2.8 | Retribusi Penerimaan alat berat | Dinas PSDA |
| <u>2.3</u> | <u>Retribusi perizinan tertentu</u> | |
| 2.3.1 | Retribusi izin mendirikan bangunan | Dinas Cipta Karya & Tata Ruang |

| No. | Jenis Retribusi | SKPD Pengelola |
|-------|-------------------------|------------------------|
| 2.3.2 | Retribusi izin gangguan | Badan Lingkungan Hidup |
| 2.3.3 | Retribusi izin trayek | Dinas Perhubungan |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah, 2014

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan retribusi, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 12,50%, dengan realisasi 63,61% dengan nilai 162.83 Milyar dari target 225,98 Milyar. Rendahnya realiasi PAD dari Target disebabkan karena pemberlakuan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Sebagian sumber pendapatan Asli Daerah bertentangan dengan amanah undang-undang. Pada Tahun 2012 dan 2013, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah merevisi beberapa Peraturan Daerah dan mempersiapkan/menerbitkan Peraturan Daerah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 108 Angka Kriminalitas

| No. | Jumlah Tindak Kriminal | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Kasus Narkoba | Kasus | 31 | 37 | 53 | 83 |
| 2 | Jumlah Kasus Pembunuhan | Kasus | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Jumlah Kasus Seksual | Kasus | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | Jumlah Kasus Penganiayaan | Kasus | 117 | 66 | 61 | 62 |
| 5 | Jumlah Kasus Pencurian: | Kasus | 140 | 84 | 66 | 87 |
| | Curas | Kasus | 5 | 1 | 1 | 2 |
| | Curat | Kasus | 31 | 35 | 25 | 18 |
| | Curanmor | Kasus | 47 | 30 | 28 | 33 |
| | Curwan | Kasus | 6 | 5 | 1 | 1 |
| | Curi Biasa | Kasus | 51 | 13 | 11 | 33 |
| 6 | Jumlah Kasus Penipuan | Kasus | 50 | 18 | 14 | 13 |
| 7 | Jumlah kasus Pemalsuan Uang | Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 348 | 210 | 205 | 248 |
| No. | Jumlah Tindak Kriminal yang Tertangani | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Jumlah Kasus Narkoba | Kasus | 40 | 41 | 82 | 75 |
| 2 | Jumlah Kasus Pembunuhan | Kasus | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | Jumlah Kasus Seksual | Kasus | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | Jumlah Kasus Penganiayaan | Kasus | 75 | 44 | 33 | 33 |
| 5 | Jumlah Kasus Pencurian | Kasus | 68 | 45 | 34 | 43 |
| | Curas | Kasus | 6 | 1 | 0 | 3 |
| | Curat | Kasus | 23 | 19 | 19 | 12 |
| | Curanmor | Kasus | 10 | 8 | 8 | 10 |
| | Curwan | Kasus | 3 | 4 | 0 | 0 |

| No. | Jumlah Tindak Kriminal | Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|-----------------------------|--------|------|------|------|------|
| | Curi Biasa | Kasus | 26 | 13 | 7 | 18 |
| 6 | Jumlah Kasus Penipuan | Kasus | 26 | 11 | 10 | 11 |
| 7 | Jumlah kasus Pemalsuan Uang | Kasus | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | 217 | 147 | 172 | 163 |

Sumber: Data Polres Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa, tingkat kriminilitas di Kabupaten Sidenreng Rappang fluktuatif selama kurun waktu Tahun 2011 – 2014. Kasus yang memperlihatkan trend peningkatan adalah kasus Narkoba, pada tahun 2011; 31 kasus, tahun 2012; 37 kasus, Tahun 2013; 53 kasus dan Tahun 2014; 83 kasus. Sementara kasus pembunuhan, penganiayaan, seksual, pencurian, dan penipuan cenderung fluktuatif. Kasus yang dapat menjadi ancaman pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mendorong kegiatan investasi adalah kasus pembunuhan, penipuan, pencurian dan penganiayaan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek daya saing daerah dalam hal sumber daya manusia (SDM) akan mengukur kemampuan sumber daya saing daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang secara kualitas dan kuantitas cukup kompetitif, dan punya nilai khas bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang. Daya saing kualitas sumber daya manusia adalah salah satu kunci keberhasilan program-program pembangunan di daerah.

Indikator Pendidikan

Terkait dengan aspek daya saing sumber daya manusia, angka kependidikan yang terdiri atas angka melek huruf, angka pendidikan yang ditamatkan penduduk dan angka partisipasi menurut kelompok umur adalah instrumen untuk menilai aspek daya saing suatu daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 109 Tabel Indikator Pendidikan Tahun 2009 – 2013

| No | URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Angka Melek huruf : | 85,71 | 88,32 | 89,77 | 89,90 | 90,25 |
| | ▪ Laki-laki | 89,35 | 91,29 | | | |
| | ▪ Perempuan | 82,07 | 85,35 | | | |
| 2 | Pendidikan yang ditamatkan penduduk usia di atas 10 tahun : | | | | | |
| | ▪ Tidak/belum tamat SD | 35,93 | 29,57 | 35,39 | 21,48 | 26,90 |
| | ▪ Tamat SD | 28,41 | 31,59 | 28,79 | 35,21 | 30,67 |
| | ▪ Tamat SLTP | 16,80 | 17,36 | 15,81 | 20,74 | 17,57 |
| | ▪ Tamat SMU/SMA Kejuruan | 15,00 | 16,78 | 15,29 | 16,51 | 19,02 |

| No | URAIAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ▪ Tamat Diploma I/II | 0,41 | 0,39 | 0,09 | 0,36 | 0,65 |
| | ▪ Tamat Diploma III/Sarjana Muda | 0,73 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,67 |
| | ▪ Tamat Diploma IV/S1/S2/S3 | 2,72 | 3,42 | 3,83 | 4,99 | 4,52 |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah : | | | | | |
| | ▪ 7 – 12 tahun | 95,50 | 95,57 | 96,49 | 98,40 | 99,27 |
| | ▪ 13 – 15 tahun | 77,23 | 76,58 | 84,68 | 91,60 | 84,16 |
| | ▪ 16 – 18 tahun | 57,63 | 48,12 | 51,03 | 58,85 | 58,09 |
| | ▪ 19 – 24 tahun | | | | 23,61 | 30,43 |

Sumber Data : Susenas BPS Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013

Data menunjukkan bahwa untuk angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 kenaikan sebesar 3,05 tahun 2011 sebesar 1,64 dan pada tahun 2012 kenaikannya sebesar 0,14. Apabila dirata-ratakan sebesar 1,31 pertahunnya. Untuk potensi sumber daya manusia menurut pendidikan yang ditamatkan penduduk diatas 10 tahun masih didominasi oleh penduduk yang tidak tamat sekolah dasar, lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah baik pertama dan atas. Lulusan sekolah menengah kejuruan yang merupakan tenaga kerja siap pakai keluarannya masih sekitar 30,6 persen daripada keluaran sekolah menengah tingkat atas yang tidak dipersiapkan secara maksimal untuk siap pakai di berbagai lapangan pekerjaan.

Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menerus melalui sosialisasi dan upaya lain oleh SKPD terkait lebih memotivasi dan mengarahkan lulusan sekolah menengah pertama sederajat untuk lebih condong melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah kejuruan. Disamping melaksanakan dan menindaklanjuti program nasional untuk memaksimalkan lulusan sekolah kejuruan juga selaras dengan program pendidikan gratis pemerintah propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang serta menekan jumlah pengangguran dengan ketersediaan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan yang memiliki daya saing.

Selain itu, lulusan diploma I dan II juga terlihat minim jumlah, sementara kita ketahui bersama bahwa keluaran diploma I dan II juga dipersiapkan menurut sistem akademik sebagai tenaga siap pakai. Hal ini telah ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai tantangan dan peluang dengan berusaha menghadirkan akademi komunitas ilmu-ilmu pertanian setingkat diploma II dikabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 ini.

Pengelompokan umur angka partisipasi sekolah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk kelompok umur 16-18 tahun atau usia sekolah menengah tingkat atas pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan namun pada tahun 2010-2012 berturut-turut meningkat menjadi 58,85 persen dan mengalami pelambatan sekitar 58,09 persen di tahun 2013. Pada tahun 2009 sampai 2011 belum tersedia data untuk kelompok umur 19-24 atau untuk usia pendidikan tinggi, barulah pada tahun 2012 dan 2013 telah tersedia data sebesar 23,61 persen dan 30,43 persen.

Untuk melengkapi keadaan SDM menurut jenjang pendidikan, berikut ini juga disajikan tabel persentase penduduk yang bekerja menurut pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 110 Persentase penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan Tahun 2014

| Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan (%) | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----|---------|---------|
| SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Diploma | Sarjana |
| 51 | 17 | 15 | 5 | 2 | 7 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

Terlihat bahwa sebagian besar penduduk kabupaten Sidenreng Rappang yang bekerja masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar sederajat yaitu 51 persen atau separuh dari jumlah penduduk yang berkerja. Menyusul lulusan sekolah menengah pertama sederajat sebesar 17 persen, lulusan sekolah menengah atas 15 persen. Selebihnya adalah lulusan SMK sebesar 5 persen, lulusan diploma akademi atau perguruan tinggi sebesar 2 persen atau terkecil jumlahnya dan untuk sarjana dalam hal termasuk S1, S2 dan S3 sekitar 7 persen.

Hal ini menjadin tantangan bagi pemerintah daerah melalui program dan kegiatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan mempersiapkan masyarakat dengan ilmu dan keterampilan sebagai modal mencari lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja.

Terkait dengan kemampuan baca tulis juga menjadi aspek yang berhubungan dengan kedua tabel diatas serta dilengkapi dengan data angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja serta data bukan angkatan kerja berikut ini :

Tabel 2. 111 Tabel Keadaan Penduduk berdasarkan Kemampuan Baca Tulis, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014

| Tingkat kependaian Membaca & menulis | | Angkatan kerja | | Bukan angkatan kerja | | |
|---|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Dapat Membaca & Menulis | Buta Huruf | Bekerja | Tidak Bekerja | Bersekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya |
| 248.343 | 4.514 | 101.589 | 7.347 | 12.038 | 52.218 | 17.037 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014.

Dari jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 277.451 jiwa sebanyak 248.343 jiwa telah dapat membaca dan menulis artinya telah bebas buta huruf latin sebanyak 89,5 persen, tersisa 4.514 jiwa atau 10,5 persen yang belum dapat membaca dan menulis yang umumnya adalah golongan lanjut usia. Untuk angkatan kerja sebanyak 101.589 jiwa yang bekerja atau sebesar 92,77 persen dan sebanyak 7.347 jiwa angkatan kerja yang tidak bekerja atau 7,23 persen dari keseluruhan angkatan kerja tahun 2012. Sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja dikelompokkan dalam penduduk

yang masih bersekolah atau usia sekolah sebanyak 12.038 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak 52.218 jiwa dan kelompok lainnya sebanyak 17.037 jiwa.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Selain indikator kependidikan, aspek daya saing daerah lainnya adalah rasio ketergantungan atau dependency ratio suatu daerah. Angka dependency ratio menunjukkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Angka dependency ratio tahun 2013 sebesar 55,79 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 orang penduduk usia tidak produktif. Berikut ini tersaji angka rasio ketergantungan tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 2. 112 Tabel Rasio Ketergantungan Tahun 2009 – 2013

| NO. | KELOMPOK UMUR | TAHUN | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 0-14 Tahun | 76,092 | 79,832 | 81,974 | 81,465 | 83.196 |
| 2 | 15-64 Tahun | 162,802 | 174,550 | 177,188 | 178,103 | 181.854 |
| 3 | 65 Tahun Ke Atas | 13,491 | 17,514 | 15,490 | 17,883 | 18.257 |
| Rasio Ketergantungan | | 55.03 | 55.77 | 55.01 | 55.78 | 55,79 |

Sumber data : SP 2010 dan Susenas BPS Tahun 2011, 2012 dan 2013.

Untuk mengetahui ratio ketergantungan suatu daerah maka jumlah penduduknya dibagi atas tiga kelompok umur, yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebagai kelompok pertama. Berikutnya kelompok umur 15-64 tahun sebagai kelompok kedua dan ketiga adalah kelompok umur 65 tahun keatas. Jumlah kelompok umur paling besar adalah kelompok umur 15 sampai 64 tahun atau kelompok umur usia produktif yaitu mulai 162.802 sampai 181.854 jiwa. Selanjutnya kelompok umur 0 sampai 14 tahun sebagai kelompok tidak produktif pada angka 76.092 sampai 83.196 jiwa atau kurang lebih 45 persen dari kelompok umur usia produktif. Dan yang terakhir adalah kelompok umur 65 tahun keatas yang juga digolongkan sebagai kelompok usia tidak produktif sebanyak 13.491 sampai 18.257 jiwa atau kurang lebih 10 persen dari jumlah penduduk usia produktif. Jumlah ketiga kelompok umur tersebut menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPDP Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPDP sampai tahun 2015 dan realisasi terhadap RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya, kegiatan yang bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat

lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK, kurangnya staf yang ahli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di berbagai SKPD sehingga menghambat kelancaran kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target, sebagai contoh Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Evaluasi Kegiatan dari yang direncanakan sebanyak 5 dokumen, dapat terealisasi 7 dokumen dengan tambahan dokumen berupa penyusunan dokumen Renja, dan Renja Perubahan. Serta beberapa dokumen lainnya di SKPD termasuk penyusunan DED kegiatan, pembangunan jalan, serapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang urgen dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPM dan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPD dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berikut ini disajikan tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD sebagaimana terlampir.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis mengenai isu strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD dalam lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Perioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng

Rappang Tahun 2014 – 2018 dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Pada tahun 2016 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang diasumsikan bahwa dasar seluruh program prioritas sudah cukup memadai sebagai pondasi dalam melanjutkan program-program yang signifikan terhadap pencapaian sasaran jangka menengah, sekaligus mampu merespon dinamika lingkungan eksternal dan internal. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada:

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
4. Penguatan dan peningkatan ekonomi dan kerakyatan
5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaaan, olahraga dan kebudayaan
7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Yang sinergis dengan prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, seperti:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaaan, keolahragaan dan kebudayaan, pembangunan kesehatan
3. Peningkatan infrastruktur wilayah
4. Pengembangan kawasan strategis
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Pada periode ketiga ini, tema pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal didukung oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah"**. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk melihat sinergitas upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun 2014 dan 2015 dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan tersebut di atas maka dapat dijabarkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Belum terciptanya suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan berkualitas.

- a. Penanganan laporan masyarakat yang cenderung lambat
- b. Rasio polisi dengan jumlah penduduk masih rendah
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, keamanan dan ketertiban melalui pendirian pos siskamling.

2. Masih terbatasnya akses dan kualitas penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat:

- a. Tingginya kerusakan jalan dan jembatan.
- b. Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terpusat di wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik.
- d. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya Perilaku Hidup Bersih (PHBS) oleh masyarakat
- e. Masih rendahnya kinerja jaringan irigasi terutama di irigasi desa.
- f. Belum maksimalnya pembangunan drainase, talud dan bronjong yang diakibatkan sering terjadinya genangan dan banjir saat terjadinya hujan.
- g. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit tenaga listrik baik skala menengah maupun kecil.
- h. Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan

- a. Andil Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah. Dimana sektor industri pengolahan hanya memberikan andil sebesar 0,75 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 7,44 persen.
- b. Rendahnya sumber daya pengelolaan UMKM yang diakibatkan wawasan kewirausahaan masyarakat masih minim dan kemampuan produksi, akses pasar serta akses penguatan modal masih sangat terbatas.
- c. Promosi potensi keunggulan daerah belum berkembang

- d. Tingkat pengangguran Terus Meningkat, selama tiga tahun terakhir tingkat pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang terus meningkat dari 4,78 persen pada tahun 2011, meningkat menjadi 6,99 persen pada tahun 2012 dan puncaknya mencapai 7,62 persen pada tahun 2013. Hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebanyak 104.006 orang tersebut terdapat 96.076 orang yang berstatus bekerja dan sisanya masih terdapat 7.930 orang (sekitar 7,62%) yang berstatus tidak bekerja (pengangguran).

4. Akses dan Kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan belum optimal

- a. Peringkat IPM di Kabupaten Sidenreng Rappang menempati urutan ke-8 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana di tahun-tahun sebelumnya berada pada urutan ke-9. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun-tahun ke depan untuk meningkatkan komponen-komponen penyusun IPM agar dapat mencapai peringkat ke-5 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan manusia.
- b. Masih banyak penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak melanjutkan pendidikannya di tingkat SMA. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 pada tahun 2013 sebesar 58,09 yang artinya, masih banyaknya penduduk usia tersebut yang berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA.
- c. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- d. Belum tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan
- e. Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta penyakit degeneratif
- f. Terbatasnya sumber daya kesehatan yang mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal
- g. Rendahnya pengembangan objek wisata yang menyebabkan kunjungan wisatawan masih terbatas.
- h. Masih rendahnya manajemen group kesenian yang belum terorganisir karena tidak tersedianya gedung kesenian yang representative.
- i. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi klub Olahraga yang disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan serta belum maksimalnya sinkronisasi program/kegiatan antara provinsi dan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

5. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, Transparan, Akuntabel, Aspiratif dan Partisipatif

- a. Indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dimana opini BPK terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun 2014 hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan status predikatnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian di tahun-tahun ke depan.
 - b. Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sering bertolak belakang dengan kemampuan akademik yang dimiliki dengan jabatan yang diembangnya.
 - c. Penegakan supremasi hukum hubungannya dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate tidak dibarengi dengan pemisahan jabatan administratif dan fungsional.
 - d. Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment sering menimbulkan bias yang disebabkan pengkotakan pelaksanaan program
 - e. Rendahnya kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai (distribusi yang tidak proporsional sesuai beban kerja dan kelangkaan tenaga untuk job tertentu, seperti dokter umum, dokter spesialis dan lain-lain.
 - f. Masih rendahnya serapan hasil Musrenbang ke dalam pembangunan karena banyaknya SKPD yang terjebak kepada program-program sebelumnya.
6. Produksi sektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- a. Belum optimalnya populasi ternak (kecil maupun besar dan unggas), yang berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan dan produksi daging masih rendah sementara areal pengembangan cukup memadai. Dimana pada tahun 2013 produksi daging sapi potong masih mencapai 706.678 kg
 - b. Tingginya kasus pada penyakit ternak
 - c. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang nilai tambah produksi hasil peternakan
 - d. Rendahnya sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan

menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2. 113 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|-----|--|-----------------------------|--|---|
| I | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | |
| | a. | Tataran Pengambil Kebijakan | | |
| | Ketentraman dan ketertiban umum daerah | Wajib | Tersedianya Lembaga Satpol PP dan adanya Perbup tentang Ketertiban Umum, Hubungan yang baik antara pihak kepolisian dan TNI serta alim ulama dan tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah | Jumlah Personil Satpol PP masih didominasi oleh tenaga honorer serta belum memiliki PPNS |
| | Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah | Wajib | Antara pemerintah Pusat lewat kegiatan tugas pembantuan dan kegiatan dekon urusan bersama. Dengan provinsi adanya hubungan koordinasi yang baik dengan gubernur terutama dalam pengawasan terhadap produk hukum serta pelaksanaan kegiatan Otsus provinsi. | Sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah belum maksimal. |
| | Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah | Wajib | Tersedianya lembaga Musrenbang Tingkat desa, kecamatan dan kabupaten | Masih rendahnya serapan hasil Musrenbang ke dalam pembangunan karena banyaknya SKPD yang terjebak kepada program-program sebelumnya |
| | Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil | Wajib | Tersedianya mekanisme dalam pemanfaatan dan pencairan dana | Seringnya keterlambatan juknis terutama tentang DAK |
| | Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD | Wajib | Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan yang terukur serta mekanisme berdasarkan regulasi pusat dan banyaknya lembaga khusus yang melakukan | Sumber daya tenaga perencana masih terbatas dan tidak efektifnya tindak pengawasan |

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|-----|--|--------|---|---|
| | | | pengawasan seperti Inspektorat, BPKP, BPK dan LSM | |
| | Pengelolaan potensi daerah | Wajib | Tersedianya potensi daerah yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan | Banyak usah-usaha eksploitasi potensi daerah yang tidak memiliki izin dan AMDAL |
| | Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Wajib | Tersedianya Sistem Inovasi Daerah | Belum Maksimalnya penerapan Sistem Inovasi Daerah |
| | | | | |
| | b. Tataran Pelaksana Kebijakan | | | |
| | Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan | Wajib | Tersedianya beberapa dokumen-dokumen teknis, seperti RTRW, Sanitasi, Master Plan Ekonomi, dan lain-lain | Masih rendahnya pemanfaatan dokumen-dokumen teknis oleh SKPD |
| | Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Wajib | Adanya kesadaran dari para aparatur pemerintahan untuk menjalankan peraturan sebagaimana mestinya | Masih kurangnya pemahaman teknis terhadap peraturan perundangan yang ada. |
| | Tingkat capaian SPM | Wajib | Tersedianya aturan-aturan pencapaian SPM di 15 Kementerian serta aturan-aturan petunjuk pencapaian SPM dimaksud | Banyak SKPD yang belum membuat laporan pencapaian SPM sebagaimana mestinya dan sebagian kecil tidak ada program dan kegiatannya. |
| | Penataan kelembagaan daerah | Wajib | Tersedianya peraturan tentang petunjuk penataan kelembagaan. | Kurangnya pendampingan teknis dari pusat dan provinsi sehingga membuat kelembagaan yang ada berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya serta tingginya dinamika penataan organisasi di daerah. |
| | Pengelolaan kepegawaian daerah | Wajib | Sudah tersedianya satu lembaga khusus yang menangani urusan kepegawaian | Belum tersedianya data base kepegawaian yang bisa memberikan pelayanan kepegawaian kepada pegawai tepat waktu. |
| | Perencanaan pembangunan daerah | Wajib | Tersedianya beberapa aturan-aturan dan dokumen tentang perencanaan daerah. | Rendahnya pemahaman SKPD dalam sistem penyusunan dokumen perencanaan daerah dan masih rendahnya SDM serta serapan usulan masyarakat kedalam perencanaan |

| No. | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|-----------|--|--------|---|---|
| | | | | pembangunan. |
| | Pengelolaan barang milik daerah | Wajib | Telah tersedianya Aturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | Tidak tertibnya asset daerah. |
| | | | | |
| II | Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | |
| | Kesejahteraan masyarakat | Wajib | Tersedianya potensi ekonomi dan SDA yang memadai. | Masih tingginya angka pengangguran |
| | Pelayanan umum | Wajib | Telah tersedianya kantor pelayanan terpadu serta pusat pelayanan umum bidang pendidikan, kesehatan, kebencanaan dan sosial. | Masih banyak capaian-capaian SPM yang belum tercapai. |

Setelah berbagai permasalahan pembangunan diidentifikasi hasilnya di FGD-kan dalam forum tim untuk mendapatkan permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang (mungkin) muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2. 114 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

| No | Isu Penting dan Masalah Mendesak | | |
|----|--|--|---|
| | Tingkat Nasional | Tingkat Provinsi | Lingkungan Eksternal Lainnya |
| 1. | Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan | 1. Gratis SPP bagi Mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS | 1. Tahapan Pilkada Serentak di Tahun 2014 |
| 2. | Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan social | 2. Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan | 2. Keamanan dan Ketertiban |
| 3. | Mendukung Pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela Negara | 3. Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil | 3. Penyakit Ternak |
| 4. | Kedaulatan Pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan | 4. Bantuan Paket Modal Pengembangan 100 Wirausaha pedesaan setiap | 4. Iklim Elnino |

| No | Isu Penting dan Masalah Mendesak | | |
|----|--|---|---------------------------------------|
| | Tingkat Nasional | Tingkat Provinsi | Lingkungan Eksternal Lainnya |
| | | desa | |
| 5. | Kemaritiman dan Kelautan | 5. Dukungan Fasilitas dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai potensi Kabupaten/Kota | 5. Pengembangan Infrastruktur Wilayah |
| 6. | Pariwisata dan Industri | 6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru | |
| 7. | Peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan | 7. Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah rakyat Miskin | |
| 8. | Mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah | 8. Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA. | |
| | | 9. Melanjutkan Kesehatan Gratis | |
| | | 10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas | |
| | | 11. Gratis Peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding school untuk guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, Mubaligh, khatib dan alim ulama | |
| | | | |

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan prakiraan sumber sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016, mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2014-2018 yaitu Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat.

Pada Misi satu yaitu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan produktivitas sektor pertanian baik melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi maupun Diversifikasi produk pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Diharapkan terjadi keterpaduan dalam pengelolaan usaha tani, Terpadu dalam pengertian ada integrasi mulai dari Hulu dan Hilir terpadu antara sub sektor sehingga tercipta modal pertanian Zero Waste (tanpa limbah) karena limbah yang dihasilkan oleh sub sektor tertentu misal jerami dari usaha tani padi akan dimanfaatkan secara optimal sebagai input produksi sebagai pakan pada sub sektor usaha peternakan sapi, jagung menjadi produk utama menyisahkan batang dan daun untuk hijauan ternak sapi. Kotoran sapi dan ayam sebagai limbah ternak, menjadi pupuk organik untuk usaha tani tanaman pangan, dan perkebunan, dan seterusnya. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai kawasan strategi nasional di kawasan KAPET Parepare sebagai sentra produk sapi. Maka diperlukan sarana prasarana pendukung melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mencapai misi kedua yaitu mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM maka prioritas pembangunan diarahkan pada wilayah perdesaan. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbasis potensi lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah Peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; peningkatan keterampilan kewirausahaan; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah; penataan pedagang kaki lima dan asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan akses permodalan; pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan; mempermudah akses permodalan; pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata.

Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang 2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat/pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan makin merata, baik antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor kegiatan/mata pencaharian maupun antar wilayah.

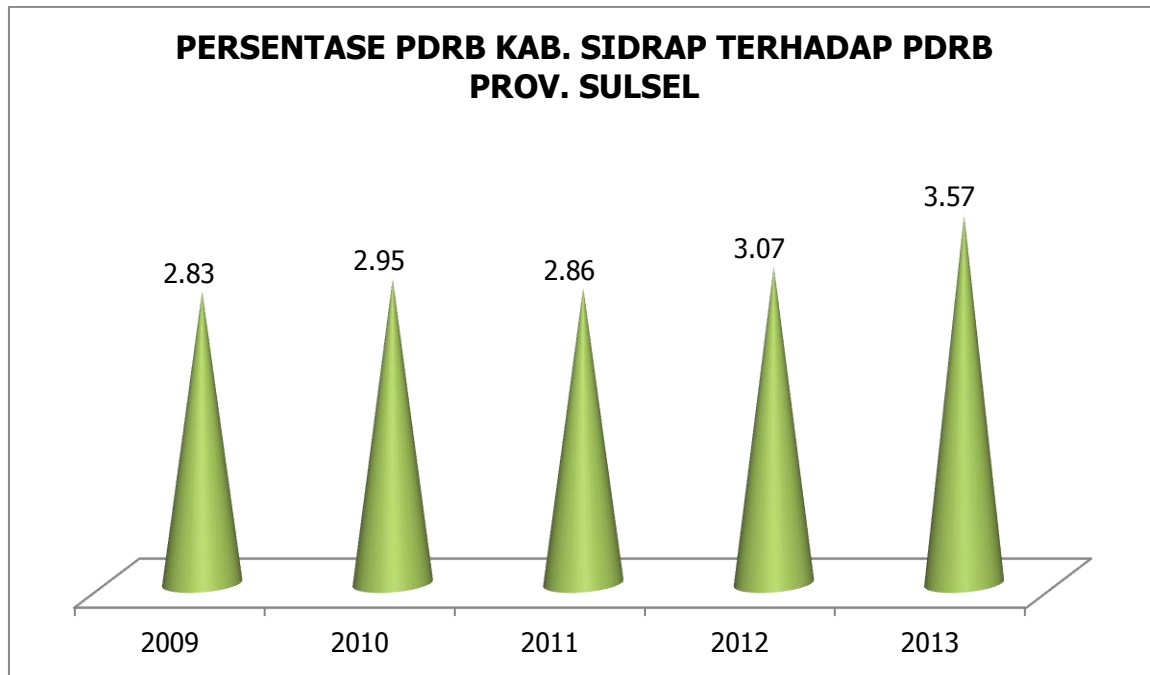
Gambaran kondisi ekonomi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat PDRB, inflasi,

pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Dengan penggambaran dalam suatu deskripsi yang baik maka dapat dilihat benang merah antara permasalahan yang melingkupi pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan indikator makro ekonomi daerah yang diharapkan. Secara umum perkembangan indikator perkembangan perekonomian dari tahun 2012 s/d tahun 2013 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun di tahun 2013 sedikit mengalami perlambatan, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3 1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang

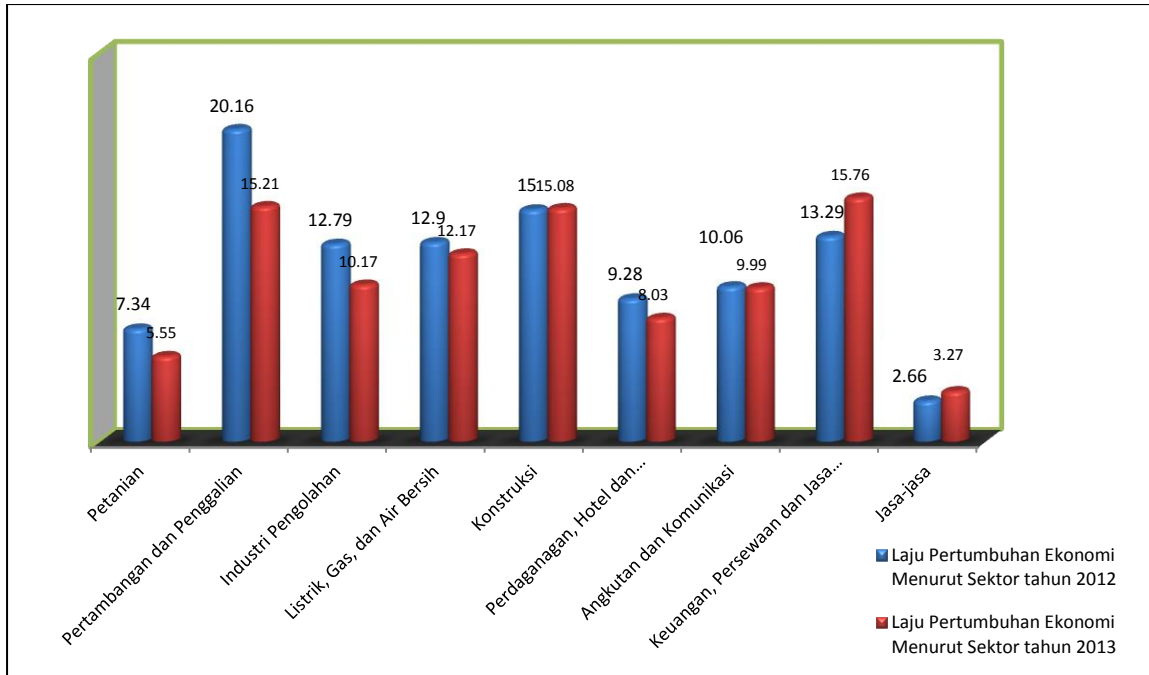
| No. | Indikator makro | Satuan | Realisasi | | Bertambah /Berkurang | Proyeksi | |
|-----|---|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | 2012 | 2013 | | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Juta Rupiah | 1.847.207,20 | 1.984.705,41 | 137.498,21 | 2.138.520,08 | 2.304.255,39 |
| 2 | PDRB atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rupiah | 4.932.508,64 | 5.642.352,81 | 709.844,17 | 6.695.780,08 | 7.945.882,22 |
| 3 | PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan | Juta Rupiah | 6.657.778,00 | 7.005.667,49 | 347.889,00 | 6.368.946,75 | 6.701.405,77 |
| 4 | PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rupiah | 17.777,95 | 19.916,04 | 2.138,09 | 18.474,12 | 17.136,59 |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 8,37 | 7,44 | -0,93 | 8,53 | 9,77 |
| 6 | Laju Inflasi | Persen | | 3,49 | | 3,48 | 3,47 |
| 7 | Struktur perekonomian | | | | | | |
| 7.1 | Pertanian | Persen | 45,49 | 44,69 | -0,8 | 44,40 | 44,11 |
| 7.2 | Pertambangan dan Penggalian | Persen | 0,46 | 0,51 | 0,05 | 0,52 | 0,54 |
| 7.3 | Industri Pengolahan | Persen | 5,60 | 5,56 | -0,04 | 5,37 | 5,18 |
| 7.4 | Listrik, Gas, dan Air Bersih | Persen | 1,20 | 1,25 | 0,05 | 1,25 | 1,26 |
| 7.5 | Konstruksi | Persen | 5,53 | 5,92 | 0,39 | 6,00 | 6,07 |
| 7.6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | Persen | 10,67 | 10,61 | -0,06 | 10,42 | 10,23 |
| 7.7 | Angkutan dan Komunikasi | Persen | 2,56 | 2,68 | 0,12 | 2,60 | 2,52 |
| 7.8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Keuangan | Persen | 5,24 | 5,63 | 0,39 | 5,71 | 5,79 |
| 7.9 | Jasa – jasa | Persen | 23 | 23,04 | 0,04 | 23,87 | 24,72 |
| 8 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 277.451 | 283.307 | 5856 | 290.422,22 | 297.716,15 |
| 9 | Jumlah Penduduk Miskin | Persen | 6,01 | 6,30 | 0,29 | 6,08 | 5,86 |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 73,36 | 74,05 | 0,69 | 74,52 | 75,00 |
| 11 | Tingkat pengangguran Terbuka | Persen | 6,99 | 7,62 | 0,63 | 7,50 | 7,38 |

Dari data BPS tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 mencapai Rp. 5.624,35 Milyar rupiah atau sekitar 3,57 persen dari PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Jika angka ini dibagi dengan jumlah penduduk, akan diperoleh PDRB perkapita yaitu sekitar 19,92 Juta Rupiah.



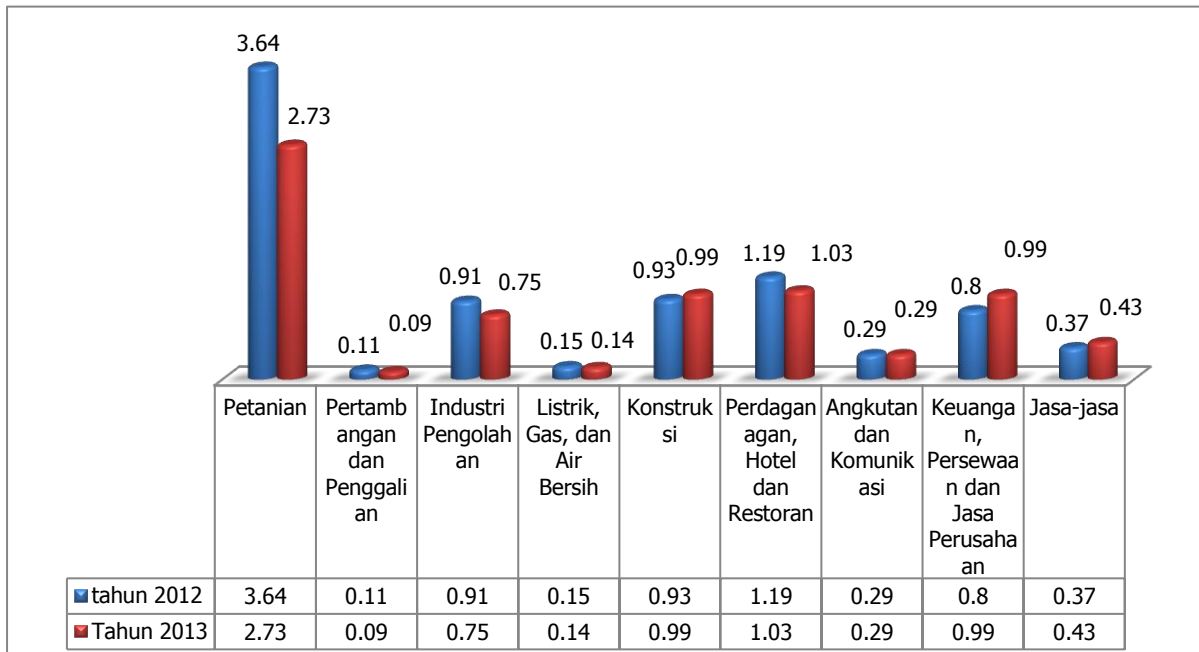
Gambar 3. 1 Persentase perbandingan antara PDRB Kab. Sidrap terhadap PDRB Prov. Sulsel Tahun 2009-2013

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena sudah terbatas dari unsur kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 mencapai 8,37 % dan mengalami penurunan menjadi 7,44% tahun 2013. Berdasarkan perhitungan proyeksi pada tahun 2015 diharapkan meningkat menjadi 9,77% dan pada tahun rencana yaitu 2016 sebesar 11,20%. Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan di kabupaten Sidenreng Rappang. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.



Gambar 3. 2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 dan 2013 Menurut Sektor

Jika dilihat menurut sektor, maka yang paling tinggi pertumbuhannya adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 15,76 % dari 13,29% dan yang paling rendah adalah sektor jasa-jasa sebesar 3,27% dari 2,66% seperti pada Gambar 3.2. Namun jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor maka yang paling tinggi kontribusinya adalah Pertanian pada tahun 2012 sebesar 3,64% dan tahun 2013 sebesar 2,73% seperti pada Gambar 3.3.

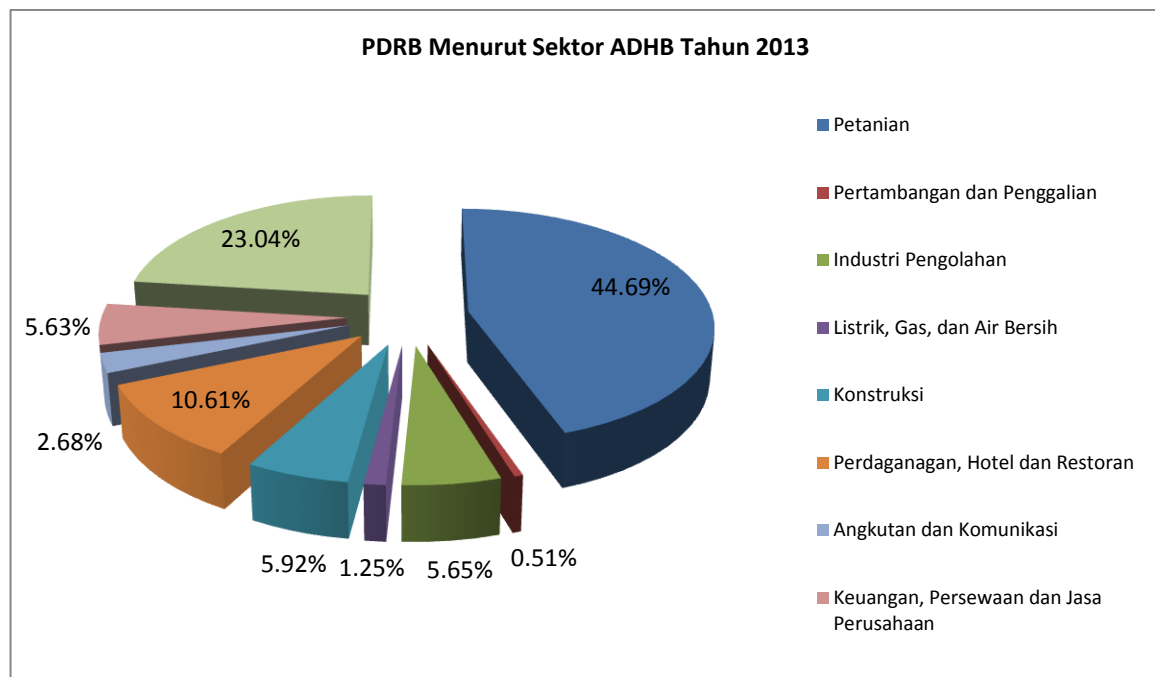


Gambar 3. 3 Perbandingan Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 dan 2013

Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2012 sebesar Rp. 17.777,96 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.138,09 pada tahun 2013 sehingga mencapai Rp. 19.916,04. Sebagaimana diketahui untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah dengan melihat pendapatan perkapita.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah.

Hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi sector andalan bagi perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada Tahun 2013 tiga sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara lain : sektor pertanian sebesar 44,69 persen, disusul sektor jasa-jasa sebesar 23,04 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,61 persen.



Gambar 3. 4 PDRB Masing-masing Sektor atas ADHB tahun 2013

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dari jumlah penduduk miskin. Jika berdasar indikator dan kriteria dari BPS, penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 sebanyak 17.900 jiwa atau sebesar 6,30 persen dari jumlah penduduk. Dibanding tahun 2012, jumlah penduduk miskin tahun 2013 meningkat sebesar 7,19 persen, dimana jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 16.700 jiwa. Di tahun 2014 dan 2015, angka kemiskinan ditargetkan akan dapat terus diturunkan seiring dengan perbaikan kondisi makro perekonomian dan program-program dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan peningkatan

nilai yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Di tahun 2013 nilai IPM sebesar 74,05 (peringkat 8 di propinsi Sulawesi Selatan). Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 73,36. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Tabel 3 2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Indikator Tahun 2011-2013

| Indikator | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Angka Harapan Hidup | 2,81 | 73,12 | 73,38 |
| Angka Melek Huruf | 89,77 | 89,90 | 90,25 |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 7,27 | 7,48 | 7,77 |
| Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu rupiah PPP) | 630,64 | 634,02 | 637,24 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 72,74 | 73,36 | 74,05 |

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja merupakan indikator sebagai acuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dimana tahun 2012 mencapai 6,99 persen dan tahun 2013 7,62 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, dengan mendorong serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran serta sektor industri pengolahan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pada dua tahun mendatang, diperkirakan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro.
- b) Meningkatkan produktivitas pertanian secara umum dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.
- c) Penguatan dan Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM
- d) Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
- e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah

- f) Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis

Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Sidenreng. Mendasarkan pada kondisi perekonomian Tahun 2014 dan perkiraan 2015 serta tantangan yang dihadapi pada dua tahun mendatang maka Prospek perekonomian pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 3 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2015 dan 2016

| NO | INDIKATOR | SATUAN | Proyeksi 2015 | Proyeksi 2016 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Milyar Rupiah | 2.304.255,39 | 2.482.835,18 |
| 2 | PDRB atas Dasar Harga Berlaku | Milyar Rupiah | 7.945.882,22 | 9.429.378,22 |
| 3 | PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan | Ribu Rupiah | 6.701.405,77 | 7.051.219,15 |
| 4 | PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku | Juta | 21.412.195,71 | 24.816.926,47 |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 9,77 | 11,20 |
| | Laju Inflasi | | 3,47 | 3,46 |
| 8 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 297.716 | 305.193,26 |
| 9 | Jumlah Penduduk Miskin | Persen | 5,86 | 5,66 |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia | Persen | 75 | 75,47 |
| 11 | Tingkat pengangguran Terbuka | Persen | 7,38 | 7,26 |

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator makro sosial ekonomi, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, bahkan meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 11,20%;
- b) Jumlah penduduk pada Tahun 2016 diperkirakan sekitar 305.193,26
- c) PDRB Harga Berlaku pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 24.816.926,47 juta.
- d) PDRB Harga Konstan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 2.482.835,18 juta.
- e) PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 7.051.219,15
- f) PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 24.816.926,47

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan

pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi misi. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan pemerintah daerah dari dana pusat semakin berkurang atau Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Derajat otonomi fiskal daerah yang selanjutnya disebut DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013

| Tahun | PAD | PENDAPATAN DAERAH | DOFD |
|--------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 2009 | Rp. 38.966.004.000 | Rp. 560.875.867.648 | 6,94% |
| 2010 | Rp. 51.586.182.867 | Rp. 669.203.224.750 | 7,70% |
| 2011 | Rp. 47.835.076.000 | Rp. 745.916.471.000 | 6,41% |
| 2012 | Rp. 43.453.014.000 | Rp. 735.295.374.000 | 5,90% |
| 2013 | Rp. 44.146.778.000 | Rp. 808.559.044.000 | 5,45% |
| JUMLAH | Rp. 225.987.054.867 | Rp. 3.519.849.981.398 | 6,42% |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2013 (diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 6,42 persen per tahun. Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan

dengan itu maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Tabel 3. 2 Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | TA 2009 (Rp) | TA 2010 (Rp) | TA 2011 (Rp) | TA 2012 (Rp) | TA 2013 (Rp) | Rata2 pertumbuhan |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pendapatan | 560.875.867.648 | 669.203.224.750 | 745.916.471.000 | 735.295.374.000 | 808.559.044.000 | 9,83 |
| 2 | Belanja | 596.678.457.000 | 633.502.880.255 | 749.855.670.390 | 675.717.657.000 | 825.874.361.000 | 9,22 |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | 45.924.901.226 | 56.720.349.800 | 104.063.522.678 | 67.431.783.000 | 30.198.699.077 | 4,14 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | 10.122.311.874 | 92.420.694.295 | 100.124.323.288 | 127.009.500.000 | 12.883.382.077 | 189,60 |

Sumber : BPKD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana pendapatan daerah yang akan di tuangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang teratur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, oleh karena itu memperhatikan pokok-pokok berikut :

- 1) Perencanaan target PAD mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat, prakiraan realisasi penerimaan PAD tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 104.800.122.000; yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 18.450.309.000; Retribusi Daerah sebesar Rp 73.707.939.000; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 4.700.000.000; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 7.941.874.000.
- 2) Dalam Pengelolaan PAD, dapat diberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi, tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah,rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

- 3) Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,penetapan target pendapatannya pada Tahun anggaran 2013 sesuai ketentuan pada Pasal 180 Undang-Undang dimaksud, akan mengacu pada Peraturan Daerah baru yang ditetapkan.
- 4) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Daerah, penerimaan yang dianggarkan dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah.
- 5) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

2. Dana Desentralisasi

Prakiraan sumber Dana Desentralisasi yang dialokasikan ke masing-masing daerah melalui dana perimbangan yang terdiri dari; Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diperkirakan besarnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Sumber dana Alokasi Umum, diperkirakan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya kebijakan tahunan pemerintah pusat terhadap pegawai negeri sipil yaitu kenaikan gaji PNS. Sementara Dana Alokasi Khusus, diperkirakan pula akan naik, karena sebagian program/kegiatan yang dialokasikan melalui dana APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) dialihkan menjadi Program/Kegiatan yang sumber dananya melalui Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2016. Pada tahun 2016 diproyeksikan mendapat dana perimbangan sebesar Rp. 789.206.259.000,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp 705.759.028.000; sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus Reguler sebesar Rp.363.413.690.000,- dan Dana Alokasi Khusus Publik sebesar Rp. 442.076.250.000,-

3. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- 1) Mengingat proses penyusunan APBD akan di mulai pada Juni 2016 sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2016 direncanakan sekitar bulan Oktober 2016, maka pencantuman alokasi dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2016 ditambah 20%.
- 2) Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2012. untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas

atau hasil pertambangan lainnya di tahun 2015 dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran 2014.

4. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran lain-lain pendapat daerah yang sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penetapan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 42.102.220.000.
- 2) Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

Tabel 3 4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | PENDAPATAN | 745,706,400,450.20 | 820,880,887,909.21 | 460,610,684,874.34 | 894,006,381,000.00 | 1,052,511,161,000.00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 37,920,943,980.29 | 64,628,526,309.80 | 25,463,238,232.22 | 104,800,122,000.00 | 147,173,963,000.00 |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 8,303,004,976.00 | 16,679,705,196.00 | 9,507,983,205.00 | 18,450,309,000.00 | 20,201,244,000.00 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 21,227,956,226.50 | 33,184,946,772.20 | 7,301,331,930.35 | 73,707,939,000.00 | 114,307,020,000.00 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,699,111,152.00 | 3,885,895,413.00 | 4,538,586,580.12 | 4,700,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 4,690,871,625.79 | 10,877,978,928.60 | 4,115,336,516.75 | 7,941,874,000.00 | 7,965,699,000.00 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 686,308,898,869.91 | 742,083,647,719.41 | 431,873,796,242.12 | 789,206,259,000.00 | 905,337,198,000.00 |
| | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 578,000,237,211.00 | 609,321,207,844.00 | 373,837,214,300.12 | 789,206,259,000.00 | 905,337,198,000.00 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 35,046,333,708.00 | 20,579,510,096.00 | 13,070,352,366.12 | 15,000,000,000.00 | 15,000,000,000.00 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 1,422,820,503.00 | 3,330,537,748.00 | 2,275,206,934.00 | | - |
| | Dana Alokasi Umum | 499,699,753,000.00 | 533,655,220,000.00 | 335,046,103,000.00 | 705,759,028,000.00 | 811,622,883,000.00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 41,831,330,000.00 | 51,755,940,000.00 | 23,445,552,000.00 | 68,447,231,000.00 | 78,714,315,000.00 |
| | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 81,102,451,000.00 | 95,364,599,000.00 | 42,950,553,200.00 | 99,217,328,799.60 | 101,201,675,375.59 |
| | Dana Penyesuaian | 81,102,451,000.00 | 95,364,599,000.00 | 42,950,553,200.00 | 99,217,328,799.60 | 101,201,675,375.59 |

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Transfer Pemerintah Provinsi | 27,206,210,658.91 | 37,397,840,875.41 | 15,086,028,742.00 | 38,908,713,646.78 | 39,686,887,919.71 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 27,206,210,658.91 | 37,397,840,875.41 | 15,086,028,742.00 | 38,908,713,646.78 | 39,686,887,919.71 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 21,476,557,600.00 | 14,168,713,880.00 | 3,273,650,400.00 | 14,741,129,920.75 | 15,035,952,519.17 |
| | Pendapatan Hibah | 179,640,000.00 | - | - | | |
| | Pendapatan Dana Darurat | - | - | - | | |
| | Pendapatan Lainnya | 21,296,917,600.00 | 14,168,713,880.00 | 3,273,650,400.00 | 14,741,129,920.75 | 15,035,952,519.17 |
| 1.4 | Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | | | | 42.102.220.000,00 | 46.312.442.000,00 |
| 1.5 | Dana penyesuaian dan otonomi khusus | | | | 113.416.930.000,00 | 124.758.623.000,00 |
| 1.6 | Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya | | | | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Adapun sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

- b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis punggutannya dan less distortive terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil,
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 masih didominasi oleh belanja pegawai yaitu sebesar Rp 557.665.367.000,- sedangkan untuk belanja publik sebesar Rp 52.985.004.000,-. Namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengambil langkah Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan realisasi IPM Tahun 2013 yang baru mencapai sebesar 74,05 sehingga diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan reformasi birokrasi.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah: 1. Belanja daerah pada tahun 2016 dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah dan program unggulan Kepala Daerah, yaitu:

- 1) Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
- 2) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
- 3) Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
- 4) Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- 5) Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
- 6) Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan
- 7) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
- 8) Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Tabel 3 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | BELANJA DAERAH | 738,651,821,492.00 | 812,668,038,096.00 | 304,718,879,270.22 | 880,339,838,315.08 | 897,946,635,081.38 |
| 1.1 | Belanja Operasi | 602,025,018,292.00 | 604,541,442,789.00 | 242,287,317,431.22 | 628,964,917,077.68 | 641,544,215,419.23 |
| | Belanja Pegawai | 441,562,403,409.00 | 481,743,637,059.00 | 199,686,807,157.13 | 501,206,079,996.18 | 511,230,201,596.11 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 118,373,927,466.00 | 115,829,872,746.00 | 41,236,108,743.09 | 120,509,399,604.94 | 122,919,587,597.04 |
| | Belanja Bunga | 2,395,751,706.00 | 2,207,839,516.00 | 1,030,685,487.00 | 2,297,036,232.45 | 2,342,976,957.10 |
| | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| | Belanja Hibah | 22,957,644,199.00 | 3,923,433,713.00 | 209,090,900.00 | 4,081,940,435.01 | 4,163,579,243.71 |
| | Belanja bantuan sosial | 16,267,650,000.00 | 836,659,755.00 | 124,625,144.00 | 870,460,809.10 | 887,870,025.28 |
| | Belanja bantuan keuangan | 467,641,512.00 | - | - | - | - |
| 1.2 | Belanja Modal | 127,050,230,701.00 | 188,906,226,129.00 | 59,226,001,989.00 | 196,538,037,664.61 | 200,468,798,417.90 |
| | Belanja Tanah | 7,995,610,710.00 | 3,255,811,380.00 | - | 3,387,346,159.75 | 3,455,093,082.95 |
| | Belanja peralatan dan mesin | 16,407,071,036.00 | 25,335,524,843.00 | 2,276,594,497.00 | 26,359,080,046.66 | 26,886,261,647.59 |
| | Belanja gedung dan bangunan | 43,579,618,997.00 | 45,068,412,527.00 | 9,845,116,600.00 | 46,889,176,393.09 | 47,826,959,920.95 |
| | Belanja jalan, irigasi dan jaringan | 57,813,587,208.00 | 115,218,286,279.00 | 47,104,290,892.00 | 119,873,105,044.67 | 122,270,567,145.57 |
| | Belanja aset tetap lainnya | 1,254,342,750.00 | 28,191,100.00 | - | 29,330,020.44 | 29,916,620.85 |
| | Belanja aset lainnya | - | - | - | - | - |

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1.3 | Belanja Tak Terduga | 1,269,720,992.00 | 4,004,177,427.00 | - | 4,165,946,195.05 | 4,249,265,118.95 |
| | Belanja tak terduga | 1,269,720,992.00 | 4,004,177,427.00 | - | 4,165,946,195.05 | 4,249,265,118.95 |
| 1.4 | Transfer | 8,306,851,507.00 | 15,216,191,751.00 | 3,205,559,850.00 | 50,670,937,377.74 | 51,684,356,125.30 |
| | Transfer/bagi hasil ke desa | 8,306,851,507.00 | 15,216,191,751.00 | 3,205,559,850.00 | 50,670,937,377.74 | 51,684,356,125.30 |
| | Bagi hasil pajak | | 363,732,000.00 | - | 378,426,772.80 | 385,995,308.26 |
| | Bantuan keuangan | | 14,852,459,751.00 | - | 15,452,499,124.94 | 15,761,549,107.44 |
| | Bagi hasil retribusi | | - | - | - | - |
| | Bagi hasil pendapatan lainnya | 8,306,851,507.00 | | 3,205,559,850.00 | 34,840,011,480.00 | 35,536,811,709.60 |

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2016 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 adalah :
 - 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. SiLPA Pada tahun 2016 belum dapat dikeluarkan karena harus menunggu perhitungan APBD yang telah diaudit oleh BPK.
 - 2) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 adalah
- b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk :
 - 1) Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD.
 - 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.
 - 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Tabel 3 6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | PEMBIAYAAN DAERAH | (5,929,567,611.72) | (1,149,075,153.52) | 5,926,731,409.69 | (1,195,497,789.72) | (1,219,407,745.52) |
| 1.1 | Penerimaan pembiayaan | 198,699,077.28 | 1,125,011,346.48 | 7,063,774,659.69 | 1,170,461,804.88 | 1,193,871,040.98 |
| | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran | 198,699,077.28 | 1,125,011,346.48 | 7,063,774,659.69 | 1,170,461,805 | 1,193,871,041 |
| | Sebelumnya (SILPA) | - | - | | | |
| | Pinjaman dalam negeri lembaga keuangan Bank | - | - | | | |
| | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah lainnya | - | - | | | |
| | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | | | |
| | Penerimaan piutang daerah | - | - | | | |
| | Penerimaan hutang daerah | - | - | | | |
| 1.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 6,128,266,689.00 | 2,274,086,500.00 | 1,137,043,250.00 | 2,365,959,594.60 | 2,413,278,786.49 |
| | Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah | - | - | | | |
| | Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo | 6,128,266,689.00 | 2,274,086,500.00 | 1,137,043,250 | 2,365,959,595 | 2,413,278,786 |
| | Pembayaran utang pemda ke pihak | | | | | |

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2013 | Realisasi Tahun 2014 | Realisasi Tahun Berjalan (2015) | Proyeksi/Target Tahun rencana 2016 | Proyeksi/Target Tahun 2017 |
|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | ketiga | | | | | |
| | Pemberan pinjaman daerah | - | - | | | |

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV ini menjelaskan isu strategis, arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas program pembangunan daerah

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana arah kebijakan pembangunannya di tahun ke 3 ini diasumsikan bahwa dasar seluruh program prioritas sudah cukup memadai sebagai pondasi dalam melanjutkan program program yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Tema pembangunan di tahun 2016 yaitu : **“Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Didukung Oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah”** . Adapun prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2016 diarahakan pada :

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaaan, olahraga dan kebudayaan.
7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan peneglolaan pemerintahan yang baik.
8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Prioritas dan sasaran tersebut merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang di butuhkan pada tahun rencana dalam menyusun program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada Bab V RKPD ini lengkap dengan pagu indikatif per SKPD sesuai dengan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 Tahun ke 3, yaitu tahun perencanaan 2015 untuk dilaksanakan di tahun 2016. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, periodisasi perencanaan jangkah menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu : Tahapan Pertama tahun 2015 – 2009, Tahap Ke Dua 2010 – 2014, Tahap ke tiga Tahun 2015 – 2019, dan Tahapan ke empat Tahun 2020 – 2024. Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng

Rappang Tahun 2015 – 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 adalah ;

“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Timur Tahun 2025”

Dengan Tiga Keunggulan yaitu :

1. Sebagai Pusat Pengembangan agribisnis
2. Sebagai Wilayah Yang Mandiri
3. Memiliki Masyarakat Yang Berbudaya dan Regius

Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, adalah:

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat “

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ;

MAJU Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan

berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGIUS Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaen Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.
3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.
5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif
6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta dengan strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun (2014-2018) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran/Strategi Pembangunan

| Visi : " Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat " | | | |
|--|--|--|---|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Misi 1 | | | |
| Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan | Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum. | Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan. | Penguatan dukungan ketersediaan sarana Produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas |
| | | Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan. | |
| | Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu. | Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir. | Penguatan kerjasama antara stakeholder usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi |
| | | Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sup sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. | |
| | Mengembangkan Modernisasi Pertanian. | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir. | Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluh pertanian |
| | | Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani. | |
| | | Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar. | |
| | Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam. | Terkendalnya alih fungsi lahan pertanian produktif. | Pengendalian alih fungsi lahan dan pencetakan sawah baru |
| | | Terkendalnya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan. | Pengendalian penggunaan input produksi dari bahan kimia yang berlebihan |
| | | Meningkatnya kelestarian sumber daya air. | Peningkatan kualitas kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya air secara efektif dan efisien |
| | | Berkembangnya produk pertanian organik. | Pengembangan demplot produk pertanian organik |
| | Misi 2 | | |
| Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui | Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur perekonomian | Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian. | Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya aglomerasi dalam produksi dan pemasaran |
| | | Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur | |

| Visi : " Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat " | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | |
| pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM | daerah. | perekonomian daerah. | | |
| | Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM. | Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif. | Peningkatan jumlah UMKM baru dan peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada | |
| | | Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian. | Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM | |
| | | Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM. | | |
| | | Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM. | | |
| | Meningkatkan daya saing daerah. | Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. | Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama penelitian dan pengembangan | |
| | | Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa. | Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal | |
| | | Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan klaster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas. | Penguatan pengembangan kluster tanaman pangan dan ternak sapi terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis kapet pare-pare | |
| | Misi 3 | | | |
| | Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. | Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit. | Mendorong peningkatan kualitas pelayan rumah sakit |
| Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat. | | | Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan | | | Peningkatan kualitas penanganan komprehensif usia 1000 | |

Visi :
" Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat "

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|--|
| | | gizi.masyarakat | hari pertama kehidupan |
| | | Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan. | Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan |
| | | Terkendalinya pertumbuhan penduduk. | Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan |
| | Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan. | Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat. | Pementasan buta huruf secara terpadu dan peningkatan minat baca |
| | | Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun. | Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis dan pelibatan peran serta masyarakat |
| | | Berkembangnya pendidikan tinggi. | Inisiasi pendirian akademik komunitas dan dukungan pembinaan mahasiswa tahun kedua sebagai lanjutan dukungan pemerintah |
| | | Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya. | Pengembangan prestasi pemuda, Olahraga dan seni budaya termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya |
| | Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat. | Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam pembinaan umat beragama |
| | | Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama. | Penguatan kerja sama pemerintahan dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama |
| Misi 4 | | | |
| Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur. | Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh. | Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan berbasis akses wilayah antar desa/kelurahan dan kecamatan termasuk Pengembangan Kawasan Sentra |

Visi :
" Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat "

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
|-------------------------------------|--------|--|--|
| aksesibilitas antar wilayah. | | | Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh. |
| | | Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah. | Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang |
| | | Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai. | Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi |
| | | Meningkatnya ketersediaan infra struktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas. | Percepatan Dukungan Jangkauan Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas |
| | | Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin. | Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin |
| | | Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan | Tertatanya ruang Kota Pangkajene yang efektif, efisien, dan berkelanjutan |
| | | Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah. | Penguatan Keterpaduan Hulus Hilir dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi. |
| | | Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai. | Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral. |
| | | Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana. | Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta |

| Visi : " Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat " | | | |
|---|--|---|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | | | partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana. |
| Misi 5 | | | |
| Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif. | Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas. | Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat | Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman |
| | | berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum. | |
| Misi 6 | | | |
| Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender dan perlindungan anak, pro poor, pro job dan pro environment. | Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. | Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi. | Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah |
| | | Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan. | Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur |
| | | Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. | Penataan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal |
| | | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. | Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan |
| | | Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan | Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat. |

| Visi : " Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan terkemuka Bersama Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Menignkat Dua Kali Lipat " | | | |
|--|--|--|---|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi |
| | pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat. | Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. | Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa. |
| | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial. | Penguatan Koordinasi antar Instansi penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial |
| | | Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik. | Meningkatkan Pembinaan Partai Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih Kondusif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi |
| | Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dan perempuan. | Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. | Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan |
| Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak. | | | |

Misi 1 :

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan.

Sektor Pertanian merupakan tulang punggung Perekonomian Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Rata-rata 48 sampai dengan 50 persen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari Sektor Pertanian. Oleh karena itu maka sektor pertanian menjadi kunci utama pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi ini terkait dengan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian baik melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi maupun Diversifikasi produk pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada. Diharapkan terjadi keterpaduan dalam pengelolaan usaha tani, Terpadu dalam pengertian ada integrasi mulai dari Hulu dan Hilir terpadu antara sub sektor sehingga tercipta modal pertanian Zero Waste (tanpa limbah) karena limbah yang dihasilkan oleh sub sektor tertentu misal jerami dari usaha tani padi akan dimanfaatkan secara optimal sebagai input produksi sebagai pakan pada sup sektor usaha peternakan sapi, jagung menjadi produk utama

menyisahkan batang dan daun untuk hijauan ternak sapi. Kotoran sapi dan ayam sebagai limbah ternak, menjadi pupuk organik untuk usaha tani tanaman pangan, dan perkebunan, dan seterusnya. Misi ini mencakup segala upaya dilakukan untuk membina para petani sehingga dari waktu ke waktu dalam mengelola usaha taninya, menggunakan teknologi pertanian mutakhir, berorientasi pasar dan menggunakan manajemen yang baik. Selanjutnya mencakup pula upaya yang dilakukan untuk mendorong implementasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha tani, berkembangnya pertanian organik dan upaya-upaya mempertahankan serta meningkatkan tingkat kesuburan lahan, kelestarian sumber daya air dan daya dukung lingkungan.

Misi 2 :

Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.

Memproduksi bahan mentah tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, karena nilai tambah sektor industri pengolahan dan jasa lebih tinggi daripada sektor produksi bahan mentah, maka untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertanian dan sumber daya lokal. Oleh karena itu, maka misi ini menggambarkan upaya implementasi sistem petik, olah dan jual. Memfasilitasi tumbuhnya usaha-usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah yang mengolah hasil produksi pertanian dan sumber daya lokal yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah secara maksimal, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, menciptakan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan.

Misi 3 :

Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.

Tersedianya sumber daya alam efektif dan efisien, sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang sehat secara fisik, cerdas, dan terampil serta mempunyai kualitas spiritual yang kuat, upaya ini searah dengan upaya menghadirkan Perguruan Tinggi Negeri berbasis Pertanian (Akademi Komunitas). Upaya pembinaan kehidupan keagamaan dan fasilitasi terciptanya hubungan antar umat beragama yang Harmonis.

Misi 4 :

Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infra struktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai **sehingga** memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng

Rappang. Infra Struktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

Misi 5 :

Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif

Salah satu prosyarat untuk dapat melaksanakan Program-program Pembangunan adalah Keamanan dan Ketertiban yang terkendali. Oleh karena itu misi ini mencakup seluruh upaya yang akan ditempuh untuk menghadirkan kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali di tengah-tengah masyarakat. Menekan angka kriminalitas dan meminimalisir potensi konflik yang ada.

Misi 6 :

Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.

Tugas utama pemerintah adalah melayani dan memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Misi ini menggambarkan segala upaya yang dilakukan untuk menghadirkan Kinerja Pemerintah yang mampu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2015 ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD 2014-2018 serta memperhatikan perkembangan terkini lingkungan internal dan eksternal daerah termasuk perkembangan kebutuhan masyarakat. Disinilah letak pentingnya proses perencanaan daerah yang dilakukan setiap tahun mulai dari musyawarah pembangunan di tingkat lingkungan dan dusun, musrenbang di tingkat Desa/Keurahan, Musrenbang di tingkat Kecamatan, musyawarah pembangunan di tingkat forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, serta Musrenbang di tingkat Kabupaten yang berfungsi menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat terkini. Selain itu, ketersediaan dana untuk menunjang pembangunan merupakan faktor kunci dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan selektif konservatif. Keterbatasan dana merupakan alasan logis diperlukannya suatu prioritas pembangunan agar permasalahan yang lebih penting perlu mendapat perhatian dan diselesaikan lebih dulu.

Selain hal yang dikemukakan di atas, perlu pula diketahui bahwa suatu prioritas pembangunan bukan hanya dapat dicapai melalui kerangka pendanaan semata melainkan juga melalui kerangka regulasi yang mampu memberikan dukungan dan stimulasi agar suatu prioritas pembangunan dapat diwujudkan. Minimnya anggaran yang dialokasikan pada suatu prioritas pembangunan bukan berarti kurangnya perhatian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dapat juga berarti bahwa prioritas pembangunan tersebut cukup diselesaikan dengan kerangka regulasi. Selain itu, suatu prioritas pembangunan tidak hanya dapat diselesaikan melalui kerangka pendanaan APBD Kabupaten,

melainkan dapat juga diselesaikan melalui kerangka pendanaan di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi seperti APBD Provinsi, APBN, Dana Dekonsentrasi, dan sumber-sumber dana lainnya.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dapat disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, untuk tahapan RPJPM 3 yaitu Tahun 2015-2019 dengan tema memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis SD yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dengan 9 Agenda Prioritas Nawa Cita sebagai berikut :
3. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
4. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
6. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
8. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa bangsa Asia lainnya.
9. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
10. Melakukan revolusi karakter bangsa
11. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain Nawa Cita tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 juga memperhatikan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yaitu : **"Mempercepat Pembangunan Infrastuktur Untuk Meletakkan Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas"**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 dengan arah pembangunan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan Kualitas Manusia Sulawesi Selatan.
 - 2) Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajaran.
 - 3) Mewujudkan Sulawesi Selatan yang atraktif dan kondusif
 - 4) Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari.
 - 5) Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 dengan 11 agenda prioritas sebagai berikut :
 - 1) Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.
 - 2) Bantuan lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 100 juta bibit tanaman hutan.
 - 3) Bantuan modal pengembangan usaha mikro kecil.
 - 4) Bantuan paket modal Pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.
 - 5) Dukungan fasilitas dan regulasi pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kabupaten/ Kota.
 - 6) Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.
 - 7) Bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin.
 - 8) Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA.
 - 9) Melanjutkan kesehatan gratis.
 - 10) Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.
 - 11) Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boording School untuk, Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubaliq, Khatib dan Alim Ulama.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025. Adapun Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2025 (tahap ke tiga) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 adalah :

‘Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Timur Tahun 2025’

Dengan Tiga Keunggulan yaitu :

- 1) Sebagai Pusat Pengembangan agribisnis
 - 2) Sebagai Wilayah Yang Mandiri.
 - 3) Memiliki Masyarakat Yang Berbudaya dan Religius
4. Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 dengan 11 Agenda Prioritas sebagai berikut :
 - 1) Gratis SPP 1 Tahun bagi mahasiswa baru
 - 2) Bantuan 1.000 Hand Tractor
 - 3) Pembangunan 200 Km Jalan Usaha Tani
 - 4) Menciptakan 15,000 lapangan kerjabaru
 - 5) menciptakan 10,000 Usaha Mikro.kecil dan menengah (UMKM) baru
 - 6) Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMA
 - 7) Melanjutkan kesehatan gratis

- 8) Peningkatan Insentif bagi Muballigh, Imam Masjid dan Pegawai Syara, Guru Mengaji, dan Umroh Gratis bagi para Imam Masjid
- 9) Kapasitas Infrastruktur Daerah
- 10) Program Pengembangan Kawasan Strategis
- 11) Program Pengelolaan Sumber daya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi

Berdasarkan uraian diatas ditetapkan prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dengan urutan sebagai berikut :

- 1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi,** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban
 - b. Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum
- 2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah,** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung
 - b. Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - c. Mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi, Membangun kerjasama dengan media massa dan Membangun prasarana informasi
 - d. Penyelenggaraa penataan ruang yang terpadu
 - e. Penataan ruang publik dan ruang Terbuka Hijau yang efektif dan efisien
 - f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif
 - g. Mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan
- 3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis,** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan dan membangun infrastruktur yang mebuca akses antar wilayah
 - b. Membangun prasarna dasar infrastruktur Permukiman
 - c. Meningkatkan cakupan layanan air bersih
 - d. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi
 - e. Penataan kawasan Kumuh
 - f. Peningkatan koordinasi dan Mitigasi bencana alam
 - g. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- 4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan,** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Menjamin perlindungan konsumen
 - b. Meningkatkan daya saing UMKM
 - c. Mengembangkan kemandirian permodalan
 - d. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja
 - e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya local
 - f. Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan
 - g. Meningkatkan kualitas hasil produksi

- h. Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air
- i. Meningkatkan akses transportasi
- j. Pengembangan kapasitas pelaku usaha tani
- k. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian secara optimal
- l. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan
- m. Mengembangkan akses pemasaran
- n. Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul
- o. Mempertahankan daya dukung hutan dan lahan
- p. Mencegah kerusakan sumber daya alam
- q. Meningkatkan daya dukung sumber daya air
- r. Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air
- s. Mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan
- t. Mendorong pengembangan produk pertanian organik

5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengembangkan infrastruktur pendukung
- b. Meningkatkan produktifitas UMKM
- c. Meningkatkan akses informasi
- d. Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin
- e. Meningkatkan dukungan pengembangan kapet pare-pare sebagai kawasan strategis nasional

6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaaan, olahraga dan kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- b. Meningkatkan kapasitas pelayanan
- c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- f. Pemerataan pembangunan kesehatan
- g. Perlindungan kesehatan makanan
- h. Penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
- i. Peningkatan minat baca masyarakat
- j. Peningkatan mutu layanan pendidikan
- k. Mengembangkan akses pelayanan pendidikan
- l. Peningkatan akses dan minat keolahragaan
- m. Pelestarian kekayaan budaya local
- n. Peningkatan akses pariwisata
- o. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan
- p. Menciptakan kaharmonisan umat beragama

7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan peneglolaan pemerintahan yang baik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
- c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Melaksanakan pelayanan prima
- e. Peningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
- f. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah
- g. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- h. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak
- j. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- k. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa
- l. Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undang
- m. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- n. Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak
- o. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak
- p. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan
- b. Mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak
- c. Meningkatkan akses pemasaran
- d. Meningkatkan produktifitas perikanan budi daya dan tangkap
- e. Mengembangkan tekhnologi peternakan
- f. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap

Untuk dapat melihat sinergitas antara prioritas pembangunan RPJM Nasional, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dan penjelasan program prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 beserta dengan indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh SKPD, dapat diuraikan dalam tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah

| Prioritas RPJM Nasional Tahun 2015-2019 | Prioritas RPJMD Prov. Sul Sel Tahun 2013-2018 | Prioritas RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2016 |
|--|---|--|--|
| <p>1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.</p> <p>2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</p> <p>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <p>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.</p> <p>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p> | <p>1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.</p> <p>2. Bantuan lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 100 juta bibit tanaman hutan.</p> <p>3. Bantuan modal pengembangan usaha mikro kecil</p> <p>4. Bantuan paket modal Pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.</p> <p>5. Dukungan fasilitas dan regulasi pembangunan industri minimal 24 unit sesuai potensi Kabupaten/ Kota.</p> <p>6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.</p> <p>7. Bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin.</p> <p>8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA.</p> <p>9. Melanjutkan kesehatan gratis.</p> <p>10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3 secara terbatas.</p> <p>11. Gratis peningkatan kualitas</p> | <p>1. Gratis SPP 1 Tahun bagi mahasiswa baru</p> <p>2. Bantuan 1.000 Hand Tractor</p> <p>3. Pembangunan 200 Km Jalan Usaha Tani</p> <p>4. Menciptakan 15,000 lapangan kerjabaru</p> <p>5. menciptakan 10,000 Usaha Mikro.kecil dan menengah (UMKM) baru</p> <p>6. Melanjutkan Pendidikan Gratis dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMA</p> <p>7. Melanjutkan kesehatan gratis</p> <p>8. Peningkatan Insentif bagi Muballigh, Imam Masjid dan Pegawai Syara, Guru Mengaji, dan Umroh Gratis bagi para Imam Masjid</p> <p>9. Kapasitas Infrastruktur Daerah</p> <p>10. Program Pengembangan Kawasan Strategis</p> <p>11. Program Pengelolaan Sumber daya Air dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Organisasi</p> | <p>1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi</p> <p>2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah</p> <p>3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis</p> <p>4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan</p> <p>5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran</p> <p>6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan</p> <p>7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik</p> <p>8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat</p> |

| Prioritas RPJM Nasional Tahun 2015-2019 | Prioritas RPJMD Prov. Sul Sel Tahun 2013-2018 | Prioritas RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2016 |
|--|--|--|---|
| 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. | pengajar melalui Boording School untuk, guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubaliq, khatib dan alim ulama. | | |

Tabel 4. 3 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|---|------------|-----------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| I. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi | | | | |
| 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk | 200 Pol PP | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani | 70 % | |
| | | Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani | 70% | |
| | | Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 100% | 11 Kecamatan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|--|--|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| | | Rasio fasilitas sarana dan prasarana pos kamling | 75 Pos Kamling | |
| | | Program kemitraan pengembang anwawasan kebangsaan | Cakupan peningkatan kapasitas orkesmas | |
| | | Kapasitas FKUB dan FPK | 4 Kali | |
| | | Jumlah ORMAS/LSM | 50 Org | |
| | | | | |
| 2. Peningkatan Stabilitas Ketertiban Umum | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kabupaten | - | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | Cakupan jam patroli petugas satpol PP dalam sehari tingkat kecamatan | - | |
| | | Angka kriminalitas | - | Badan Kesbang dan Linmas |
| | | Deteksi dini dan pencegahan tindak kriminal | 100% | |
| II. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah | | | | |
| 1. Meningkatkan dan Memelihara Kualitas prasarana Jalan dan Jembatan serta prasarana pendukung | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 83,10% | Dinas Bina Marga |
| 2. Mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong | Terlaksana pembangunan Drainase/ Gorong- Gorong | 80,00% | |
| | Program Pembangunan | Terbangunnya Talud untuk | 31,42% | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|----------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | Turap/Talud/ Bronjong | memperkuat Infrastruktur jalan | | |
| | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan | Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan | 11,28% | |
| | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan | 32,57% | |
| 3. Mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi, Membangun kerjasama dengan media massa dan Membangun prasarana informasi | Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa | Peningkatan perencanaan, pengawasan, monitoring & pelaporan | 90 % | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| | Program kerjasama dengan media massa | Persentase KIM dan internet keliling | 80 % | |
| 4. Penyelenggaraa penataan ruang yang terpadu | Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang | 2 Dok | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Pemanfaatan Ruang | Ratio RuangTerbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | 2 lokasi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5. Penataan ruang publik dan ruang Terbuka Hijau yang efektif dan | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau | - | Badan Lingkungan Hidup |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|-----------|--------------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| efisien | | | | |
| | | Terpeliharanya Taman dalam kab. Sidrap | 8 taman | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Pengelolaan areal pemakaman | Ratio TPU per satuan penduduk | 1 lokasi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Tersedianya sistem informasi tata ruang | - | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Terwujudnya koordinasi penyelenggara raan penataan ruang kab/kota | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Rasio jaringan irigasi | 3,45% | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | | Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri | 12.360 Ha | |
| | Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku | Rasio jaringan irigasi | 3,45 % | |
| | Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 75% | |
| | Program Pengendalian banjir | Cakupan areal terdampak yang tertangani | 45% | |
| | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | Jumlah perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif yang dilaksanakan | 60% | |
| 7. Mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan | Program pembinaan dan pengembangan bidang | Terkelolanya sumber2 energi terbarukan | 46,90% | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|--|---|---------|----------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | ketanagalistrikan | | | Energi |
| III. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis | | | | |
| 1. Meningkatkan dan membangun infrastruktur yang membuka akses antar wilayah | Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan | 19,13% | Dinas Bina Marga |
| | | Panjang jalan lingkungan yang terbangun | 3.300 m | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 2. Membangun prasarna dasar infrastruktur Permukiman | Perencanaan, Pengawasan, Pengujian dan Pengendalian Mutu | Tersedianya dokumen perencanaan umum | 8 Paket | Dinas Bina Marga |
| | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Peningkatan penanganan kasus kebakaran | 91% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|--|--|---------------------------|----------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 3. Meningkatkan cakupan layanan air bersih | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong | Terlaksananya Pembangunan Drainase/Gorong – gorong | 80,00% | Dinas Bina Marga |
| | | Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 10,9 % | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Jumlah des/kel yang terlayani air bersih | 5 Desa /kel | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Rasio Jaringan Irigasi | 3,45 % | PSDA |
| 4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi | Pengembangan, Pengeloaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Luas irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik | 75% | PSDA |
| | | Rumah tangga pengguna air bersih | 3 Desa /kel | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekbunan | 100 Unit | Dinas pertanian dan perkebunan |
| | Pengembangan Kinerja Pengelola an air minum dan air limbah | Rumah tangga ber Sanitasi | 5 Desa /kel | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Terbangunnya infrastruktur jalan perdesaan | 3.300 m | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan | 19,13% | Dinas Bina Marga |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa | Jumlah desa/kel yang terbangun infrastruktur perkotaan | 12 Kel. Kec. MaritengngaE | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 100% | 11 Kecamatan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|---------------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Besar | Tersedianya dokumen perencanaan sanitasi | Up Dating MPS | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Peningkatan cakupan layanan persampahan | 60% | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Ratio rumah tangga pengguna listrik | - | |
| 5. Penataan kawasan Kumuh | Pengembangan Perumahan | Ratio Rumah/Permukiman Layak Huni | 1 Kec | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 6. Peningkatan koordinasi dan Mitigasi bencana alam | Program peningkatan mitigasi bencana alam geologi | Tersedianya data-data untuk meng-antisipasi bencana alam geologi | 60,00% | Dinas Kehutanan pertambangan dan energi |
| | Program Kedaruratan dan Logistik | Cakupan Penanganan kedaruratan dan logistik | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi | 100% | |
| IV. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan | | | | |
| 1. Menjamin perlindungan konsumen | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Cakupan perlindungan konsumen | 2.50% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaporan | 85% | Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|---|--|------------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 2. Meningkatkan daya saing UMKM | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Peningkatan daya saing UMKM | 0,48% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3. Mengembangkan kemampuan permodalan | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Cakupan layanan fasilitas pembiayaan UMKM | 1.756 UMKM | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi | Persentase koperasi aktif dari jum. Koperasi | 50.9% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 4. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK | 45% | Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi |
| 5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya local | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapatkan perlindungan hukum | 30% | Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi |
| 6. Menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan | Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | Produksi Padi meningkat sampai 5 % per tahun | 534.50 Ton | Dinas pertanian & perkebunan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---------------------------------------|---------|---|-------------|------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Produktivitas Padi | 61,18 Ku/Ha | |
| | | Produksi Jagung meningkat 2% per tahun | 42.400 Ton | |
| | | Produktivitas Jagung | 61,18 Ton | |
| | | Produksi Kedelai meningkat 1% / Tahun | 614 Ton | |
| | | Produksi Melon Meningkatkan 1% / Tahun (Ton) | 88,20 Ton | |
| | | Produksi Cabe Meningkatkan 1,5% / Tahun (Ton) | 281 Ton | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---------------------------------------|---------|--|------------|------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Produksi Kakao meningkat 3% / Tahun (Ton) | 7.935 Ton | |
| | | Produksi Jambu Mete meningkat 2% per tahun (Ton) | 2.4 38 Ton | |
| | | Produksi Cengkeh meningkat 5 % per tahun (ton) | 591Ton | |
| | | Produksi Lada meningkat 3 % per tahun (Ton) | 87,49 Ton | |
| | | Berkembangnya pertanaman kelapa sawit | 50 Ha | |
| | | Kelompok plasma kebun karet | 3 Klp | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---------------------------------------|---------|--|--------------|---------------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Kontribusi sektor pertanian (Tanaman makanan dan perkebunan terhadap PDRB) | 46,04% | |
| | | Cakupan Penggunaan Pupuk Organik | 20 Ha | Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan |
| | | Demplot Produk Pertanian Organik | 20 Ha/20 Klp | |
| | | Jumlah Kelompok Penangkaran Benih | 10 Ha | |
| | | PERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 100% | Bagian Administrasi Sumber Daya Alam |
| | | Fasilitas akses permodalan | 99 klp | Dinas pertanian & perkebunan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---------------------------------------|--|---|---------|---------------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Hand Traktor | | |
| | | Skala usaha | 3 Klp | |
| | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Cakupan wirausaha kelompok wanita tani, UMKM dan koperasi | 14 Klp | Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan |
| | | Jumlah petani yang akan diberikan pemahaman tentang teknologi pertanian | | Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan |
| | | Jumlah BP3K (.....) yang mengikuti sosialisasi peningkatan produksi pertanian | 11 BP3K | Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan |
| | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Mesin Tanam (Unit) | 10 unit | Dinas pertanian & perkebunan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Hand Traktor (Unit) | 200 Unit | |
| | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan. | 70% | Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan |
| 7. Meningkatkan kualitas hasil produksi | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Padi (Tingkat Kehilangan Hasil) | 9,21% | Dinas pertanian & perkebunan |
| | | Jagung (Tingkat Kehilangan Hasil) | 6,25% | Dinas pertanian & perkebunan |
| | | Kualitas rendemen meningkat | 56% | Dinas pertanian & perkebunan |
| | Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | Promosi komoditi | Padi, Jagung, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Kopi, Melon dan Cabe | Dinas Pertanian & Perkebunan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|---|---|--|---------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 8. Meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air | Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai,danau dan sumberdaya air lainnya | Sumber air tambahan untuk lahan areal sawah tadah hujan dan perkebunan | 100 Unit | Dinas Pertanian & Perkebunan |
| 9. Meningkatkan akses transportasi | Pembangunan jalan tani dan jembatan | Panjang jalan tani terbangun | 30.000 Meter | Dinas Pertanian dan perkebunan |
| 10. Pengembangan kapasitas pelaku usaha tani | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan | 1 paket | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 11. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian secara optimal | Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok tani dan gapoktan. | 70% | Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| 12. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan | Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan | Kemampuan Teknis Penyuluh | 75% | Badan Penyuluh Ketahanan pangan |
| | | Jumlah Penyuluh yang telah mengikuti diklat dasar fungsional | *Terampil :- Org *Alih Kelompok: 5 Org *Ahli:2 Org | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|--|---------|--|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Peningkatan Jumlah latih dan kunjungan (LAKU) Fungsional Kabupaten di tingkat BP3K | 88 LAKU | |
| | | Peningkatan kemampuan penyuluh dalam penyusunan akreditasi | 75% | |
| 13. Mengembangkan akses pemasaran | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | Cakupan fasilitasi perumusan kebijakan | 80% | Bagian Administrasi Perekonomian dan Penanaman Modal |
| 14. Melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Jumlah Kelompok penangkaran benih padi | 10 Ha | Badan Penyuluh Ketahanan pangan |
| 15. Mempertahankan daya dukung hutan dan lahan | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | Terlaksananya penanaman /reboisasi pada kawasan hutan seluas 1.300 Ha | 0.813% | Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi |
| 16. Mencegah kerusakan sumber daya alam | Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam | Koordinasi dan rumusan kebijakan sumber daya alam | 80% | Bagian Administrasi Sumber Daya Alam |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|---|---|--------------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 17. Meningkatkan daya dukung sumber daya air | Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai,danau dan sumberdaya air lainnya | Tersedianya Sumber Air Permukaan dan Air tanah dalam untuk kebutuhan pada Lahan sawah tadah hujan dan Perekebunan | 100 Unit | Dinas Pertanian dan perkebunan |
| 18. Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air | Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ,dan rawa,jaringan pengairan lainnya | Cakupan pelayanan jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani | - | Dinas Pertanian dan perkebunan |
| 19. Mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan | Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup | 80% | Bagian Sumber Daya Alam |
| 20. Mendorong pengembangan produk pertanian organik | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Cakupan penggunaan pupuk organik | 20 Ha | Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| | | Demplot produk pertanian organik | 20 Ha/20 Klp | Badan Penyuluh Ketahanan Pangan |
| V. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran | | | | |
| 1. Mengembangkan infrastruktur pendukung | Program Penataan Struktur Industri | Cakupan bina kelompok pengrajin | 35 klp | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|--|--------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Cakupan peningkatan pelaku industri | 71% | |
| 2. Meningkatkan produktifitas UMKM | Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah | Cakupan jumlah IKM aktif dan produktif | 49% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Cakupan jumlah IKM baru | - | |
| | | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB | - | |
| | | Pertumbuhan industri | - | |
| 3. Meningkatkan akses informasi | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial | Pertumbuhan industri | 100% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 4. Mengembangkan produktifitas masyarakat miskin | Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (New Inisiatif) | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 26,5% | Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Daya Saing UMKM | 0,48% | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | Sistem informasi PM & promosi | 80% | Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal |
| | | Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 100% | Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Koordinasi, perumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD | 85% | Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal |
| | | Jumlah dan nilai PMDN serta PMA (org dan IDR/dollar) | 100 % | Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|--|--|---------------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif | Iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif | 80% | Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal |
| 5. Meningkatkan dukungan pengembangan kapet pare-pare sebagai kawasan strategis nasional | Program penelitian dan pengembangan potensi produk unggulan daerah | Meningkatnya informasi tentang potensi dan prospek pengembangan potensi produk unggulan daerah | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| VI. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaaan, olah raga dan kebudayaan | | | | |
| 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan | Program standarisasi pelayanan kesehatan | Persentase kepuasan pasien | 82% | RSUD NENE' MALLOMO |
| | | Rumah Sakit lulus akreditasi | 75% | RSUD ARIFIN NU'MANG |
| | | Lulus akreditasi versi 2012 tingkat pratama | Terakreditasi | RSUD NENE' MALLOMO |
| | | Tenaga dan sarana kesehatan yang bersertifikat | 100% | DINAS KESEHATAN |
| 2. Meningkatkan kapasitas pelayanan | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Persentase pasien rawat inap : | | RSUD NENE' MALLOMO |
| | | * BOR | 70% | |
| | | * Av LOS | 6 - 9 hari | |
| | | * BTO | 40-50 kali | |
| | | * TOI | 1-3 hari | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|---|---------------|---------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | * NDR | 19% | |
| | | * GDR | 35% | |
| | | Jumlah kunjungan RITL | 7243 pasien | |
| | | Jumlah kunjungan RJTL | 24.066 pasien | |
| | | Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS) | 40% | |
| 3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan | Program upaya kesehatan Masyarakat | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan | 84 % | RSUD Arifin Nu'Mang |
| | | Pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas | 15% | Dinas Kesehatan |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 80% | |
| 4. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Pemantauan Status Gizi | 3% | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Terpeliharanya kesehatan anak | 23/2 | |
| | Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak | Terlaksananya penyuluhan | 2 Ibu | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan | Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat | Presentase Kematian Ibu, Bayi dan Anak | - | Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 6. Pemerataan pembangunan kesehatan | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase penduduk yang menggunakan air minum sehat | 96% | Dinas Kesehatan |
| 7. Perlindungan kesehatan makanan | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | terjaminnya keamanan makanan | 100% | Dinas Kesehatan |
| 8. Penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera | Program Keluarga Berencana | Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Kab.Sidrap dari 2,44 ke 2,6 di tahun 2018 | TFR 2,35 | Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | Rata-rata Jumlah anak per keluarga =2 | 2 | |
| | Program Pelayanan Kontrasepsi | Cakupan peserta KB aktif | 68,5% | |
| | Unmet need = 17,33% | | 11% | |
| 9. Peningkatan minat baca masyarakat | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Presentase Jumlah pengunjung perpustakaan | - | Kantor Arsip dan perpustakaan |
| 10. Peningkatan mutu layanan pendidikan | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan | 97.00% | Dinas Pendidikan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|---|--------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Guru bersertifikasi di semua jenjang pendidikan | 50.00% | |
| 11. Mengembangkan akses pelayanan pendidikan | Program Layanan Pendidikan Tinggi (DIKTI) | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kualifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi | 70.00% | |
| 12. Peningkatan akses dan minat keolahragaan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Sarana dan prasarana olahraga | 8,54% | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
| 13. Pelestarian kekayaan budaya local | Pengembangan Nilai Budaya | Cakupan pementasan tim kesenian | - | |
| | Pengelolaan Kekayaan Budaya | Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan | 69% | |
| 14. Peningkatan akses pariwisata | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Cakupan kunjungan wisata dan mancanegara | 60% | |
| 15. Pemberdayaan kelompok pemuda | Peningkatan peran serta kepemudaan | Cakupan anggota kelompok Paskibraka yang terpilih dan dilatih | 75% | |
| 16. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan | Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Keagamaan | Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh, Tassbeh dan KIPRA | 85% | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|--------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 17. Menciptakan kaharmonisan umat beragama | Peningkatan pembinaan FKUB | Terciptanya Kerukunan Umat Beragama | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| VII. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik | | | | |
| 1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan | Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah | Jumlah SKPD yang kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang2an yang berlaku | 100% | Bagian Organisasi |
| | Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase SKPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur | 100% | Bagian Organisasi |
| 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (%) | 100% | 100% |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Semua SKPD |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah | 100% | Badan Kepegawaian Daerah |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|---|--------|---------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah | 50% | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional bagi PNS Daerah | 100% | |
| | | Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS | 100% | |
| 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase capaian kinerja keuangan | 100% | Semua SKPD |
| | | Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatkan Dari 60% Menjadi 100% | 100% | Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| 4. Melaksanakan pelayanan prima | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Semua SKPD |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 5. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah | Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Semua SKPD |
| 6. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur | 100% | Semua SKPD |
| 7. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Peningkatan Kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP | 100% | Inspektorat |
| 8. Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Status Pelayanan Kabupaten Pelayanan terhadap anak (Kabupaten Layak Anak) | AKB=25 ; AKI=2 ; SRA=10% ; TBA=40% | Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan |
| | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30% (2011) | 15% | |
| | | Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta = 6,76% | 7% | |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14% | 98% | |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|--|--|--------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Presentase SKPD yang menerapkan PPRG | 70% | |
| 9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam PUG dan perlindungan Anak | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak | Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender | 75% | |
| | | Penguatan Organisasi Gender dan Anak | 85% | Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat |
| 10. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase Desa yang berstatus Swakarsa | 10% | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |
| | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Persentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD | 17% | |
| 11. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintah Desa | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang meningkat kapasitasnya | 100.0% | |
| 12. Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undang | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan-Undangan | Tertib pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan | 100% | Bagian Hukum |
| | Program Penataan Peraturan Perundang Undangan | Presentase Peraturan Daerah | 100% | Sekretariat DPRD |
| | Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah (NEW) | Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan bupati | - | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|--|---|-------------|---|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| 13. Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Cakupan Peningkatan Kapasitas Wawasan Kebangsaan | 60 org | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |
| | | Kapasitas FKUB | 4 Kali | |
| 14. Meningkatkan Pengurus Utama Gender dan Perlindungan Anak | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak | Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender | 75% | Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan |
| 15. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak | Program peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, Rasio KDRT = 0,01 | 75% | |
| 16. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat | Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | Persentase jumlah anggota BKB, BKR, BKL yang ber-KB | | |
| VIII. Peningkatan subsektor peternakan sapi dalam menungjang perekonomian masyarakat | | | | |
| 1. Meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan | Program PeningkatanProduksi Hasil Peternakan | Jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan | | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi Sapi | 60.428 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi Kerbau | 3.001 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi Kuda | 1.111 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi Kambing | 13.424 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|--|---|---|------------------|--------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | Populasi ayam ras pedaging | 2.019.441 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi ayam buras | 4.812.928 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi ayam ras petelur | 3.145.002 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Populasi Itik | 581.394 ekor | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Produksi daging sapi | 732.828 Kg | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB: | Rp.739.528.155 | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Konsumsi/kapita/tahun | 2,64 Kg | Dinas peternakan dan perikanan |
| | | Koordinasi dan Rumusan Kebijakan peternakan | 70% | Bagian Adm. Sumber Daya Alam |
| 2. Mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 25% | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 3. Meningkatkan akses pemasaran | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | Jumlah rumah potong hewan | 1 Unit | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | Jumlah Kelompok Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 5 Klp 2 Kali | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 4. Meningkatkan produktifitas perikanan budi daya dan tangkap | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi perikanan budidaya | 731,80 ton | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Produksi perikanan tangkap | 3,230,5 ton ikan | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | Konsumsi ikan | 42,77 Kg | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | Kontribusi sub sektor | 12.295.765 | Dinas Peternakan |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN/ KEBIJAKAN UMUM | PROGRAM | KINERJA | | SKPD |
|---|---|---|----------------|--------------------------------|
| | | INDKATOR KINERJA | TARGET | |
| | | perikanan terhadap PDRB budidaya (Rp.000) | | dan Perikanan |
| | | Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tangkap (Rp. 000) | 58.349.450 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | Cakupan bina kelompok nelayan | 37,34% | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | | Cakupan Bina Kelompok Budidaya | 68% | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 5. Mengembangkan teknologi peternakan | Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna | 3 klp | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 6. Mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air laut, Payau dan Air Tawar | Jumlah ikan yang ditebar | 3.624.790 ekor | Dinas Peternakan dan Perikanan |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab V ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas RKPDP tahun rencana, Instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pada dokumen RPJMD, juga secara teknis mengacu pada usulan program kegiatan pada Renstra SKPD maupun rancangan Renja SKPD. Rencana program dan kegiatan tersebut juga telah mewakili pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, aspirasi dan kepentingan masyarakat dari hasil Musrenbang RKPDP tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran RKPDP ini.

Program kegiatan prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Kategori pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan pagu indikatif pendanaan disusun mempertimbangkan aspek pro growth, pro job, pro poor, pro environment, pencapaian MDGs, dan kewaspadaan bencana dalam kerangka kewilayahan untuk menjaga keserasian pertumbuhan antar wilayah, dipadukan dalam kerangka tema pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuan di Dalam RKPDP ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuan dalam RKPDP tahun 2016 ini, nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas tentunya disamping sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, juga harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, obyektif, rasional serta adil. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 terlampir.

Bab VI ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam RKPD dan kaidah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan umum, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD ini digunakan sebagai pedoman melaksanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2016 ini selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana SKPD dan Rancangan APBD yang menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program/ kegiatan pembangunan tahunan dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2016 di Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, juga diusulkan ke APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholders pembangunan termaksud masyarakat, serta dunia usaha

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan RKPD Tahun 2016 secara sinergis dan terintegrasi.

2. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016
3. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Renja SKPD, sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) dan dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2016.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
5. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati Sidenreng Rappang melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan / kegiatan yang dilakukan oleh masing masing Kepala SKPD.
8. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akhirnya dengan tersusunya RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.